



DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

(Studi Kasus di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Tarbiyah



Oleh :

ABDUL ADHIM

NIM : 232 05 130

**JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2010

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/ HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	September 2010
NO. KLASIFIKASI :	370 / Adh - 2
NO. INDIK :	708 920

pendidikan

PERNYATAAN

Dengan diawali *Bismillahirrokhmanirrokhim*, maka saya:

Nama : Abdul Adhim

NIM : 232 05 130

Jurusan : Tarbiyah

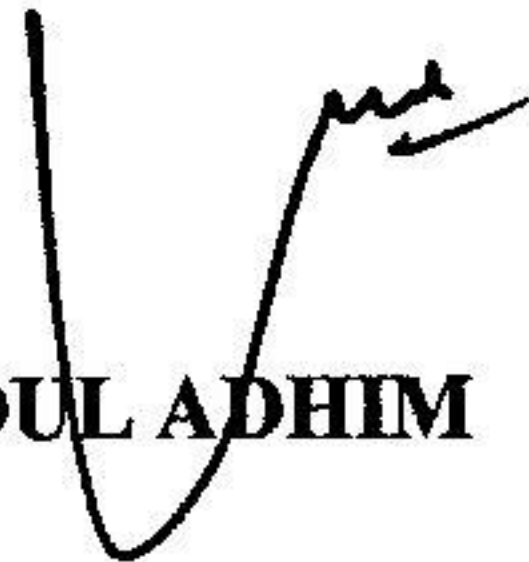
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Judul Skripsi : **DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 02 KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN)**

Menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa skripsi tersebut benar-benar merupakan karya sendiri.

Pekalongan, 20 Mei 2010

Yang Menyatakan


ABDUL ADHIM

NOTA PEMBIMBING

DR. Imam Hanafi, M.Ag

Alamat : Perum Griya Tirto Indah Gg.2 NO. 62 Pekalongan.

Telp : (0285) 7911349

HP : 085742017659

Hal : Naskah Skripsi Saudara Abdul Adhim

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Tarbiyah
Di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan koreksi seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : ABDUL ADHIM

NIM : 232.05.130

Jurusan : Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Judul Skripsi : **DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM
(STUDI KASUS DI SMPN 02 KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Mei 2010

Pembimbing



DR. IMAM HANAFI, M.Ag
NIP. 1975 11/20 1999 03 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

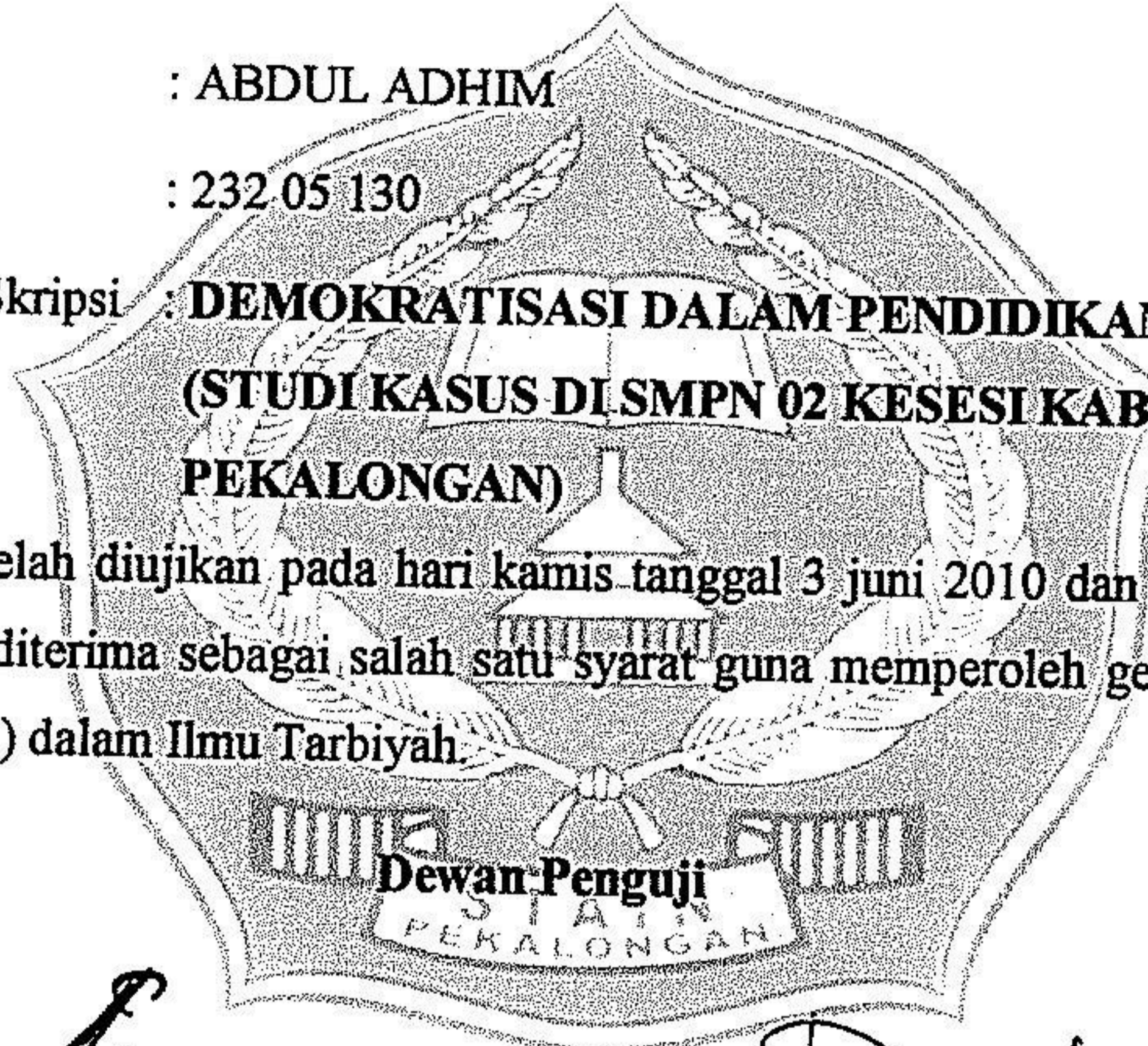
Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan telp. (0285) 412575-412572
Fax. 423418 Email: stain_pkl@telkom.net@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : ABDUL ADHIM
NIM : 232.05.130
Judul Skripsi : **DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM
(STUDI KASUS DI SMPN 02 KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Tarbiyah.



Dewan Penguji

Dra. Hj. Musfirotun Yusuf, M.M.
Ketua

Dwi Istiani, M.Ag.
Anggota

Pekalongan, 3 Juni 2010

Ketua



Drs. H. Sudarvo El Kamali, M.A.
NIP. 19480805 198403 1 001

PERSEMBAHAN

Sebuah penelitian yang mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang memiliki arti dan makna dalam hidup ini, yaitu :

1. Ibunda dan Ayahanda tersayang yang mendidikku sejak masih dalam kandungan hingga selesainya skripsi ini.
2. Kakanda yang telah memberi motivasi dan selalu memberikan saran konstruktif untuk pembuatan skripsi ini.
3. Bapak/ Ibu guru penulis, mulai dari guru TK sampai guru di Madrasah Aliyah yang senantiasa mendidik dan mengayomi.
4. Semua dosen yang dengan sabar telah mentransfer ilmunya.
5. Kepala SMP Negeri 02 Kesesi yang begitu banyak memberikan informasi dan saran-saran untuk penulis.
6. Rekan-rekanita satu perjuangan IPNU IPPNU Kabupaten Pekalongan yang selalu mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-temanku di kampus yang selalu memberikan stimulan agar dapat menyelesaikan skripsi dengan segera.

MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya :

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al Ahzab : 21)

******* WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY *******

(dimana ada kemauan di situ ada jalan/ cara)

******* BELAJAR BERJUANG BERTAQWA *******


ABSTRAK

Nama : Abdul Adhim
NIM : 232 05 130
Judul Skripsi : Demokratisasi Dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus Di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen. Lebih jauh, demokratisasi adalah pembebasan manusia dari ketergantungan atas realitas objektif yang sering menghambat pengembangan diri. Sudah waktunya sistem pendidikan yang selalu mengandalkan kekuasaan pendidik, tanpa memperhatikan pluralisme peserta didik dan menjauhkan peserta didik dari demokratisasi pendidikan, harus di renovasi agar tercipta generasi madani. Terciptanya generasi madani tidak terlepas dari campur tangan pendidik, oleh karena itu, pendidik hendaknya perlu membekali peserta didiknya cara-cara berdemokrasi melalui demokratisasi pendidikan. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan berguna untuk menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Dari sinilah mengapa muncul sebuah gagasan tentang demokratisasi dalam pendidikan Islam yang memang harus dikaji. Dan dalam hal ini penulis melakukan penelitian di SMPN 02 Kesesi kabupaten Pekalongan.

Ada tiga permasalahan yang akan dijawab dalam skripsi ini yaitu tentang pengertian demokratisasi kemudian bagaimana demokratisasi dalam pendidikan Islam serta bagaimana pelaksanaan demokratisasi pendidikan Islam di SMPN 02 Kesesi kabupaten Pekalongan. Tentunya ini dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam arti demokratisasi dalam pendidikan Islam serta Untuk mengetahui pelaksanaan demokratisasi dalam pendidikan di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan. Yang berguna untuk mengembangkan studi keislaman dikalangan mahasiswa Islam pada umumnya dan lingkungan STAIN pada khususnya. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pijakan bagi pendidik dalam usaha membentuk karakter yang kreatif peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga ikut memberikan sumbangan pemikiran yang aspiratif dan konstruktif bagi SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah eksperimen. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode angket, observasi, interview dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi dan Guru di SMP Negeri 02 Kesesi kabupaten Pekalongan, tetapi yang diutamakan adalah populasi dari siswa-siswi. Untuk populasi siswa-siswi SMPN 02 Kesesi berjumlah 619, kemudian sampel yang diambil dengan cara $10/100 \times 619$ anak yang hasilnya adalah 60 anak. Dalam menganalisa data, pada dasarnya bersifat kualitatif yaitu menganalisa data yang bersifat non angka yang penyusunannya menggunakan prosedur



induktif guna memperoleh pemahaman dan kesimpulan. Kemudian untuk menganalisa data yang bersifat angka, sekaligus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokratisasi pendidikan di SMP N 02 Kesesi kabupaten Pekalongan, maka penulis menggunakan tabel distribusi frekuensi relatif, tabel ini dikatakan frekuensi relatif karena disini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk persentase. Adapun untuk memperoleh frekuensi relatif tersebut penulis menggunakan rumus : $P = F/N \times 100 \%$.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pelaksanaan demokratisasi pendidikan di SMP N 02 Kesesi kabupaten Pekalongan tercermin dalam pelaksanaan yang memiliki beberapa kaidah diantaranya, kaidah *ta'aruf* (saling mengenal), *syura* (musyawarah), *ta'awun* (kerja sama), *masalah* (menguntungkan masyarakat), *'adil* (adil), *taghyir* (perubahan). Selain itu juga didapatkan bahwa pelaksanaan demokratisasi pendidikan Islam di SMP N 02 Kesesi kabupaten Pekalongan cukup baik atau dengan hasil sebesar 58,95 %.

TRANSLITERASI

Daftar huruf-huruf dan tanda-tanda latin yang menggantikan huruf-huruf Arab, dalam penulisan skripsi adalah berdasarkan pada ejaan yang dipakai oleh Departemen Agama Republik Indonesia di dalam terjemah al Quran :

Kh	=	خ	(khaa')	Sy	=	ش	(syin)
Dh	=	ض	(dhaad)	Ts	=	ث	(tsaa)
Th	=	ط	(thaa)	Z	=	ز	(zaa')
Sh	=	ص	(shaad)	Q	=	ق	(qaaf)
Zh	=	ظ	(zhaa)	H	=	ح - ه	(haa')
Gh	=	غ	(ghain)	/	=	ء	(hamzah)
Dz	=	ذ	(dzal)	'	=	ع	('ain)

Ejaan dan tanda-tanda penulisan dalam skripsi ini, sama dengan yang dipakai oleh buku-buku lain yang sudah lama tersiar di kalangan masyarakat. Kalimat-kalimat yang terpakai dalam bahasa Indonesia, maka ditulis menurut lazimnya.* :


*Departemen Agama Republik Indonesia, al Quran dan Terjemahan, Semarang: PT. Tanjung Mas, 1992, hlm. 173

KATA PENGANTAR

Ungkapan Syukur yang teramat dalam dipersembahkan kehadirat Allah Azza Wajalla, karena dengan pertolonganNya, penulisan skripsi berjudul **“Demokratisasi dalam Pendidikan Islam (Studi kasus di SMPN 02 Kesesi kabupaten Pekalongan)”** akhirnya dapat diselesaikan sesuai rencana. Relevan dengan judulnya, skripsi ini berupaya mengkaji secara serius tentang demokratisasi Pendidikan, diharapkan hasil kajian ini selain bermanfaat sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada program S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, juga membawa manfaat bagi pihak pihak terkait sebagai upaya inovasi ilmiah untuk memperbanyak kanzah keilmuan, sebagai bahan komparasi, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut.

Sekaligus sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan Pendidikan Islam. Penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi penulisan dan penyelesaian karya ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. Ade Dede Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Zaenal Mustaqim, M. Ag selaku Ketua Jurusan Tarbiyah.
3. Bapak DR. Imam Hanafi, M.Ag dalam kapasistasnya sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

- 
4. Bapak Kabag perpustakaan STAIN Pekalongan beserta staf yang telah membantu penulis dalam melayani kebutuhan buku-buku di perpustakaan.
 5. Bapak Kepala SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
 6. Rekan-rekan yang telah memberikan motivasi bagi penulis.
 7. Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penulisan skripsi ini

Kepada mereka semua disampaikan *jazakumulloh khairon katsiro*.

Namun demikian tentu saja dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik konstruktif selalu diharapkan demi perbaikan dimasa masa yang akan datang. Akhirnya hanya kepada Allah diajukan permohonan, semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua serta diridhoi Allah SWT.

Pekalongan, 20 Mei 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan	8
E. Kegunaan	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN

A. Konsep Demokratisasi	24
B. Konsep Demokratisasi Pendidikan Islam	38



**BAB III IMPLEMENTASI DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM
DI SMP NEGERI 02 KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Gambaran Umum SMPN 02 Kesesi	51
1. Sejarah SMPN 02 Kesesi	51
2. Struktur Organisasi	52
3. Keadaan Anak	56
4. Sarana dan Fasilitas di SMPN 02 Kesesi	57
B. Pelaksanaan Demokratisasi Pendidikan Islam di SMPN 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan	59
1. Muatan Kurikulum serta Beban Belajar	59
2. Struktur Kurikulum	62
3. Pengembangan Diri	63
4. Regulasi Sekolah	65
5. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)	68
6. Penilaian	69
7. Kriteria Kenaikan Kelas	71
8. Kriteria Kelulusan	71
9. Pengembangan <i>Life Skill</i>	72
10. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global	72

**BAB IV ANALISIS DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN
ISLAM**

A. Analisis Penerapan Demokratisasi Dalam Pendidikan Islam di SMPN 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan	79
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Demokratisasi Dalam Pendidikan Islam di SMPN 02 Kesesi	91
1. Faktor Pendukung	91
2. Faktor Penghambat	92



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Daftar keadaan siswa-siswi SMPN 02 Kesesi	56
Tabel II	: Sarana dan fasilitas SMPN 02 Kesesi	58
Tabel III	: Pelaksanaan demokratisasi pendidikan Islam oleh guru di SMPN 02 Kesesi	74
Tabel IV	: Pelaksanaan demokratisasi pendidikan Islam oleh peserta didik di SMPN 02 Kesesi	76
Tabel V	: Partisipasi dalam sholat berjamaah	80
Tabel VI	: Partisipasi dalam tanya jawab	81
Tabel VII	: Nasehat oleh Bapak/ Ibu guru	82
Tabel VIII	: Konsultasi masalah pendidikan	83
Tabel IX	: Menghargai teman	84
Tabel X	: Tanya jawab dengan Bapak/ Ibu guru	85
Tabel XI	: Mendatangi rumah Bapak/ Ibu guru	87
Tabel XII	: Persentase demokratisasi dalam pendidikan Islam oleh peserta didik di SMPN 02 Kesesi	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen. Lebih jauh, demokratisasi adalah pembebasan manusia dari ketergantungan atas realitas objektif yang sering menghambat pengembangan diri. Demokratisasi dalam pendidikan tidak saja melestarikan sistem nilai masa lalu, tetapi juga bisa mempersoalkan dan merevisi sistem nilai tersebut. Hal ini dapat dilakukan jika memang sistem nilai yang ada dinilai sudah tidak memiliki relevansi dengan konteksnya.¹

Dengan demikian, pendidikan demokratis merupakan pendidikan yang bisa memahami manusia. Pendidikan semacam ini, dalam proses penyelenggaraanya, haruslah bisa menjelaskan tentang manusia bagi kepentingan pendidikan, yang berpegang pada lima prinsip, yaitu :


1. Manusia memiliki sejarah. Maksudnya adalah manusia mampu melakukan *self reflection*, mampu keluar dari dirinya dan menengok

¹ Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar ruzz media, 2008), hlm.61

merupakan koreksi terhadap masa lalu untuk sebuah rekonstruksi baru di masa depan.

2. Manusia adalah makhluk dengan segala individualitasnya. Artinya, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan potensi yang dimiliki sehingga manusia adalah sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek.
3. Manusia selalu membutuhkan sosialisasi untuk menyatakan eksistensinya dalam hubungan sosial antar manusia.
4. Manusia mengadakan hubungan juga dengan alam sekitarnya. Kesadaran manusia menyatakan bahwa ketersediaan alam belum semuanya cocok untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu manusia harus bekerja. Dan bekerja disini merupakan perbuatan mencipta dengan tetap mengandung dimensi kemanusiaan. Ia merupakan gabungan antara budi dan rasa yang berdaya untuk menafsirkan dunianya.
5. Manusia dalam kebebasannya mengolah alam pikir dan rasa sehingga bisa menemukan yang transendental. Hubungan antara manusia dengan Tuhan yang terlambangkan dalam kepercayaan/ iman merupakan terobosan manusia untuk keluar dari eksistensi empirisnya yang terbatas menuju sumbernya yang pertama dari eksistensi dirinya dan dunia.²

² A. waidl, "Pendidikan Yang Memahami Manusia" dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (ed), *Transformasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.22-23



Selain lima prinsip di atas, ada hal penting lain yang mesti kita perhatikan dalam menumbuhkan demokratisasi pendidikan, yaitu komunikasi. Demokratisasi pendidikan mensyaratkan adanya proses ke segala arah dan bukan hanya bersifat satu arah, yaitu dari pendidik ke anak didik (*top down*) melainkan juga ada keseimbangannya, yaitu dari anak didik dengan pendidik dan antar anak didik sendiri (*network*). Dengan model komunikasi *top down*, akan timbul kecenderungan pendidik merasa capek, karena pendidik yang menjadi pusat. Dia harus berceramah, menulis, berdemonstrasi, dan seterusnya, sementara anak didik mungkin saja tidak mengerti, pasif, bosan, mengantuk dan yang lebih parah lagi, anak didik merasa tidak mendapatkan informasi baru. Pada model komunikasi semacam ini, pendidik merupakan satu-satunya sumber belajar dengan otoritas yang sangat tinggi dan menganggap otak anak didik bagaikan tong kosong yang siap diisi penuh dengan berbagai informasi darinya.³

Berbeda dengan model komunikasi *top down*, model komunikasi *network* memposisikan sumber belajar bukan hanya terletak pada pendidik saja, melainkan juga pada anak didik. Dengan model komunikasi semacam ini pendidik cenderung tidak akan merasa lelah,

³ Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar ruzz media, 2008), hlm.62

sementara anak didik juga akan lebih mengerti dengan belajar dari pengalamannya sendiri, aktif senang, dan kaya dengan informasi baru.⁴

Demokratisasi pendidikan tidak harus dimulai dari sistem pendidikan berskala nasional. Bahkan akan lebih efektif jika dimulai dari sistem pendidikan berskala lokal, berupa pendidikan di dalam kelas. Dalam proses dedaktik metodik di dalam kelas, demokratisasi pendidikan dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keberadaban, sebab hal ini merupakan inti dari proses pendidikan, tidak seperti hari ini malah menjauhkan peserta didik dari pembaharuan kultur dan norma keberadaban.⁵

Dengan demikian, pendidikan bukan lagi merupakan kebudayaan yang beku (*froozen culture*) yang tidak mengalami perubahan dan anti kritik, tetapi merupakan kebudayaan dinamis yang secara terus menerus dapat dikritik dan direvisi ke arah yang lebih baik. Artinya, dunia pendidikan harus selalu memperhitungkan kebutuhan anak didik. Jika pendidikan mengabaikan kebutuhan anak didik dan memaksakan berjalan secara kaku, sebagaimana yang digariskan dalam kurikulum, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan pun belum tentu akan dicapai.⁶

⁴ Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar ruzz media, 2008), hlm.62-63

⁵ <http://tirtaamartya.wordpress.com/2007/06/07/demokratisasi-pendidikan/>

⁶ Heru Nugroho, "*Pendidikan Demokrasi, Demokratisasi Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia*", Makalah diskusi triwulan HMJ-PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 14 Desember 1994.


Sudah waktunya sistem pendidikan yang selalu mengandalkan kekuasaan pendidik, tanpa memperhatikan pluralisme peserta didik dan menjauhkan peserta didik dari demokratisasi pendidikan, harus di renovasi agar tercipta generasi madani. Terciptanya generasi madani tidak terlepas dari campur tangan pendidik, oleh karena itu, pendidik hendaknya perlu membekali peserta didiknya cara-cara berdemokrasi melalui demokratisasi pendidikan. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan berguna untuk menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain.⁷

Demokrasi menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama jenis kelamin dan bahasa ibu, sedangkan tiap agama tentu lebih cenderung untuk mencari perbedaan atas dasar hal tersebut di atas, minimal agama memiliki kekhususan (unikum) nya sendiri. Yang secara mendasar harus ditundukan kepada kepentingan bersama seluruh bangsa,, apalagi diinginkan agama tersebut dapat menjunjung demokrasi. Jelaslah dengan demikian, bahwa fungsi *transformative* yang dibawakan oleh agama bagi demokratisasi kehidupan masyarakat, harus bermula dari transformasi intern masing-masing agama.⁸

Dari sinilah mengapa saya mengambil judul demokratisasi dalam pendidikan Islam, dan dalam hal ini penulis mengambil studi kasus

⁷ <http://tirtaamartya.wordpress.com/2007/06/07/demokratisasi-pendidikan/>

⁸ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. (Jakarta: The Wahid Institute), hlm.286-287



di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan, karena di sekolah tersebut sudah terlihat tanda-tanda demokratisasi. Demokratisasi bukan atau tidak hanya dalam negara/ pemerintahan saja, namun demokratisasi juga patut kita terapkan dalam pendidikan Islam. Pendidikan demokrasi dan demokratisasi pendidikan seharusnya ditanamkan pada setiap warga di seluruh pelosok Tanah Air. Perlu diketahui meskipun proses demokrasi pendidikan Islam tetapi tetap tidak boleh keluar dari jalur agama. Demokratisasi dalam pendidikan Islam tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian demokratisasi ?
2. Bagaimana demokratisasi dalam pendidikan Islam ?
3. Bagaimana pelaksanaan demokratisasi pendidikan di SMPN 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan ?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dan mencegah agar tidak terjadi salah pengertian dari judul skripsi ini, maka penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah itu diantaranya :

1. Demokratisasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang

berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.⁹

Sedangkan demokratisasi merupakan proses menjadi demokrasi.¹⁰

Demokratisasi pendidikan mengandung arti, proses menuju demokrasi di bidang pendidikan. Indikator dari demokrasi adalah terbuka, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, bebas tekanan atau paksaan, mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama.¹¹

2. Pendidikan Islam

Pendidikan adalah segala jenis pengalaman kehidupan yang mendorong timbulnya minat belajar untuk mengetahui dan kemudian bisa mengerjakan sesuatu hal yang telah diketahui itu.¹²

Sedangkan pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada sikap perbaikan mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain.¹³

⁹ <http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/28>
juni 2009

¹⁰ Cholisin dkk, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Yogyakarta: FISE UNY Press, 2007). Hlm. 102

¹¹ Abdullah, 2006 : 152 dari *www. Demokratisasi Pendidikan. Com*

¹² Suparlan Suhartono, *Wawasan pendidikan: sebuah pengantar pendidikan*, (Jogjakarta: Ar ruuz media, 2008). Hlm. 43

¹³ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta; Bumi aksara, 1992). Hlm. 28



3. SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan

Adalah sekolah menengah tingkat pertama yang terletak di jalan raya Karyomukti Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan kode pos 51162 Telp. (0285) 7909725. Email Smp02kesesi@yahoo.co.id.

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui secara umum arti demokratisasi.
2. Untuk mengetahui secara mendalam arti demokratisasi dalam pendidikan Islam.
3. Untuk mengetahui pentingnya demokratisasi dalam pendidikan Islam.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan demokratisasi dalam pendidikan di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan.

E. Kegunaan

1. Untuk mengembangkan studi keislaman dikalangan mahasiswa Islam pada umumnya dan lingkungan STAIN pada khususnya.
2. Ikut memberikan sumbangan pemikiran yang aspiratif dan konstruktif bagi dan para pembaca dalam membina anak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pijakan bagi pendidik dalam usaha membentuk karakter yang kreatif peserta didik dalam proses belajar mengajar.
4. Ikut memberikan sumbangan pemikiran yang aspiratif dan konstruktif bagi SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan.

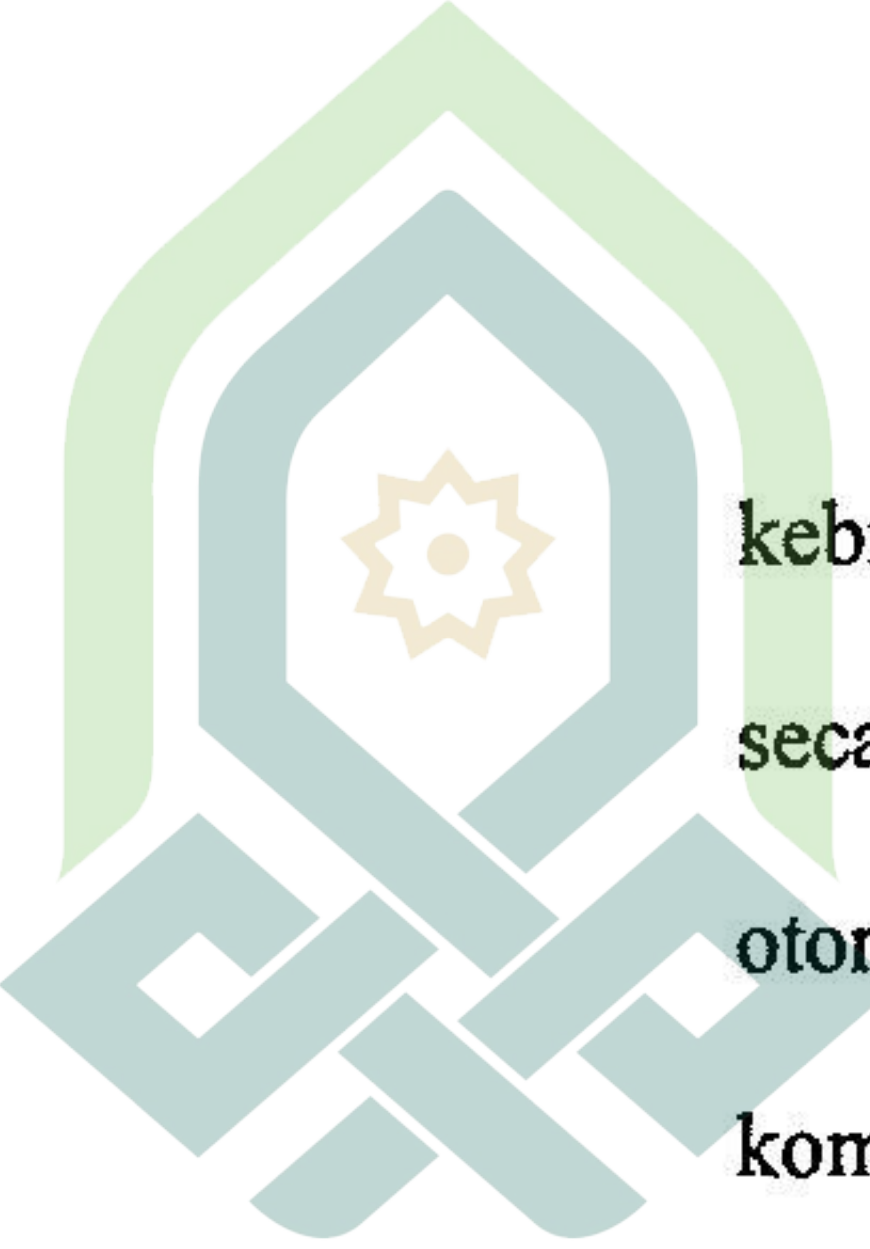
F. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis

Dalam buku yang berjudul *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* karangan Ngainun Naim dan Achmad Sauqi bahwa demokratisasi tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, tetapi juga berkaitan dengan keseluruhan dimensi pendidikan, termasuk aspek kelembagaan. Dalam rangka kelembagaan, sebuah sekolah layak disebut sebagai sekolah yang demokratis jika memiliki ciri-ciri: *pertama*, sangat berorientasi normatif, yakni manajemen harus selalu didasarkan pada kesepakatan. Apapun program yang hendak dikembangkan dan diimplementasikan harus didasarkan pada kesepakatan seluruh komponen yang ada dalam sekolah. Ini harus tidak hanya menjadi *values*, tetapi juga sebagai sebuah keyakinan bahwa model inilah yang terbaik.

Kedua, pendekatan demokratis sangat layak untuk organisasi dengan para anggota dari kalangan profesional, yakni mereka yang memiliki kemampuan secara teknis dan keterampilan serta memiliki otoritas dalam keahliannya. Organisasi sekolah harus dikelola oleh kalangan profesional, karena anak didik memerlukan pembinaan dan pelayanan dari mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya.

Ketiga, penanaman nilai, kultur dan kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri, yang sudah dimulai dalam fase pendidikan dan tahun-tahun pertama mereka bekerja.



Keempat, pengambilan keputusan tentang berbagai kebijakan penting dilakukan oleh sebuah komite dan tidak dilakukan secara individual oleh seorang kepala sekolah dengan menggunakan otoritas kepemimpinannya. Dan semua unsur memiliki wakil dalam komite tersebut, yang harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam komite terhadap konstituennya.


Kelima, semua putusan ditetapkan dengan cara konsensus atau kompromi dan sedapat mungkin dihindari polarisasi organisasi karena perbedaan pendapat dan pandangan. Perbedaan dalam proses harus diakhiri dengan konsensus atau kompromi, walaupun terkadang harus menghargai kecenderungan mayoritas.¹⁴

Kemudian dalam buku *Dasar-dasar Ilmu politik* karangan Cholisin dkk bahwa Demokratisasi merupakan proses menjadi demokrasi. Ini berarti merupakan proses transformasi dari otoriterisme menuju kehidupan yang demokratis. Otoriterisme dapat didefinisikan sebagai yang tidak memiliki unsur pluralisme dan partisipasi yang berarti, sebagai sistem non demokratis. Rezim otoriter sering memerintah lewat pola-pola rasa takut dan kekerasan dengan ditopang oleh ideologi atau lembaga-lembaga negara.¹⁵

Dalam buku yang berjudul *Dunia perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan* karangan A. Malik Fadjar dan Muhajir Effendy bahwa dalam perspektif pendidikan tinggi seperti universitas, institut

¹⁴ Dede Rosyada, *Paradigama Pendidikan Demokratis*, hlm.228-229.

¹⁵ Cholisin dkk, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Yogyakarta: FISE UNY Press, 2007), hlm. 102-103



atau sekolah tinggi, konsepsi demokrasi pendidikan adalah kebebasan akademik, yaitu hak seorang dosen untuk mengajar serta hak mahasiswa untuk belajar tanpa adanya pembatasan dan pencampuran dengan hal-hal yang tidak *aqliyah* (rasional).¹⁶

Jadi yang dimaksud dengan Demokratisasi Pendidikan Islam adalah proses menuju demokrasi dalam bidang pendidikan Islam yang lebih humanistik dan beradab sesuai dengan cita-cita masyarakat madani secara terbuka, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, bebas tekanan atau paksaan, mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama.

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan sistem pendidikan telah dilakukan oleh Surya Darma (2007) UMS, dalam skripsinya dengan judul *Pemikiran Abdul Munir Mulkhan Tentang Pendidikan Multikultural*, menyimpulkan bahwa Abdul Munir Mulkhan berpandangan pada teologi pendidikan Islam, kritik terhadap pendidikan Islam, kesalahan multikultural, humanisasi pendidikan Islam, kearifan tradisional dalam pendidikan.

Dengan memperhatikan tinjauan pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran tentang Demokratisasi Pendidikan Islam belum dilakukan pada peneliti sebelumnya, terlebih di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan, maka penulis mengambil objek penelitian mengenai Demokratisasi Dalam Pendidikan Islam di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan.

¹⁶ A. Malik Fadjar dan Muhajir Effendy, *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan*, (Malang: P3-UMM, 1991), hlm.3


2. Kerangka berfikir

Banyak indikator telah menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita masih sedemikian memprihatinkan. Rendahnya rata-rata NEM yang dapat dicapai oleh siswa dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas memberi petunjuk betapa rendahnya mutu pendidikan terhadap penguasaan bahan ajar yang dapat diserap.

Kesenjangan yang bertingkat juga terjadi dan dirasakan oleh masing-masing jenjang seperti halnya sering dilansir kalangan Perguruan Tinggi yang merasa bahwa bekal kemampuan lulusan SMA masih dipandang kurang memadai, selanjutnya di kalangan guru-guru SMA dirasakan betapa rendahnya kemampuan lulusan SMP, demikian selanjutnya guru-guru SMP juga mengeluh betapa lemahnya kemampuan para lulusan SD. Belum lagi adanya 88,4% lulusan SMA tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan 34,4% lulusan SMP tidak dapat melanjutkan ke SMA (Balitbang Diknas, 2000). Hal ini tentunya juga berlanjut yakni betapa masih banyaknya lulusan SD yang tak dapat melanjutkan ke SMP.

Keterpurukan pendidikan kita juga akan tampak semakin jelas bila kita mengacu pada komparasi internasional, dimana diketahui betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dilaporkan oleh Human Development Index yakni Indonesia menduduki peringkat 102 dari 106 negara yang disurvei, satu peringkat di bawah Vietnam. Sementara itu hasil survei the Political Economic Risk Consultation (PERC) melaporkan bahwa

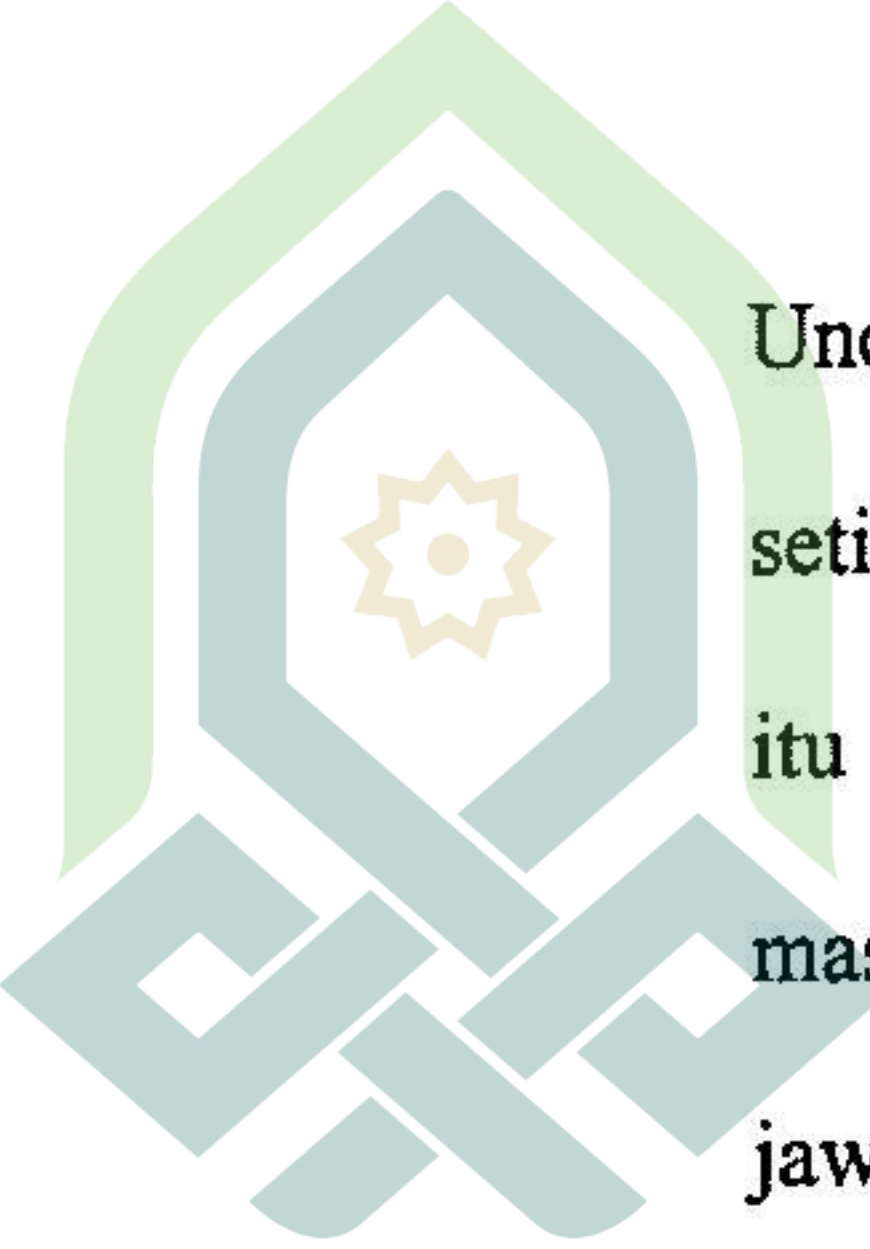




Indonesia berada di peringkat ke 12 dari 12 negara yang disurvei, juga satu peringkat di bawah Vietnam.

Ketika mutu pendidikan belum dapat teratasi, tantangan lain juga tengah muncul seperti angka putus sekolah sebagaimana yang telah disinggung di atas yang relatif tinggi, daya tampung sekolah yang masih sangat terbatas, angka pengangguran yang terus meningkat, lapangan kerja yang masih terbatas, dan seterusnya. Kesan-kesan sementara yang dapat ditangkap adalah bahwa pendidikan baru pantas dinikmati oleh sekelompok orang yang berduit. Kesan semacam ini tampak mencolok ketika sebuah sekolah dan perguruan tinggi favorit secara terbuka memberikan “kesempatan kepada siapapun” untuk menjadi siswa/mahasiswa sejauh mampu memberikan sejumlah dana yang ditawarkan. Sementara itu masyarakat awam tidak banyak memiliki informasi tentang hak dan kriterianya untuk menuju kesana.

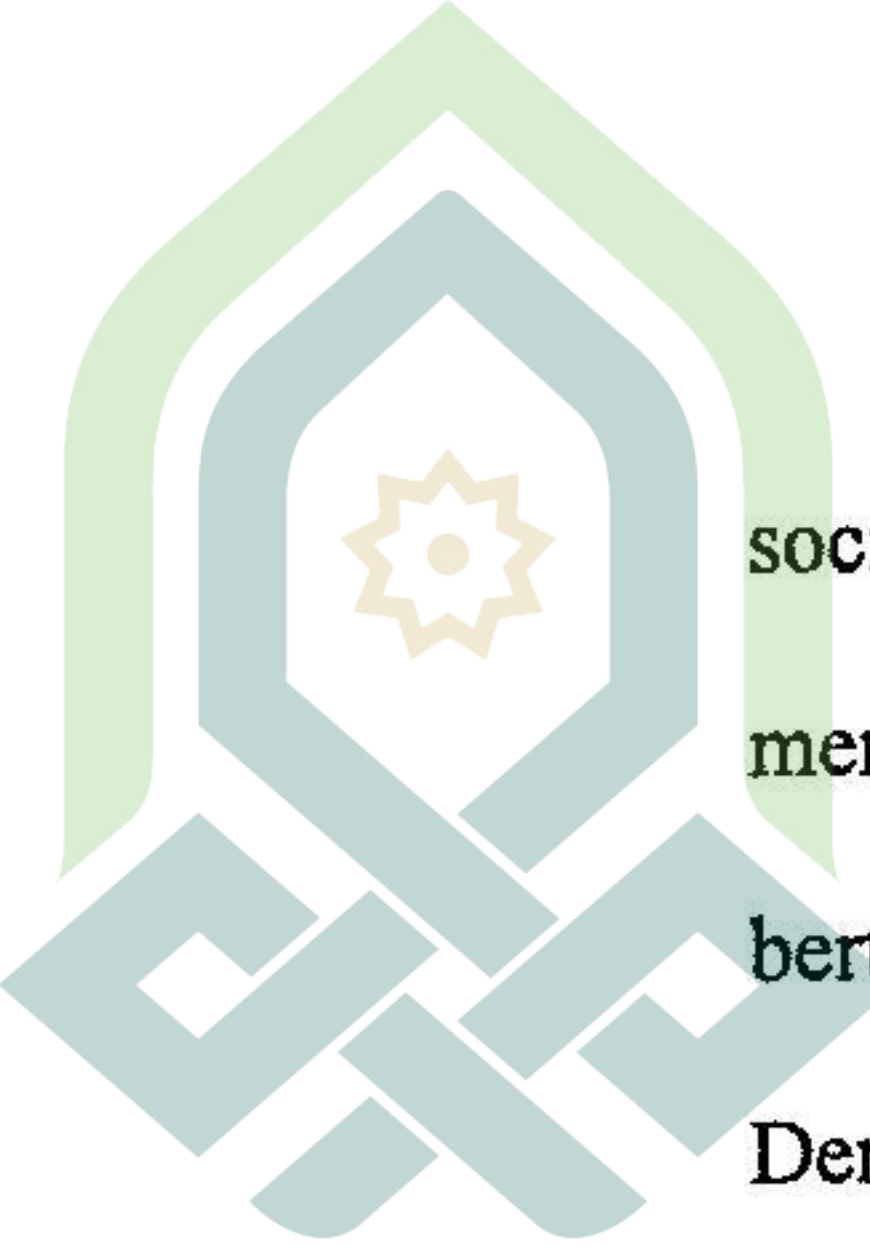
Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.



Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Mengenai tanggung jawab pemerintah secara tegas telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Secara retorik kedua ayat tersebut, telah cukup dapat dipergunakan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di bidang pendidikan yakni diberinya peluang bahkan dalam batas tertentu diberikan kebebasan, kepada keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan tuntutan lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu ditiadakan, dikurangi atau setidaknya ditinjau kembali hal-hal yang sudah tidak relevan.



Dalam kaitannya dengan masyarakat belajar (learning society) perlu diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat memilih belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan falsafah negara. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan prinsip belajar seumur hidup.

Selama ini memang kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan telah menuju pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga secara konseptual pemerintah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun secara realitas masih cukup banyak diantara kelompok usia sekolah yang tidak/belum dapat menikmati pendidikan karena alasan tertentu baik karena ketidakterjangkauan biaya, tempat maupun kesempatan, sehingga hak mereka seolah terampas dengan sendirinya

G. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian secara mudahnya biasa disebut dengan jenis atau corak penelitian, memang seringkali tidak disebutkan secara tersendiri dalam rencana penelitian. Hal ini dikarenakan jenis penelitian dalam kalimat judul sudah disebutkan, akan tetapi menurut

penulis, hal itu tetap perlu disebutkan karena jenis penelitian sangat berkaitan erat dengan tujuan penelitian itu sendiri.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah eksperimen, hal ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan demokratisasi dalam pendidikan di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.¹⁸ Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau subyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain.

Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.hlm.90.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineke Cipta.hlm.141

dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep tertentu.

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini diklasifikasi sebagai berikut :

- a. Variabel bebas adalah demokratisasi yang meliputi nilai-nilai demokrasi, diantaranya adalah terbuka, rasional, menghargai pendapat, jujur, bebas tekanan atau paksaan, mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama.
- b. Variabel terikat adalah pelaksanaan pendidikan Islam di SMP N 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan yang meliputi pengajaran dan pengamalannya.

3. Subjek Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi dan Guru di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Penulis mengambil sampel 25% dari jumlah siswa dan Guru SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pengambilan sampel tersebut berdasarkan petunjuk cara pengambilan sampel, bahwa apabila populasi kurang dari 100 maka yang akan diambil semuanya



tetapi jika lebih dari 100 diambil 10% - 15% atau 20% - 25% sebagai penelitian.

Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, sampel acak atau *random sampling / probability sampling*, dan sampel tidak acak atau *non random sampling/nonprobability sampling*. Yang dimaksud dengan *random sampling* adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Artinya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan *non random sampling* atau *non probability sampling*, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel acak atau *random sampling / probability sampling*.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari daerah penelitian, yang meliputi :, Guru, Anak didik SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari hasil membaca buku-buku atau literatur yang berisi tentang hal-hal yang terkait dengan



judul.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan demokratisasi pendidikan, dokumen, arsip, internet dan lain-lain. Selain dari hal tersebut, kepala sekolah juga termasuk sebagai sumber data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Angket

Yaitu metode penelitian dengan menggunakan pertanyaan tertulis mengenai suatu bidang atau hal.²⁰ Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan demokratisasi dalam pendidikan di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Penulis akan membuat angket yang berjumlah 20 (dua puluh) pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda 3 option.

b. Metode Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹ Dalam hal ini untuk mengamati proses belajar mengajar dan juga mengamati fasilitas yang ada di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan, seperti keadaan gedung, ruangan, toilet dan lain-lain.

¹⁹ Sanah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982. hlm. 134.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineke Cipta. hlm. 130

²¹ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research* Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981. hlm. 9.



c. Metode Interview

Wawancara (interview) adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab baik langsung atau tidak langsung sumber data.²²

Pada tehnik ini penulis akan mengadakan tanya jawab langsung kepada kepala sekolah dan Guru untuk memperoleh data-data SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan baik sejarah ataupun proses belajar mengajar yang dilakukan.

d. Metode Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menggali keterangan tertulis dari tempat penelitian yang digunakan sebagai data. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan, Struktur organisasi, daftar guru, dan lain-lain.

6. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisa data, pada dasarnya bersifat kualitatif yaitu menganalisa data yang bersifat non angka yang penyusunannya menggunakan prosedur induktif guna memperoleh pemahaman dan kesimpulan.

Kemudian untuk menganalisa data yang bersifat angka, sekaligus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokratisasi pendidikan di SMP N 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan, maka penulis menggunakan tabel distribusi frekuensi relatif, tabel ini dikatakan

²² Moh. Ali., *Strategi Penelitian Pendidikan*, Angkasa, Bandung, 1992. hlm. 64.

frekuensi relatif karena disini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk presentase.

Untuk analisa data kuantitatif digunakan tabel dari hasil penelitian dan disertai penafsiran agar lebih mudah menganalisa data dan menafsirkannya.

Penafsiran menggunakan pedoman yang dikemukakan oleh Maman Rachman dalam bukunya Strategi dan langkah-langkah penelitian, yaitu:

85 % > = : Sangat baik

70 % - 84 %: Baik

55 % -69 % : Cukup baik

40 % - 54 %: Kurang baik

< = 39 % : Tidak Baik²³

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten, maka perlu disusun sedemikian rupa sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh. Maka sistematika penulisan ini terdiri dari:

²³ Maman Rachman, *Strategi dan langkah-langkah penelitian*, CV.IKIP Semarang Press, Semarang, 1999.hlm.36.

1. Prelemanaris (bagian muka)

Meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman lampiran-lampiran.

2. Bagian Isi (bagian batang tubuh skripsi)

Di bagian ini meliputi beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam Bab I meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN

Dalam Bab II ini terdapat dua sub bab yaitu :

- a). Konsep Demokratisasi, meliputi Pengertian Demokratisasi, Landasan dan Dasar Demokratisasi, Asas Demokratisasi dan Penerapan Demokratisasi.
- b). Konsep Demokratisasi Pendidikan.

BAB III : IMPLEMENTASI DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM DI SMP NEGERI 02 KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

Dalam bab IV ini terdiri dari dua sub bab yaitu Analisis Konsep Demokratisasi Pendidikan Islam,

Implementasi Demokratisasi dalam pendidikan Islam di SMPN 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Dalam bab ini berisi tentang Analisis Penerapan Demokratisasi dalam pendidikan Islam di SMP N 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan + Faktor

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian akhir

Dalam bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran daftar riwayat pendidikan penulis.



BAB II

DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN

A. Konsep Demokratisasi

1. Pengertian Demokratisasi


Demokratisasi pendidikan merupakan proses pembelajaran seluruh civitas akademika untuk memajukan pendidikan. Kalau dalam politik ada rakyat, maka dalam pendidikan ada peserta didik. Pendidikan yang demokratis berarti melibatkan murid secara aktif dalam seluruh proses pendidikannya (*student centered, student active learning*).²⁴

Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen. Lebih jauh, demokratisasi adalah pembebasan manusia dari ketergantungan atas realitas objektif yang sering menghambat pengembangan diri.²⁵

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/ cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan

²⁴ Abdurrahman As segaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi Kasus dan Konsep*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), hlm. 141

²⁵ Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar ruzz media, 2008), hlm. 61



rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.²⁶

Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Inti demokrasi adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa demokrasi, kreativitas manusia tidak mungkin berkembang.²⁷ Secara historis, perjuangan melawan kolonialisme pun merupakan bagian dari perjuangan demokrasi.²⁸

Demokratisasi merupakan proses menjadi demokrasi. Ini berarti merupakan proses transformasi dari otoriterisme menuju kehidupan yang demokratis. Otoriterisme dapat didefinisikan sebagai yang tidak memiliki unsur pluralisme dan partisipasi yang berarti, sebagai sistem non demokratis.²⁹

Demokrasi yang ideal adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan keberbedaan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Demokrasi justru ada karena pengakuan terhadap pluralisme, terhadap pendapat yang berbeda, dan

²⁶ <http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/> 28 juni 2009

²⁷ H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.5

²⁸ Anders Uhlin, *Indonesia and the "Third Wave of Democratization": the Indonesian Pro democracy Movement in a Changing World*, (Great Britain: Curzon Press, 1997), hlm.3

²⁹ Cholisin dkk, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Yogyakarta: FISE UNY Press, 2007), hlm. 102



kesanggupan menyelesaikan konflik untuk tujuan bersama. Demokrasi adalah suatu pola hidup bersama dan akumulasi pengalaman-pengalaman yang terkomunikasikan bersama.³⁰

Istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan negara berada di tangan rakyat melalui undang-undang yang diputuskan rakyat, bukan oleh kekuasaan raja atau sultan. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif, sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.³¹

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.³²

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan di tangan rakyat. Lebih spesifik, demokrasi yaitu fungsi kekuasaan politik sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kepentingan rakyat. Adapun yang dimaksud demokratisasi adalah proses menuju demokrasi. Demokratisasi pendidikan mengandung arti, proses menuju demokrasi di bidang pendidikan. Indikator dari

³⁰ John Dewey, *Democracy and Education*, Chapter 7: dapat ditelusuri di http://www.ilt.columbia.edu/academic/texts/dewey/d_chapter7.html.

³¹ Dr. Dede Rosyada, MA, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 15-16

³² <http://Turwahyudin.wordpress.com/Pengertian-Demokrasi/> 13 April 2008.

demokrasi adalah terbuka, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, bebas tekanan atau paksaan, mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama.³³

Demokrasi ibarat sebuah spektrum, masing-masing dengan karakternya sendiri-sendiri. Ruang lingkup demokrasi juga bervariasi, dari area pemerintahan (politik) ke seluruh aspek kehidupan, termasuk wilayah sosial ekonomi. Demokrasi yang secara konvensional hanya sebatas persoalan sistem politik, kini pemaknaannya meluas, meliputi isu sosial ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan demokrasi agama.³⁴

Jadi menurut hemat penulis demokratisasi pendidikan adalah merupakan proses pembelajaran seluruh civitas akademika untuk memajukan pendidikan. Pendidikan yang demokratis berarti melibatkan murid secara aktif dalam seluruh proses pendidikannya. Indikator dari demokrasi adalah terbuka, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, bebas tekanan atau paksaan, mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama. Demokratisasi pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Dalam hal ini melalui upaya demokratisasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, cerdas, kritis, produktif dan berkualitas.

³³ <http://www.DemokratisasiPendidikan.Com/>20 Oktober 2009

³⁴ Kuntowijoyo, *Identitas politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.177



2. Landasan dan Dasar Demokratisasi

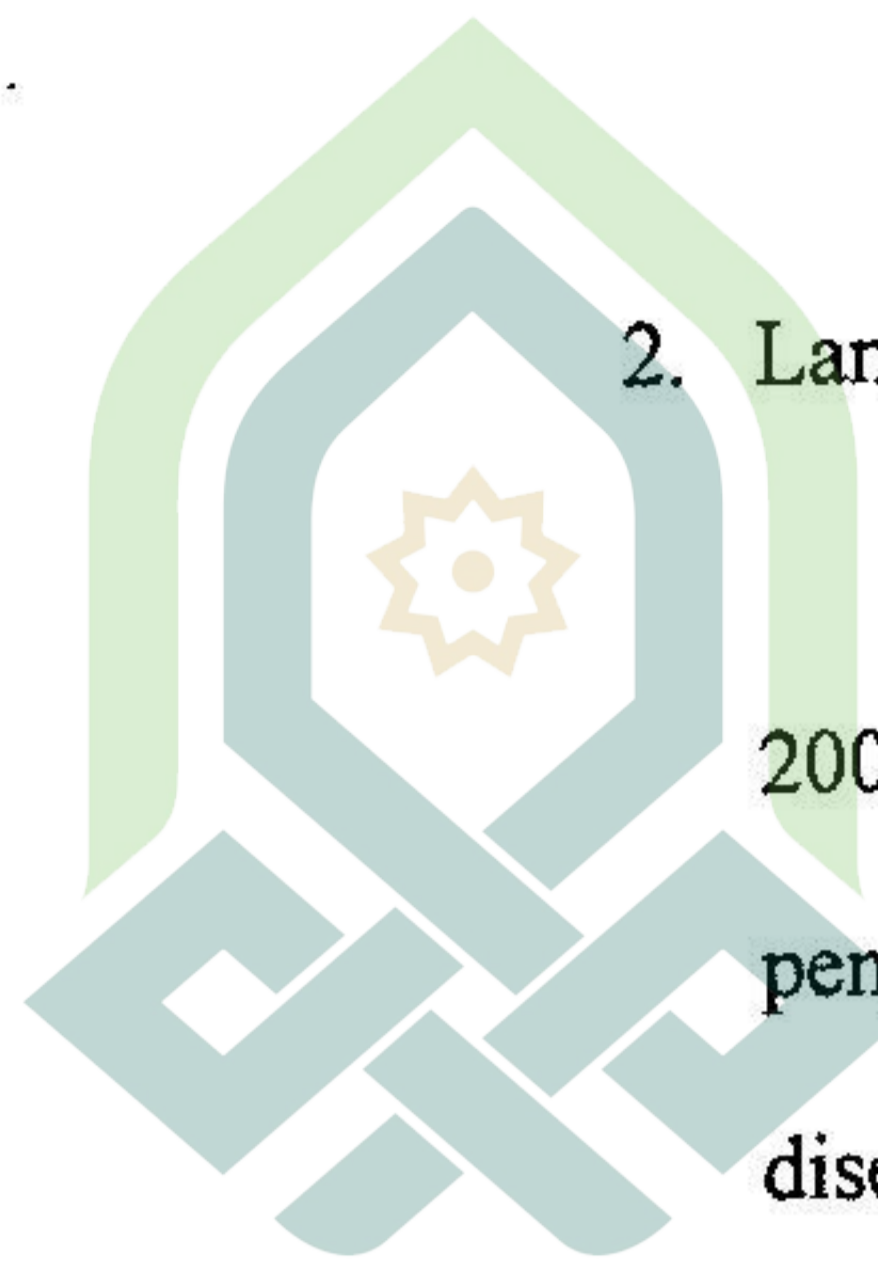
Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat (1) berbunyi: " Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".³⁵

Demokrasi ini dilandasi oleh kondisi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia agar diperlakukan dengan adil dan sama, dan kebutuhan untuk dilahirkan sebagai manusia bebas serta kebutuhan-kebutuhan lain yang dipercaya sebagai ciri manusia yang kodrati. Namun, kebutuhan-kebutuhan akan hal yang hakiki ini perlu ditumbuhkan dan dikembangkan, dan dalam menumbuhkan kebutuhan akan penghargaan atas hak-hak individu dan masyarakat ini diperlukan pendidikan: pendidikan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal. Apabila kebutuhan akan penghargaan terhadap martabat manusia yang hakiki ini tidak ditumbuh kembangkan, demokrasi dalam diri manusia akan menjadi tumpul dan tidak mustahil mati.³⁶

Demokrasi yang ideal adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan keberbedaan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Demokrasi justru ada karena pengakuan

³⁵ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

³⁶ Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi)*, (Yogyakarta:Penerbit Kanisius,2000), hlm.50



terhadap pluralisme, terhadap pendapat yang berbeda, dan kesanggupan menyelesaikan konflik untuk tujuan bersama. Demokrasi adalah suatu pola hidup bersama dan akumulasi pengalaman-pengalaman yang terkomunikasikan bersama.³⁷

Dalam bukunya Dede Rosyada menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri sistem demokrasi diantaranya:³⁸

- a) Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin
- b) Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah
- c) Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah
- d) Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik
- e) Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas
- f) Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi

³⁷ John Dewey, *Democracy and Education*, Chapter 7: dapat ditelusuri di http://www.ilt.columbia.edu/academic/texts/dewey/d_chapter7.html.

³⁸ Dr. Dede Rosyada, MA, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.16





harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia

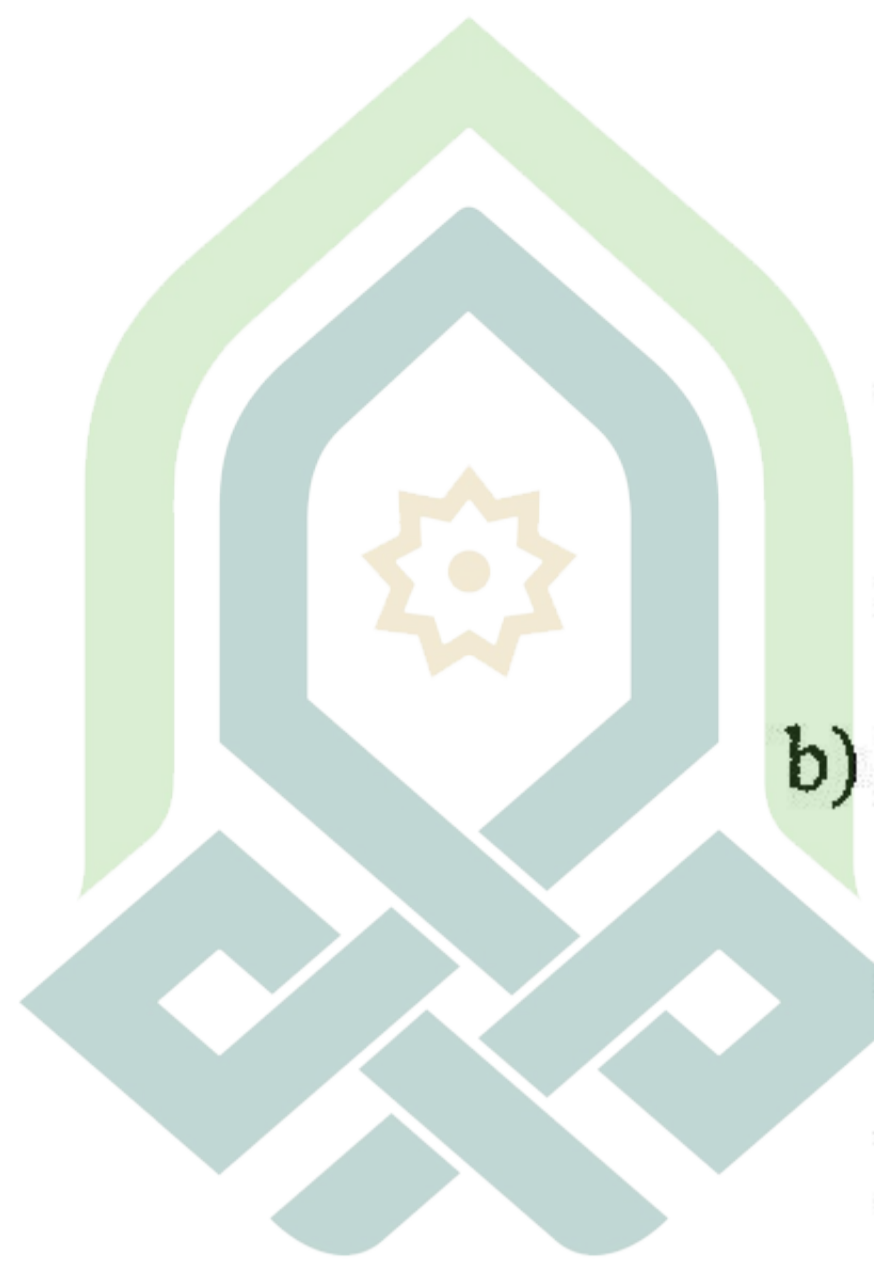
- g) Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokratis..

3. Nilai-nilai Demokratisasi

Berbagai keunggulan model sekolah demokratis sebagaimana dikemukakan oleh Dwight W. Allen ketika menjelaskan sekolah untuk abad mendatang ke-21, dalam kerangka penguatan model sekolah demokratis antara lain adalah:³⁹

- a) Akuntabilitas, yakni bahwa kebijakan-kebijakan sekolah dalam semua aspeknya dapat dipertanggungjawabkan pada publik, yang meliputi pengangkatan guru sesuai dengan kategori kebutuhan dan keahlian, yang kemudian teruji loyalitasnya terhadap proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Guru yang diangkat harus memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang akan diajarkannya, memiliki keterampilan mengajar yang memadai, serta memiliki loyalitas keguruan yang teruji. Kemudian manajemen sekolah juga dapat dipertanggungjawabkan pada publik, dapat meminimalisir bias individual dalam berbagai keputusan dan promosi seseorang benar-benar didasarkan pada keahlian dan pengalaman yang memadai. Dan dalam konteks akuntabilitas


³⁹ Dr. Dede Rosyada, MA, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.20-21



juga, sekolah demokratis selalu menjunjung tinggi *collective judgement*, yakni keputusan diambil bersama-sama.

- b) Pelaksanaan tugas guru senantiasa berorientasi pada siswa, guru akan memberikan pelayanan pada siswa secara individual. Berbagai kesulitan siswa akan menjadi perhatian guru, dan dengan senang hati guru akan terus membantu sehingga siswa dapat menyelesaikan berbagai kesulitannya
- c) Keterlibatan masyarakat dalam sekolah, yakni dalam sekolah demokratis, sistem pendidikan merupakan refleksi dari keinginan masyarakat. Masyarakat akan berpartisipasi dalam pendidikan, akan mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah, dan akan responsif dengan berbagai persoalan sekolah. Dengan demikian para guru bekerja juga akan merasa tenang karena senantiasa akan bersama-sama dengan masyarakatnya, keputusan pimpinan sekolah juga akan menjadi keputusan yang bulat, karena disepakati bersama oleh masyarakatnya, dan sekolah akan selalu terkontrol oleh mekanisme yang diatur dalam sistem penyelenggaraan sekolah tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Dr. Dede Rosyada, MA, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.21




Implementasi demokratisasi pendidikan menurut Paulo Freire setidaknya menghendaki tiga asas/ proses fundamental pendidikan. *Pertama*, kebebasan; *kedua*, pluralitas; dan *ketiga*, humanistik.⁴¹

Pertama, siswa sebagaimana manusia lain adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dalam aura kebebasan dan hidup untuk bebas. Guru atau lembaga pendidikan (sekolah) tidak dibenarkan sama sekali mengintervensi intelektualitas siswa serta mendominasi gagasan dan pikiran mereka. Pengarahan terhadap siswa agar mereka kreatif, diskutif, inovatif dan mandiri adalah hal terbaik yang harus dilakukan guru dalam proses demokratisasi pendidikan agar mereka menjadi siswa yang mampu menjadi dirinya sendiri dan mampu melihat realitas kehidupan. Ivan Illih dalam *Deschooling Society* menjelaskan, guru tidak dibenarkan sama sekali memosisikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan (*teacher oriented*) bagi siswa-siswanya.

Kedua, proses demokratisasi pendidikan mengharuskan adanya nuansa pluralisme. Makna pluralisme disini berarti wujud kesadaran untuk memahami perbedaan yang ada dalam lingkungan pendidikan, baik perbedaan kultur, kondisi sosial ekonomi, politik, etnis, wilayah, intelektualitas, dan lain sebagainya. Kesadaran pluralisme ditingkat mikro, yakni pembelajaran di sekolah (kelas)

⁴¹ Ahmad Ta'rifin-Yasin Abidin, *Demokratisasi dan Paradigma Baru Pendidikan (kapita selekta pendidikan umum dan Islam)*, (STAIN Pekalongan Press, 2007), hlm. 35-36



akan berimplikasi pada nilai-nilai perdamaian dan kebersamaan lingkungan akademik. Sekolah/ intitusi pendidikan diprediksi akan benar-benar menjadi lembaga yang mampu mengusung nilai-nilai intelektualisme dan demokratisasi pendidikan. Sementara itu, gagasan-gagasan pluralisme pendidikan di tingkat makro, akan berimplikasi pada keragaman kebijakan pendidikan.

Ketiga, implementasi pendidikan mengharuskan adanya nilai-nilai humanistik. Entitas humanisme pendidikan berarti proses pembelajaran diarahkan kepada upaya manusia agar menjadi individu yang merdeka. Hal ini akan tercapai melalui pendekatan pendidikan yang mementingkan pengembangan kreatifitas dalam kepribadian peserta didik. Pendidikan humanistik juga mengarahkan siswa agar mampu menjadi dirinya sendiri secara utuh, manusia paripurna. Pada tingkat lanjut, mengembangkan wacana-wacana humanisme dalam pendidikan dilakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial peserta didik.

Menurut penulis apabila nilai-nilai demokrasi pendidikan di atas berjalan dengan baik, maka demokratisasi pendidikan akan mampu menjadi basis utama pendidikan di era otonomi daerah. Selain dari hal tersebut penulis juga mengemukakan beberapa nilai demokrasi diantaranya, terbuka, rasional, menghargai pendapat, jujur, bebas tekanan atau paksaan, mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama.

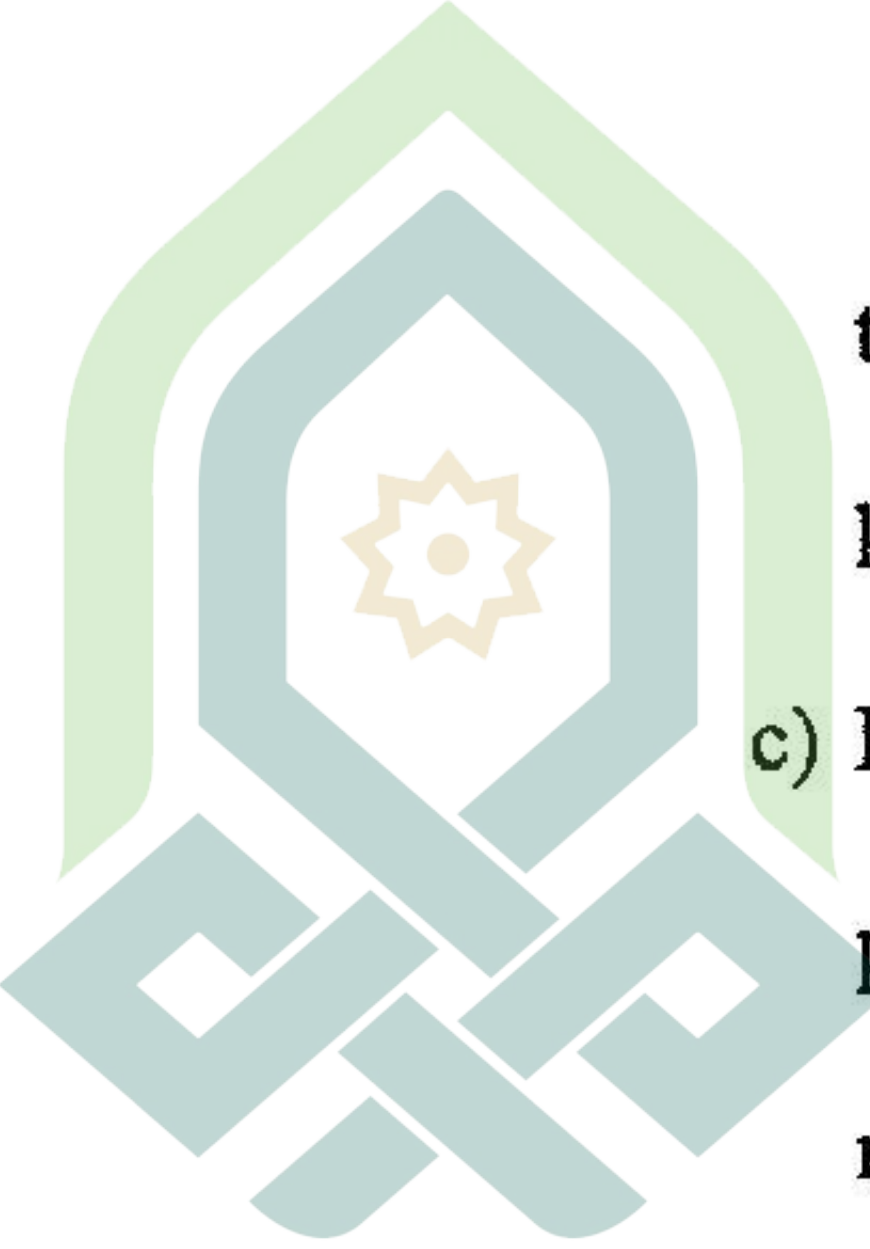


4. Penerapan Demokratisasi

Pengembangan sekolah menuju model sekolah demokratis ini relevan untuk dilakukan karena berbagai argumentasi, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tipologi sekolah abad ke-21 dan model pembelajaran yang sesuai. Dalam konteks pertama dijelaskan bahwa sekolah-sekolah sekarang harus dapat memenuhi beberapa kualifikasi ideal, yaitu:⁴²

- a) Pendidikan untuk semua, yakni semua siswa harus memperoleh perlakuan yang sama, memperoleh pelajaran sehingga memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan sesuai batas-batas kurikuler, serta memiliki basis *skill* dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka, serta sesuai pula dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Paradigma yang memisahkan pendidikan akademik sebagai calon untuk memasuki perguruan tinggi, dan pendidikan keterampilan untuk memasuki pasar tenaga kerja, sudah tidak relevan lagi, karena perubahan yang menuntut masyarakat untuk menjadi bagian dari kontribusi untuk kemajuan.
- b) Memberikan *skill* dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini, karena pasar menuntut setiap tenaga kerjanya memiliki keterampilan penggunaan alat-alat teknologi

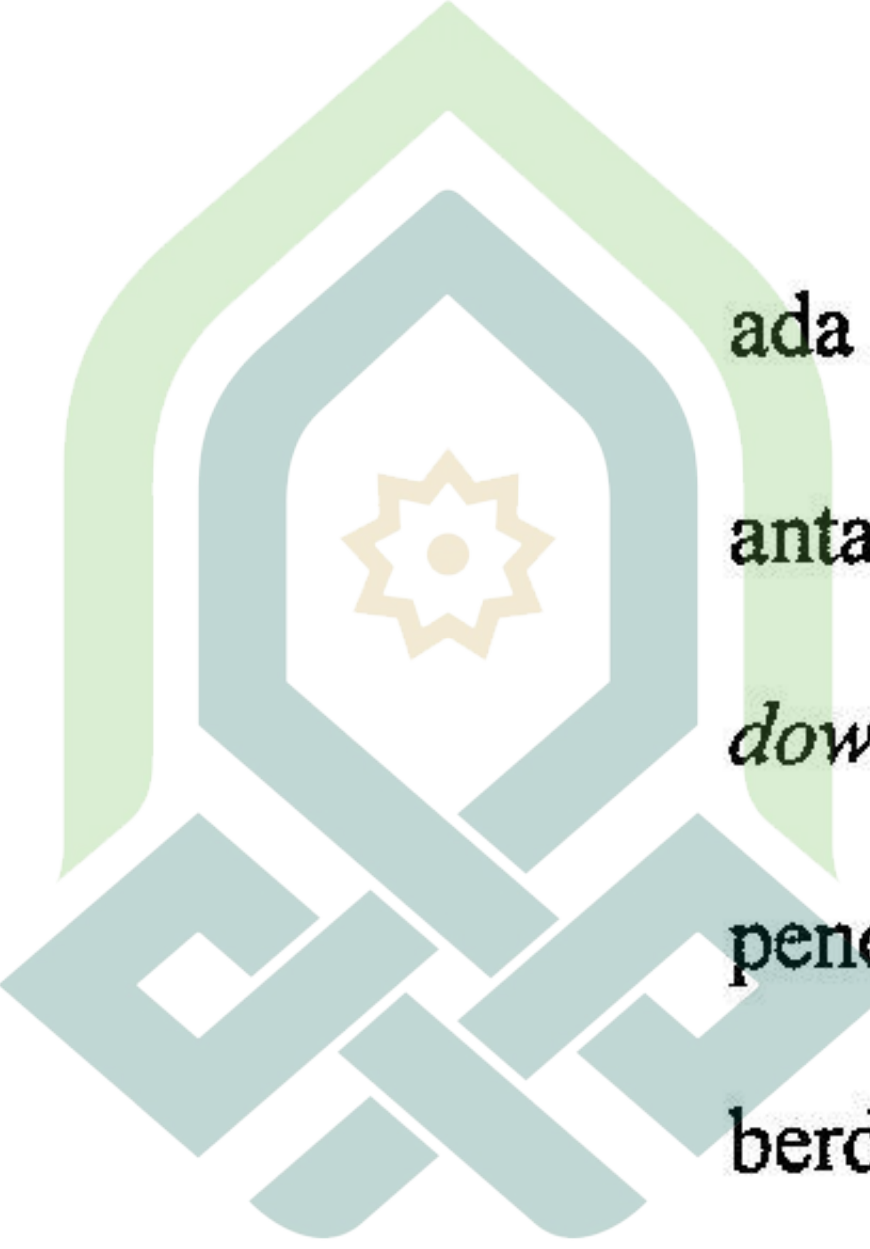
⁴² Dr. Dede Rosyada, MA, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.18-19



termodern, kemampuan komunikasi global, matematika serta kemampuan akses pada pengetahuan.

- c) Penekanan pada kerjasama, yakni menekankan pada pengalaman para siswa dalam melakukan kerjasama dengan yang lain, melalui penugasan-penugasan kelompok dalam proses pembelajaran, sehingga mereka memiliki pengalaman mengembangkan kerjasama, karena trend pasar ke depan adalah pengembangan kerjasama, baik antara perusahaan atau antara perusahaan dengan masyarakat dan yang lainnya, sehingga pengalaman mereka belajar akan sangat bermanfaat dalam artikulasi diri di lapangan profesi mereka.
- d) Pengembangan kecerdasan ganda, yakni bahwa para siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan *multiple intelligence* mereka, dengan memberi peluang untuk mengembangkan *skill* dan keterampilan yang beragam, sehingga mudah melakukan penyesuaian di pasar tenaga kerja.
- e) Integrasi program pendidikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat, agar mereka memiliki kepekaan sosial.

Selain dari lima hal di atas, ada hal penting lain yang harus kita perhatikan dalam menumbuhkan demokratisasi pendidikan, yaitu komunikasi. Demokratisasi pendidikan mensyaratkan adanya proses ke segala arah dan bukan hanya dan bukan hanya bersifat satu arah, yaitu dari pendidik ke anak didik (*top down*), melainkan juga



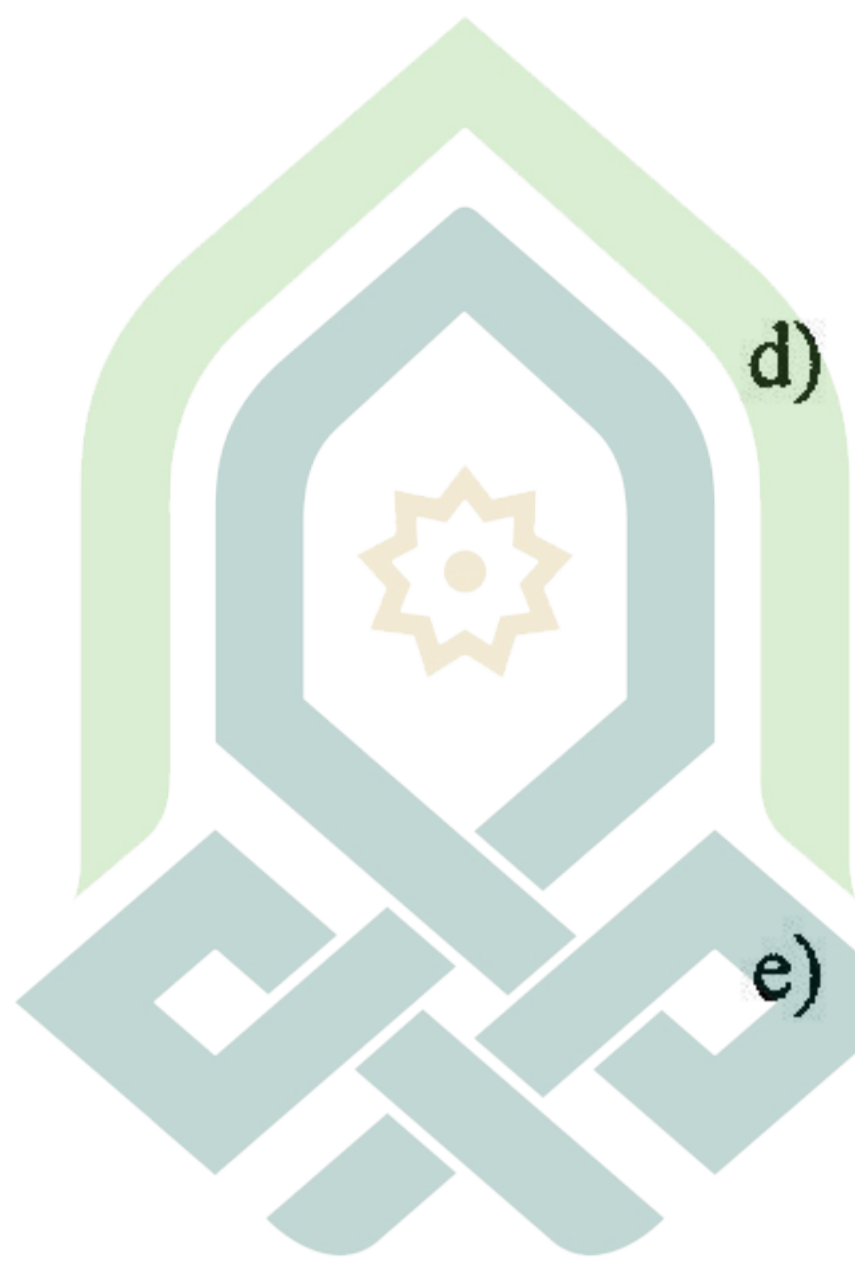
ada keseimbangannya, yaitu dari anak didik dengan pendidik dan antar anak didik sendiri (*network*). Dengan model komunikasi *top down*, akan timbul kecenderungan pendidik merasa capek, karena pendidik yang menjadi pusat. Dia harus berceramah, munulis, berdemonstrasi, dan seterusnya, sementara anak didik mungkin saja tidak mengerti, pasif, bosan, mengantuk dan yang lebih parah lagi, anak didik merasa tidak mendapatkan informasi baru.⁴³

Selanjutnya UNESCO menyatakan bahwa demokrasi ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a) Anggota suatu masyarakat menghormati hukum dan tatanan. Artinya, demokrasi menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Antara orang-orang yang diserahi untuk memimpin dan yang dipimpin harus ada saling percaya dan saling menghormati.
- b) Kebebasan yang disertai tanggung jawab, dalam kebebasan mengemukakan pendapat ada pengakuan akan hak-hak warga lain dan hak pribadi pihak lain.
- c) Persamaan dengan keyakinan akan martabat manusia serta pengakuan akan hak-hak orang lain, khususnya kelompok minoritas dan yang tertindas.

⁴³ Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar ruzz media, 2008), hlm. 62

⁴⁴ Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi)*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hlm. 50-51



- d) Disiplin diri sendiri yang diwujudkan dalam tata krama berinteraksi antar sesama, dan apabila ada konflik, penyelesaian diambil tanpa menggunakan kekerasan.
- e) Menjadi warga negara yang aktif dan bertanggungjawab meliputi kesiapan untuk menjadi sukarelawan, dan berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
- f) Keterbukaan akan kebenaran ilmiah dan kebenaran universal, dan kesediaan untuk berdialog, berkonsultasi serta bernegosiasi.
- g) Berpikir kritis dalam mencari kebenaran yaitu menggunakan pikiran yang kritis dan jernih, dan melakukan keputusan berdasarkan informasi yang cukup dan sah, bukan atas prasangka.
- h) Solidaritas menggarisbawahi kerja sama yang baik dalam tim, pengambilan keputusan bersama serta mencari penyelesaian masalah yang damai.

Pendidikan demokrasi tidak terjadi di perguruan tinggi saja, ia merupakan proses sepanjang hayat, bermula dari pendidikan keluarga, di dalam masyarakat, di sekolah dasar hingga sekolah menengah, diteguhkan di perguruan tinggi untuk dilanjutkan sebagai pola hidup dalam berkarya. Pendidikan demokrasi hanya berlangsung dengan lancar apabila kondisi lingkungan juga

demokratis. Artinya, orangtua, masyarakat, guru, karyawan, kepala sekolah juga memiliki pola hidup demokratis.⁴⁵

B. Konsep Demokratisasi Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam memang bukan sekadar diarahkan untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa, tetapi juga bagaimana berusaha mengembangkan manusia untuk menjadi imam atau pemimpin bagi orang yang beriman dan bertaqwa (*waj'alna li al muttaqina imama*). Untuk memenuhi standar ideal ini, perlu pengembangan pendidikan agama Islam yang berorientasi pada tujuan, objek dan subjek didik serta metodologi pengajaran yang digunakan.⁴⁶

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang demokratis semacam ini dalam proses keyakinannya, setiap komunitas pendidikan perlu memperhatikan konsep *unity in diversity*. Selain itu, juga harus disertai dengan sikap yang tidak saja mengandaikan suatu mekanisme berpikir terhadap agama yang tidak *monoinpretable*, atau menanamkan kesadaran bahwa keragaman dalam hidup sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi dan disikapi dengan kearifan, tetapi juga memerlukan kesadaran moralitas dan kebajikan. Tentu saja, penanaman konsep seperti ini dilakukan dengan tidak mempengaruhi kemurnian masing-

⁴⁵ Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi)*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hlm.51

⁴⁶ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Cet.2*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.78

masing agama yang diyakini kebenarannya oleh anak didik. Ini yang harus memperoleh penegasan agar tidak terjadi kesalahpahaman.


Secara lebih terperinci, ada beberapa aspek yang dapat dikembangkan dari konsep pendidikan Islam secara demokratis.⁴⁷

Pertama, pendidikan Islam demokratis adalah pendidikan yang menghargai dan merangkul segala bentuk keragaman. Dengan demikian diharapkan agar tumbuh kearifan dalam melihat segala bentuk keragaman yang ada.

Kedua, pendidikan Islam demokratis merupakan sebuah usaha sistematis untuk membangun pengertian, pemahaman, dan kesadaran anak didik terhadap realitas yang demokratis. Hal ini penting dilakukan, karena tanpa adanya usaha secara sistematis, realitas keragaman akan dipahami secara sporadis, fragmentaris, atau bahkan memunculkan eksklusivitas ekstrem.

Ketiga, pendidikan Islam demokratis tidak memaksa atau menolak anak didik karena persoalan identitas suku, agama, ras, atau golongan. Mereka yang berasal dari beragam perbedaan harus diposisikan secara setara, egaliter dan diberikan medium yang tepat untuk mengapresiasi karakteristik yang mereka miliki. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada yang lebih unggul antara satu anak didik dengan anak didik lain. Masing-masing memiliki posisi yang sama dan harus memperoleh perlakuan yang sama.

⁴⁷ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.79.



Keempat, pendidikan Islam demokratis memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya *sense of self* kepada setiap anak didik. Ini penting untuk membangun kepercayaan diri, terutama bagi anak didik yang berasal dari kalangan ekonomi kurang beruntung, atau kelompok yang relatif terisolasi.

Jika dilacak, pendidikan Islam demokratis terinspirasi oleh gagasan Islam transformatif. Islam transformatif berarti islam yang selalu berorientasi pada upaya untuk mewujudkan cita-cita Islam, yakni membentuk dan mengubah keadaan masyarakat kepada cita-cita Islam membawa rahmat bagi seluruh alam.⁴⁸

Dengan mengacu pada tujuan ini, pendidikan Islam demokratis bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat damai, toleran, dan saling menghargai dengan berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan.

Untuk mencapai tujuan yang mulia ini, pendidikan menjadi ujung tombaknya. Tugas pendidik adalah memilih metode dan strategi yang tepat dalam mengawetkan, memelihara dan melanggengkan, mengalihgenerasikan, serta mewariskan ilmu pengetahuan, kebenaran dan tradisi yang diyakini sekaligus juga menyadari sepenuhnya keberadaan tradisi lain. Tujuan pendidikan Islam demokratis bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman,

⁴⁸ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.79.

karena ini adalah sesuatu yang absurd dan agak mengkhianati tradisi suatu agama.

Apa yang dicari dalam paradigma pendidikan ini adalah mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh masing-masing agama. Setiap agama mempunyai sisi ideal secara filosofis dan teologis, dan inilah yang dibanggakan penganut agama, serta yang akan menjadikan mereka tetap bertahan, jika mereka mulai mencari dasar rasional atas keimanan mereka. Akan tetapi, agama juga mempunyai sisi riil, yaitu suatu agama menyejarah dengan keagungan atau kesalahan-kesalahan sejarah yang bisa dinilai dari sudut pandang sebagai sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, suatu dialog dalam pendidikan Islam demokratis harus selalu mengandalkan kerendahan hati untuk membandingkan konsep-konsep ideal yang dimiliki agama lain yang hendak dibandingkan. Jelasnya, landasan filosofis pelaksanaan pendidikan Islam demokratis di Indonesia harus didasarkan pada pemahaman adanya fenomena bahwa satu Tuhan, banyak agama, merupakan fakta dan realitas yang dihadapi manusia sekarang. Karena itu, manusia Indonesia sekarang harus didorong menuju kesadaran bahwa demokratis memang merupakan fitrah manusia. Selain itu juga, perlu didasarkan pada pemahaman dan pengertian bahwa manusia memang berbeda. Tetapi, mereka juga memiliki kesamaan-kesamaan. Dan setidaknya, dalam keadaan peradaban sekarang ini, persamaan-

peradaban sekarang ini, persamaan-persamaan mereka lebih penting ketimbang perbedaan-perbedaan diantara mereka.⁴⁹

Adapun metode yang dapat diterapkan dalam pendidikan demokratis cukup beragam. Tidak ada satupun metode yang paling sempurna. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya. Metode yang baik dalam sebuah pembelajaran idealnya bervariasi, baik antara teknik yang berpusat pada guru dengan teknik-teknik yang melibatkan siswa. Dengan demikian, diharapkan dalam diri siswa akan tumbuh dan berkembang sikap afeksinya.⁵⁰

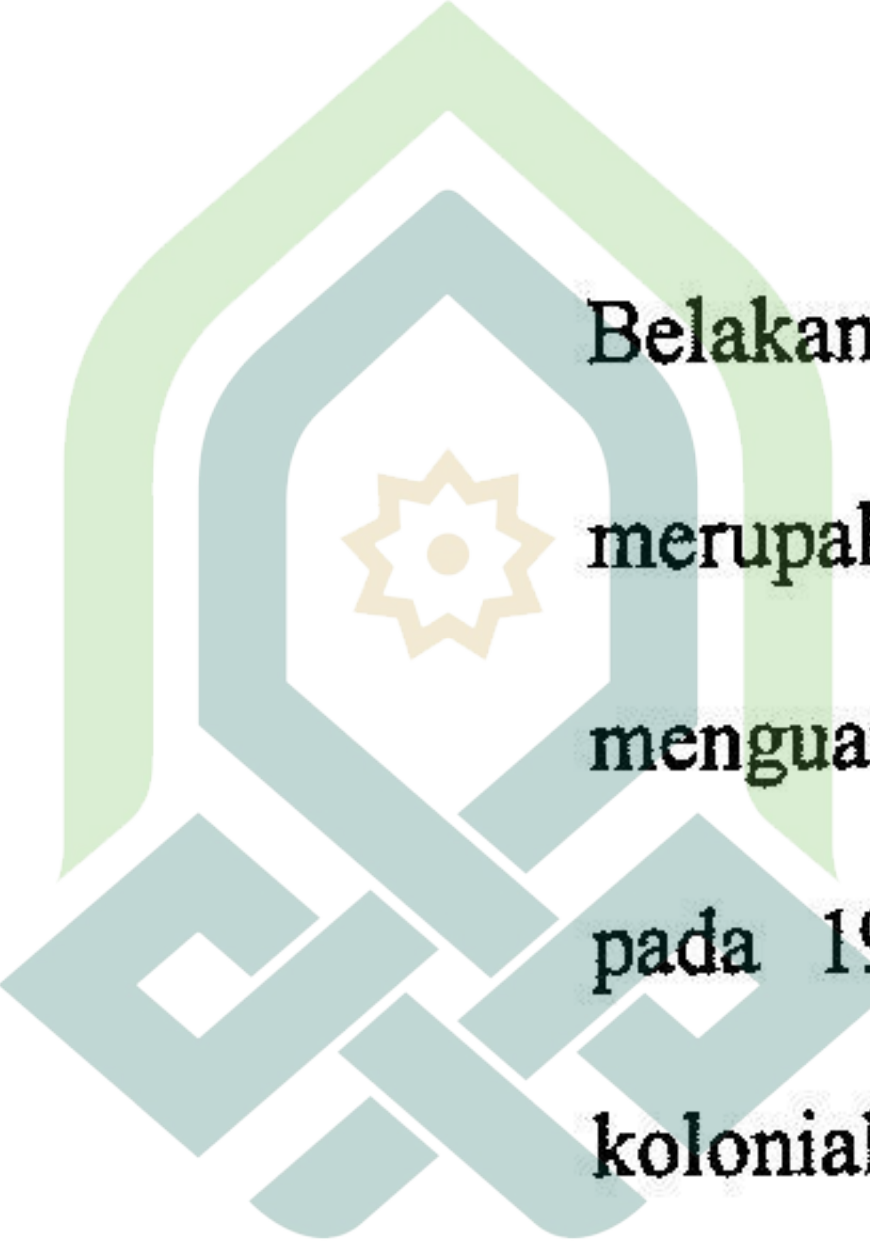
Demokrasi merupakan isu lain yang mempengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Inti demokrasi adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa demokrasi, kreativitas tidak mungkin berkembang.⁵¹ Secara historis, perjuangan melawan kolonialisme merupakan bagian dari perjuangan demokrasi.⁵² Ketidakadilan sistem kolonial telah melahirkan tidak hanya tuntutan kemerdekaan tetapi juga tuntutan bagi kebebasan individual. H.O.S. Tjokroaminoto, misalnya, mendesak didirikannya parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat yang didalamnya penuh dengan hak-hak legislatif, sementara pemerintah bertanggungjawab terhadap parlemen tersebut.

⁴⁹ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.94-95.

⁵⁰ Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar ruzz media, 2008), hlm.55-56

⁵¹ H.A.R.Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional:Kajian Pendidikan Masa Depan* (Bandung:Remaja Rosdakarya,1998), hlm.5

⁵² Anders Uhlin, *Indonesia and the "Third Wave of Democratization" the Indonesian Pro Democracy Movement in a Changing World* (Great Britain:Curzon Press,1997),hlm.31



Belakangan para tokoh nasionalis memandang bahwa demokrasi merupakan tujuan utama dari perjuangan anti kolonialisme. Gerakan ini menguat sejak 1920, dan aktivitas organisasi nasionalis berkembang pada 1930-an, meskipun saat itu mendapat tekanan dari penguasa kolonial. Akhirnya ketika pendudukan Jepang (1942-1945) terbuka jalan lapang menuju akhir perjuangan kemerdekaan.

Pasca kemerdekaan, kebangkitan gerakan pro-demokrasi di Indonesia muncul di akhir 1980-an. Dari segi asal usulnya, banyak dari aktivis gerakan pro-demokrasi di Indonesia tidak mengambil inspirasinya dari pemikiran liberal barat semata, melainkan juga dari *Marxism*, Al Quran, maupun dari nilai-nilai tradisional Indonesia. Karenanya, demokrasi berspektrum menurut karakternya masing-masing. Skope demokrasi disini bervariasi dari area pemerintahan (politik) ke seluruh aspek kehidupan, termasuk wilayah sosial-ekonomi. Itu sebabnya bicara soal demokrasi secara konvensional hanya dibatasi oleh sistem politik, padahal makna demokrasi lebih luas, meliputi isu sosial ekonomi, budaya, agama, bahkan dalam pendidikan.⁵³

Baik secara normatif maupun empiris, Islam bukanlah anti demokrasi. Secara normatif, Islam memang tidak menjelaskan bagaimana bentuk demokrasi yang dianut, namun ajaran Islam mengandung prinsip dan kaidah yang merupakan kata kunci dari isu

⁵³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung:Mizan,1997),hlm.107-

demokrasi.⁵⁴ Diantara kaidah demokrasi dimaksud adalah: *pertama*, kaidah *ta'aruf* (saling mengenal). Prinsip dasarnya diambil dari QS. al Hujurat ayat 13,

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."⁵⁵

Bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia, dan dalam keterkaitan itu terdapat salaiing memahami atau mengenal (*ta'aruf*), adalah sesuai dengan karakter manusia sebagai *homo-sosial*. Ta'aruf berjalan kalau ada *equality* (persamaan), *liberty* (kebebasan), komunikasi dialogis tanpa adanya dominasi satu kelompok atau kelompok yang lain, dan *ta'aruf* mempunyai asumsi negara hukum.

Kedua, kaidah *syura* (musyawarah). Banyak Al quran maupun Hadis yang memerintahkan untuk bermusyawarah, misalnya QS. ass Syuura ayat 38,

⁵⁴ Bahtiar Effendy, *Islam Demokrasi dan HAM*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm.29

⁵⁵ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo), hlm.847

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٤٦﴾

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”⁵⁶

Nabi s.a.w. pun sendiri menghargai musyawarah. Pada waktu perang uhud Beliau s.a.w. mengadakan musyawarah dengan kaum muslim untuk menentukan pilihan, apakah bertahan di dalam kota atau berperang ke luar kota. Hasilnya, suara mayoritas mengalahkan pendapat Nabi, agar bertempur di luar kota, dan Nabi pun mengalah dengan kehendak mayoritas tersebut. Musyawarah ini membutuhkan sikap *tasamuh* (toleran dan arif) antar pihak yang bermusyawarah. Dalam kesempatan lain Nabi s.a.w. bersabda: “Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah”. Islam juga menganjurkan orang untuk berani mengatakan yang benar, meskipun di depan penguasa yang dhalim. Amar ma’ruf nahi munkar merupakan upaya menegakkan yang benar ini, seraya mencegah yang batil. Menegakkan yang benar dan mencegah yang batil demikian tidak dapat dicapai kecuali dengan menegakkan demokrasi itu sendiri. Bagi umat Islam, musyawarah itu dilaksanakan tanpa melanggar hak Allah dan RasulNya. Apa yang sudah ditentukan

⁵⁶ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo), hlm.783

oleh Tuhan, mutlak harus berlaku dan tidak ada musyawarah. Tata cara shalat, puasa, haji dan lainnya merupakan ibadah makhdlah (ibadah murni) yang syarat dan rukunnya telah ditentukan oleh Allah melalui RasulNya, adalah hak Allah, tidak perlu dimusyawarahkan.

Ketiga, kaidah ta'awun (kerja sama). Dalam demokrasi ada kerja sama antar berbagai pihak. Kerja sama dalam pandangan Islam dilakukan berdasarkan *mutual cooperation*, disamping dalam rangka kebajikan dan taqwa, bukan perbuatan dosa dan permusuhan QS. al Maidah ayat 2 dijelaskan,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سَنَنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

*dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁵⁷

Dalam konteks nasional, ta'awun ini hanya dapat berjalan jika dualisme ekonomi, monopoli, ologopoli, nepotisme dan *ersatz capitalism* dihilangkan, lalu diganti dengan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan kolusi.

Keempat, masalah atau menguntungkan masyarakat. Kalau pelaksanaannya pemerintah, maka seluruh programnya mestilah ditujukan bagi kemakmuran masyarakat umum, mengikuti rumusan *the greatest happiness for the greatest number*. Aspirasi masyarakat menjadi penting untuk dipertimbangkan agar ditindaklanjuti. Mashlahah bagi masyarakat adalah mashlahah bagi negara, dan belum tentu sebaliknya.

Kelima, kaidah 'adil atau adil. Islam mengharuskan keadilan secara mutlak, (QS. an Nisaa' ayat 58 dan QS. al An'am ayat 152),

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

⁵⁷ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo), hlm.156

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (an Nisaa’ ayat 58).

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ^ط
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ^ط
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (al An’am ayat 152).⁵⁸

Nabi pun konsisten dengan sikap adil dalam melaksanakan hukum ini meskipun lingkungan keluarganya, andaikan putri Muhammad mencuri, tentulah pula aku potong tangannya. Perlakuan adil terhadap sesama adalah prinsip yang dibangun Islam, dan itu merupakan pilar demokrasi.

Keenam, kaidah *taghyir* atau perubahan. Bahwa demokrasi adalah bersumber dari rakyat, sementara rakyat itu sendiri berkembang, berbeda, juga berubah. Maka demokrasi itupun mengikuti perubahan, dinamis. Masyarakat *status quo* adalah statis, demokrasinya mati. Dalam

⁵⁸ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo), hlm.128

wawasan Islam, masyarakat itulah yang harus melakukan perubahan


(QS. ar Ra'ad ayat 11),

لَهُدٍ مُّعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُدٍ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”⁵⁹

Secara empiris, masa nabi Muhammad s.a.w. bisa dijadikan bukti berkembangnya demokrasi di kalangan umat Islam. Dalam banyak kasus nabi Muhammad s.a.w. lebih mengutamakan perdamaian daripada perang. Ketika perang badar usai, umat islam dikaruniai kemenangan, sejumlah tawanan tidak dibunuh melainkan ditebus dengan mengajar baca tulis pada kaum *illiterate*. Peristiwa penaklukan mekkah (*fathu al makkah*), semula ditakuti oleh penghuninya sebagai balas dendam dan pemusnahan, tapi apa yang dilakukan nabi s.a.w. justru sebaliknya, memberi rasa aman kepada pihak yang semula memusuhi Nabi s.a.w. perjanjian Madinah (*mitsaq al Madinah*) dapat dianggap sebagai ekspresi perundang-undangan demokratis yang disusun berdasarkan

⁵⁹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo), hlm.370



kaidah-kaidah di atas. Bahwa dalam lintasan sejarahnya, umat Islam memiliki serangkaian konflik, perang dan penaklukan, tidak bisa diartikan sepihak, tetapi haruslah adil, sebab jalan damai telah ditempuh baik sebelum maupun sesudah peristiwa tersebut.

Meskipun peristiwa sepeninggal Beliau s.a.w. terjadi banyak konflik politik ideologis yang berakibat munculnya berbagai bentuk negara yang tidak memberi ruang gerak bagi partisipasi rakyat., tidak bisa dipahami bahwa Islam itu identik dengan anti demokrasi. Karena disisi lain, gerakan demokratisasi disuarakan secara vokal. Gerakan ke arah demokratisasi di segala bidang oleh umat Islam ini tidak boleh dikesampingkan hanya karena bentuk kenegaraan atau kasus tertentu di kalangan umat Islam yang tidak demokratis. Ambil contoh, perjuangan politik SI, gerakan berbagai Ormas Islam semisal Muhammadiyah, NU, dan lainnya, di bidang ekonomi, sosial, dakwah dan pendidikan, semuanya merupakan fakta empiris upaya demokratisasi menurut bidangnya. Lemahnya kehidupan demokrasi di dunia Islam lebih didasarkan oleh argumen di luar doktrin agama Islam.⁶⁰

⁶⁰ Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar ruzz media, 2008), hlm.86-88



BAB III

IMPLEMENTASI DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM DI SMP NEGERI 02 KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum SMPN 02 Kesesi

a. Sejarah SMPN 02 Kesesi

SMP Negeri 02 Kesesi berdiri pada tahun 1990. Berdiri diatas tanah seluas 12.460 m² yang terletak di Jalan Karyomukti Kesesi, Kelurahan Mukten, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu sekolah yang memiliki letak strategis di tengah Kecamatan Kesesi.⁵⁶

SMP Negeri 02 Kesesi ditahun pertama masih menginduk dengan SMP Negeri 01 Kesesi. Kemudian mulai operasional tahun 1991 hanya memiliki sarana dan prasarana, para pengajar, tenaga administrasi dan siswa yang sedikit namun dengan berjalannya waktu kini SMP Negeri 02 Kesesi telah tumbuh menjadi Sekolah yang besar dan terus berkembang. Sampai saat ini telah memiliki alumni sebanyak kurang lebih 4200 siswa, dengan 17 rombongan belajar, yang saat ini dimiliki, telah meraih berbagai prestasi akademik maupun non akademik.

Dengan didukung guru-guru dan tenaga administrasi yang profesional dan ahli dibidangnya siap menuntaskan program

⁵⁶ Diambil dari data SMP N 2 Kesesi pada tanggal 18 Maret 2010

pendidikan dasar 9 tahun , dan siap mengantarkan siswa pada life skill dan pembelajaran kontekstual , yang siap terjun di masyarakat.

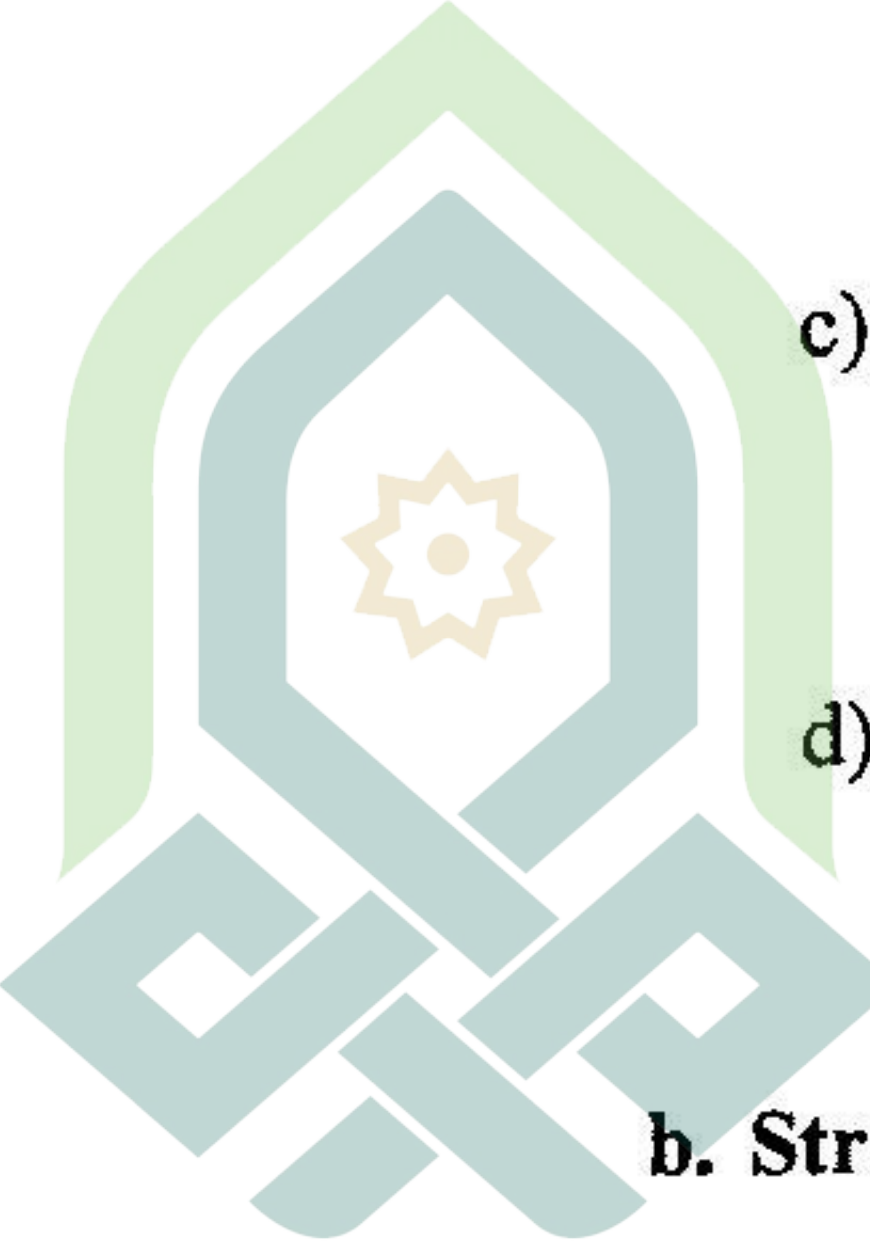
SMP Negeri 02 Kesesi terus berupaya meningkatkan mutu antara lain melalui peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan edukatif maupun administratif, penyediaan kelengkapan buku pembelajaran, peningkatan layanan dan manajemen sekolah serta penambahan dan perbaikan sarana prasarana sekolah penunjang pendidikan sesuai standar pelayanan mutu.

Dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di SMP Negeri 02 Kesesi, kami juga terus mengoptimalkan seluruh komponen sekolah, meningkatkan peran seluruh stakeholder serta menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak terkait agar tercapai standar prestasi dan layanan pendidikan yang bermutu.⁵⁷

Adapun SMP Negeri 02 Kesesi mempunyai visi “Utama dalam budi pekerti, maju dalam ilmu dan kerti”. Dan dari visi tersebut lahir misi sebagai berikut:

- a) Membekali anak dengan budi pekerti yang baik.
- b) Menanamkan rasa disiplin, ketaatan dan bertanggung jawab dalam segala aspek.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Caryali (*Staf TU SMPN 02 Kesesi*) pada tanggal 18 Maret 2010



c) Membekali ilmu dan keterampilan sebagai bekal dasar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat.

d) Membekali ilmu dan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Struktur Organisasi

Pada dasarnya setiap kegiatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keadaan manusia sebagai makhluk sosial, manusia digariskan dalam kehidupannya untuk berkumpul, berkelompok, dan bersama-sama di dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam hal ini mereka membutuhkan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Tujuan organisasi adalah memberikan tugas yang terpisah dan berbeda kepada masing-masing personil yang menjamin tugas-tugas tersebut terorganisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

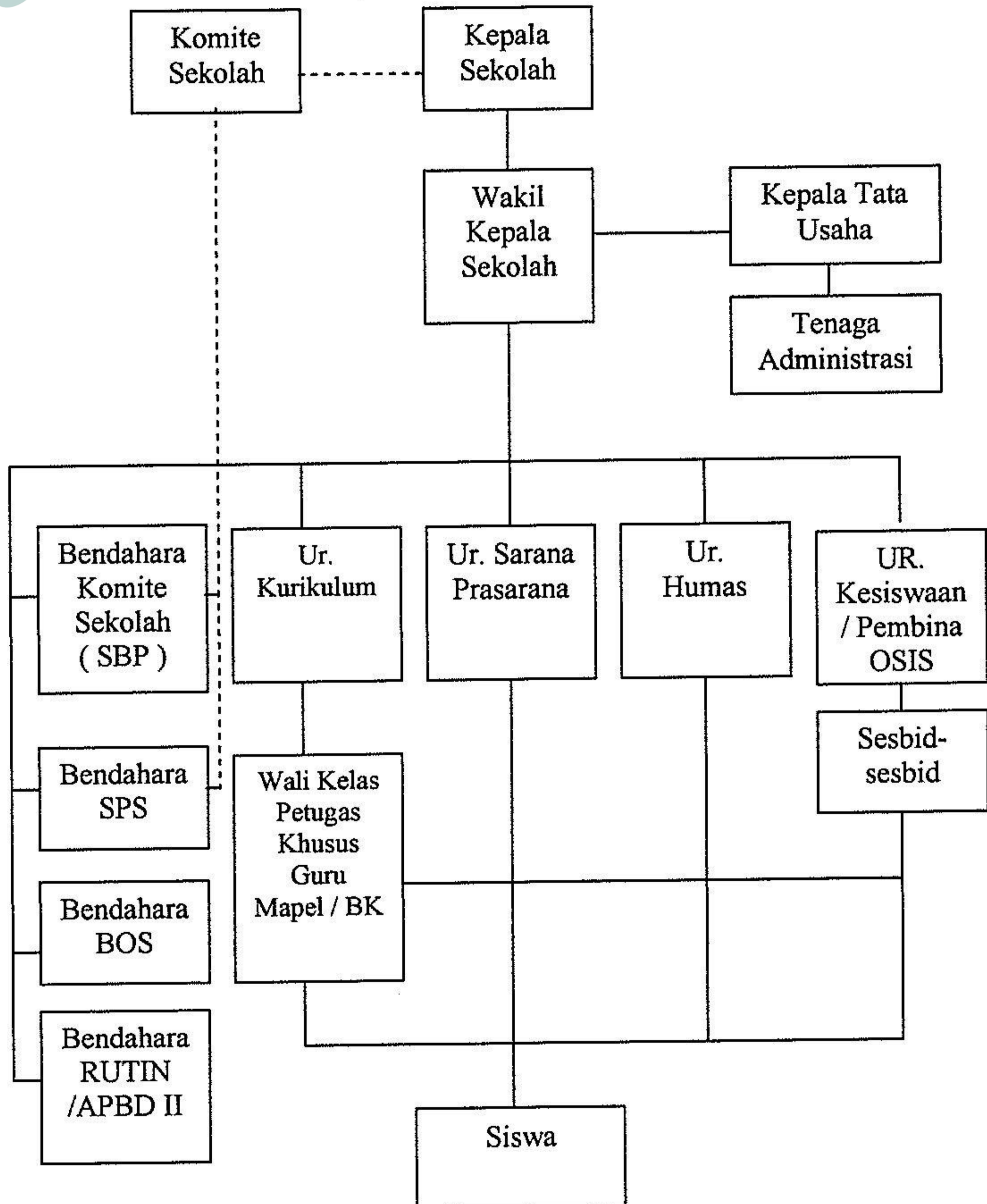
Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai pola hubungan yang mapan di antara komponen-komponen atau bagian-bagian dari organisasi itu sendiri. Jadi, Struktur Organisasi dapat didefinisikan sebagai penggambaran kerangka dari susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi, maupun orang yang mewujudkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Sedang struktur organisasi yang digunakan SMP Negeri

02 Kesesi menggunakan struktur organisasi berbentuk garis (lini).

1. Struktur Organisasi SMP Negeri 02 Kesesi secara menyeluruh seperti terlihat dalam gambar.⁵⁸

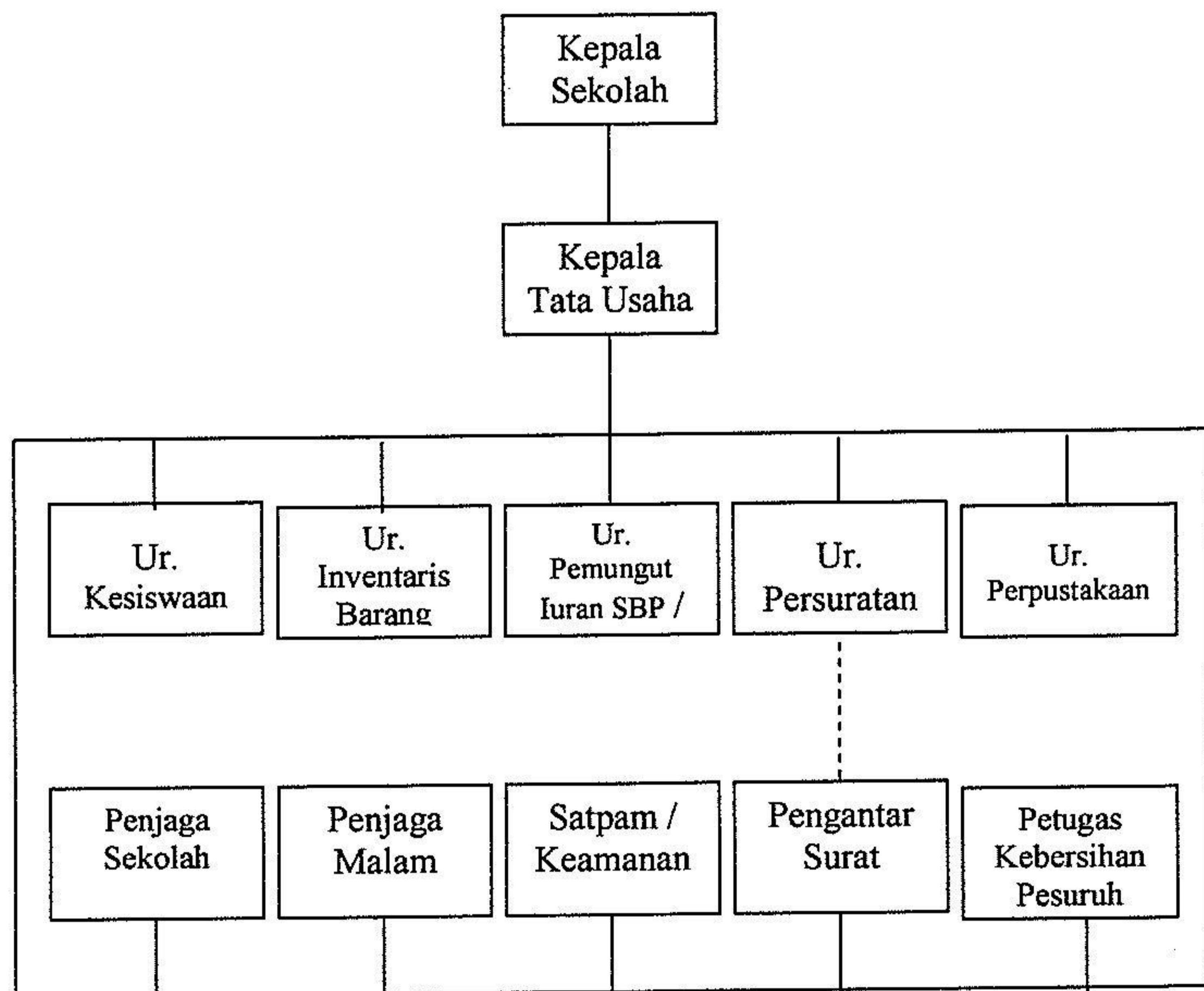
STRUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 02 KESESI



⁵⁸ Diambil berdasarkan data statistik SMP N 2 Kesesi pada tanggal 23 Maret 2010

2. Struktur Organisasi khusus tenaga administrasi SMP Negeri 02 Kesesi seperti terlihat dalam gambar.

STRUKTUR TENAGA ADMINISTRASI
SMP NEGERI 02 KESESI



c. Keadaan Anak


Jumlah siswa-siswi SMP Negeri 02 Kesesi adalah 619 anak, dengan rincian kelas VII (tujuh) berjumlah 194 anak, kelas VIII (delapan) berjumlah 221 anak dan kelas IX (sembilan) berjumlah 204 anak. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.⁵⁹

Tabel I

Daftar keadaan siswa-siswi SMP Negeri 02 Kesesi

No.	Kelas	Putra	Putri	Jumlah	Keterangan	
1	VII	A	14	17	31	-
2		B	17	16	33	-
3		C	17	16	33	-
4		D	17	16	33	-
5		E	16	16	32	-
6		F	14	18	32	-
Jumlah		95	99	194	-	
7	VIII	A	13	23	36	-
8		B	19	17	36	-
9		C	18	21	39	-
10		D	19	16	35	-
11		E	18	20	38	-
12		F	22	15	37	-
Jumlah		109	112	221	-	

⁵⁹ Diambil dari data SMP N 2 Kesesi pada tanggal 23 maret 2010



13	IX	A	22	20	42	-
14		B	16	24	40	-
15		C	16	24	40	-
16		D	20	22	42	-
17		E	15	25	40	-
Jumlah			89	115	204	-
Jumlah keseluruhan			293	326	619	-

d. Sarana dan Fasilitas di SMPN 02 Kesesi

Fasilitas sekolah merupakan faktor yang teramat penting dalam menunjang proses belajar mengajar dalam rangka pemberian bekal kepada siswa. Diharapkan dengan dukungan fasilitas yang cukup siswa mampu mengaplikasikan ilmunya dengan baik.

Fungsi fasilitas adalah untuk menunjang dan menggalakan kegiatan program pusat sumber belajar agar semua kegiatan tersebut dalam berjalan dengan efisien. dengan fasilitas yang baik, sumber-sumber belajar seolah-olah memiliki kekuatan, semua peralatan dapat berdaya guna dan siswa semakin rajin serta akan tekun belajar dengan fasilitas yang ada.⁶⁰

Proses belajar mengajar akan semakin sukses, bila ditunjang dengan sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga dalam hal ini SMP Negeri 02 Kesesi selalu berupaya

⁶⁰ <http://etd.eprints.ums.ac.id>. Pada tanggal 24 Maret 2010

untuk terus menerus melengkapi sarana dan fasilitas pendidikan yang ada.

Sarana dan fasilitas tidak akan dapat berperan secara produktif, tanpa dibarengi adanya usaha administrasi yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 02 Kesesi. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas pendidikan menempatkan diri sebagai satu aspek penting dalam administrasi SMP Negeri 02 Kesesi. Adapun sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh SMP Negeri 02 Kesesi adalah sebagai berikut :⁶¹

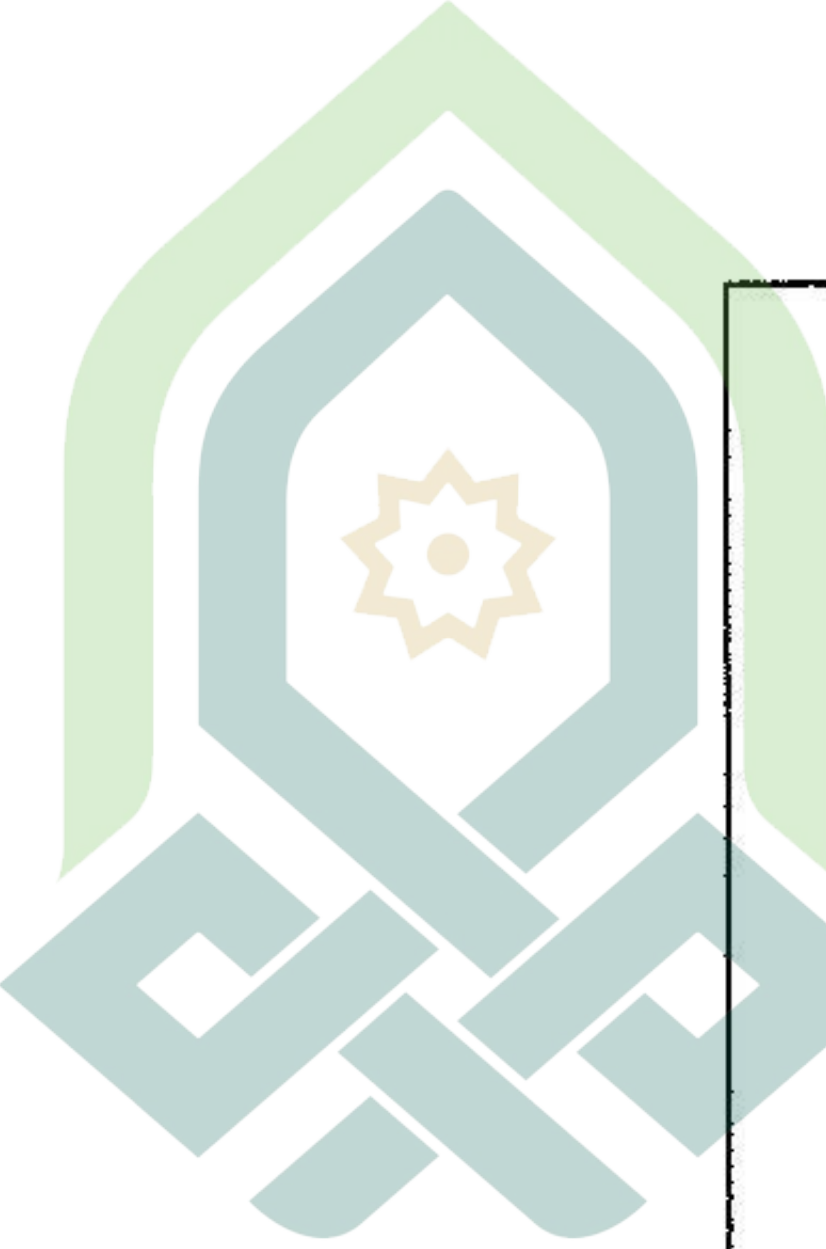
Tabel II

Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh SMP Negeri 02 Kesesi

No	Jenis sarana/ Fasilitas	Jumah
1	Ruang Kepala	1
2	Ruang Guru	1
3	Ruang TU	1
4	Ruang Kelas	17
5	Perpustakaan	1
6	Laboratorium Komputer	1
7	Laboratorium IPA	1
8	Musholla	1
9	Ruang BP/ BK	1
10	Ruang Kesenian	1

⁶¹ Observasi di SMP Negeri 02 Kesesi pada tanggal 22 Maret 2010





11	Ruang Serbaguna	1
12	Ruang Koperasi	1
13	UKS	1
14	Toilet	7
15	Kantin	5
16	Lapangan	1
17	Gudang	2

B. Pelaksanaan Demokratisasi Pendidikan Islam di SMPN 02 Kesesi

Kabupaten Pekalongan

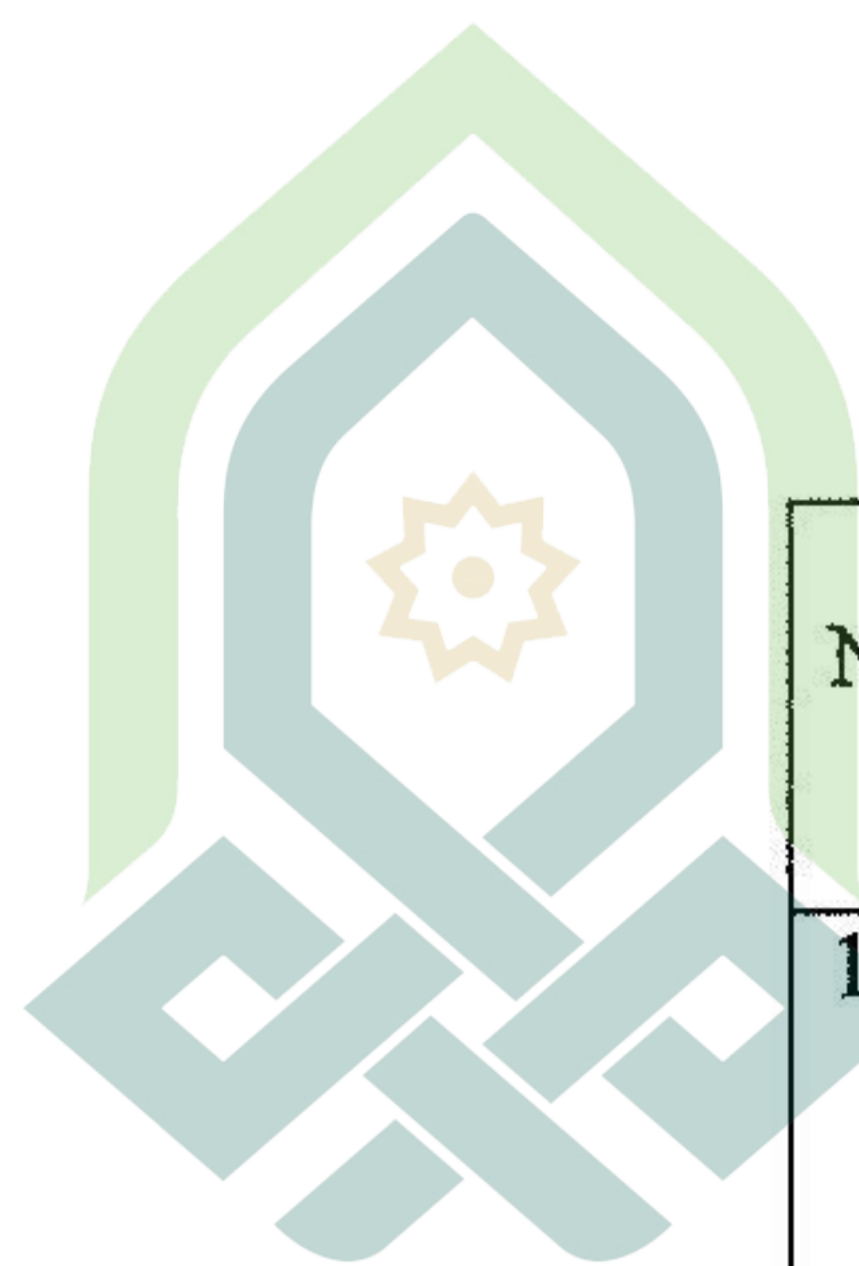
1. Muatan Kurikulum serta Beban Belajar

Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi yang diterapkan di SMP N 2 Kesesi kabupaten Pekalongan, terdiri atas kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- a. Kelompok mata pelajaran agama
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Kelompok mata pelajaran estetika
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Adapun Cakupan tiap kelompok mata pelajaran disajikan diantaranya sebagai berikut :

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
1.	Agama dan Akhlak Mulia	<p>Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.</p>
2.	Kewarganegaraan dan Kepribadian	<p>Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak. Dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.</p> <p>Kesadaran dan wawasan meliputi wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela Negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia,</p>



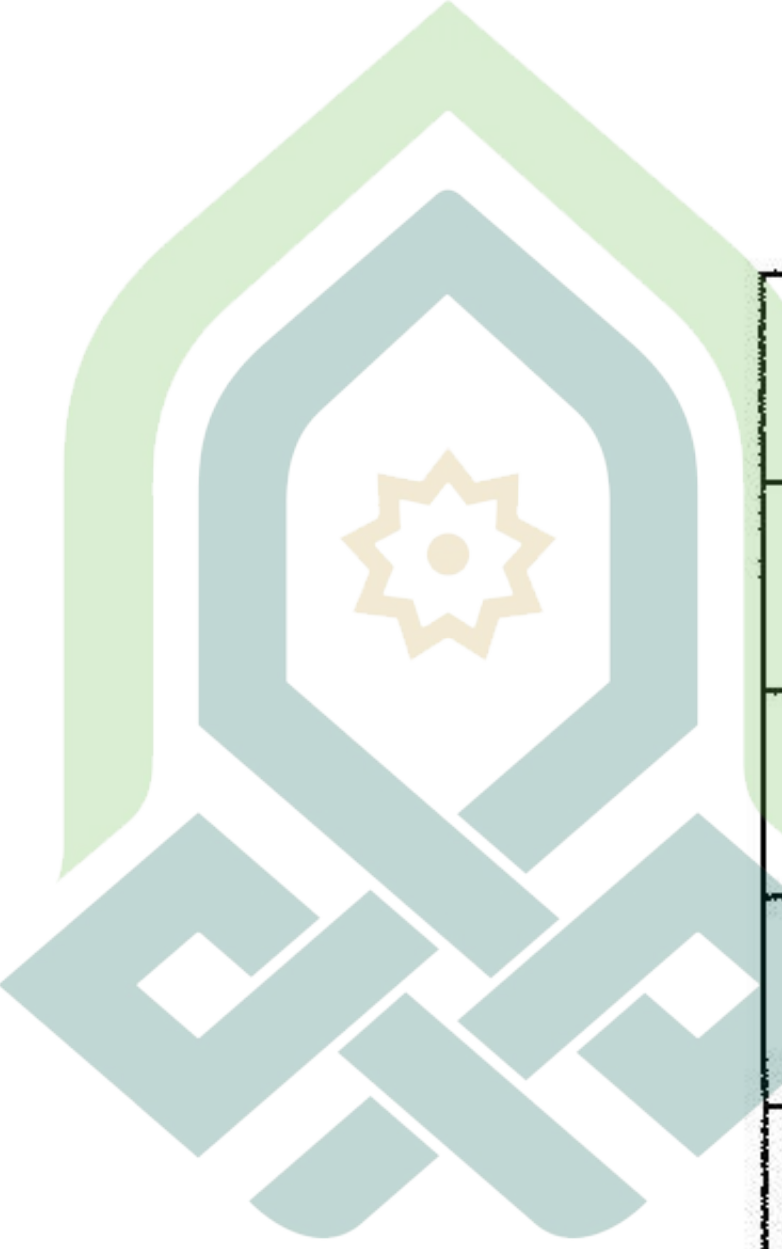


		kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan jender, demokrasi, tanggung jawab social, ketaatan pada hukum, membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada Sekolah dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir kritis, kreatif dan mandiri.
4.	Estetika	Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresi dan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresi ini mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individual maupun kehidupan bermasyarakat sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, hingga mampu menciptakan kebersamaan yang

		harmonis.
5.	Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Budaya hidup sehat meliputi kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat secara individual maupun kolektif kemasyarakatan, seperti bebas dari perilaku seks bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

2. Struktur Kurikulum SMP Negeri 2 Kesesi kabupaten Pekalongan

Komponen	Kelas dan alokasi waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	*4	*4	*5
4. Bahasa Inggris	5	4	4
Komponen	Kelas dan alokasi waktu		



	VII	VIII	IX
5. Matematika	*5	*5	*4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	5	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	5
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan	2	2	2
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B. Muatan Lokal			
1. Bahasa Jawa	2	2	2
2. Keterampilan Elektro / Boga	2	2	2
C. Pengembangan diri	2*)	2*)	2*)
Jumlah	36	36	36

*) Ekuivalen 2 jam pelajaran

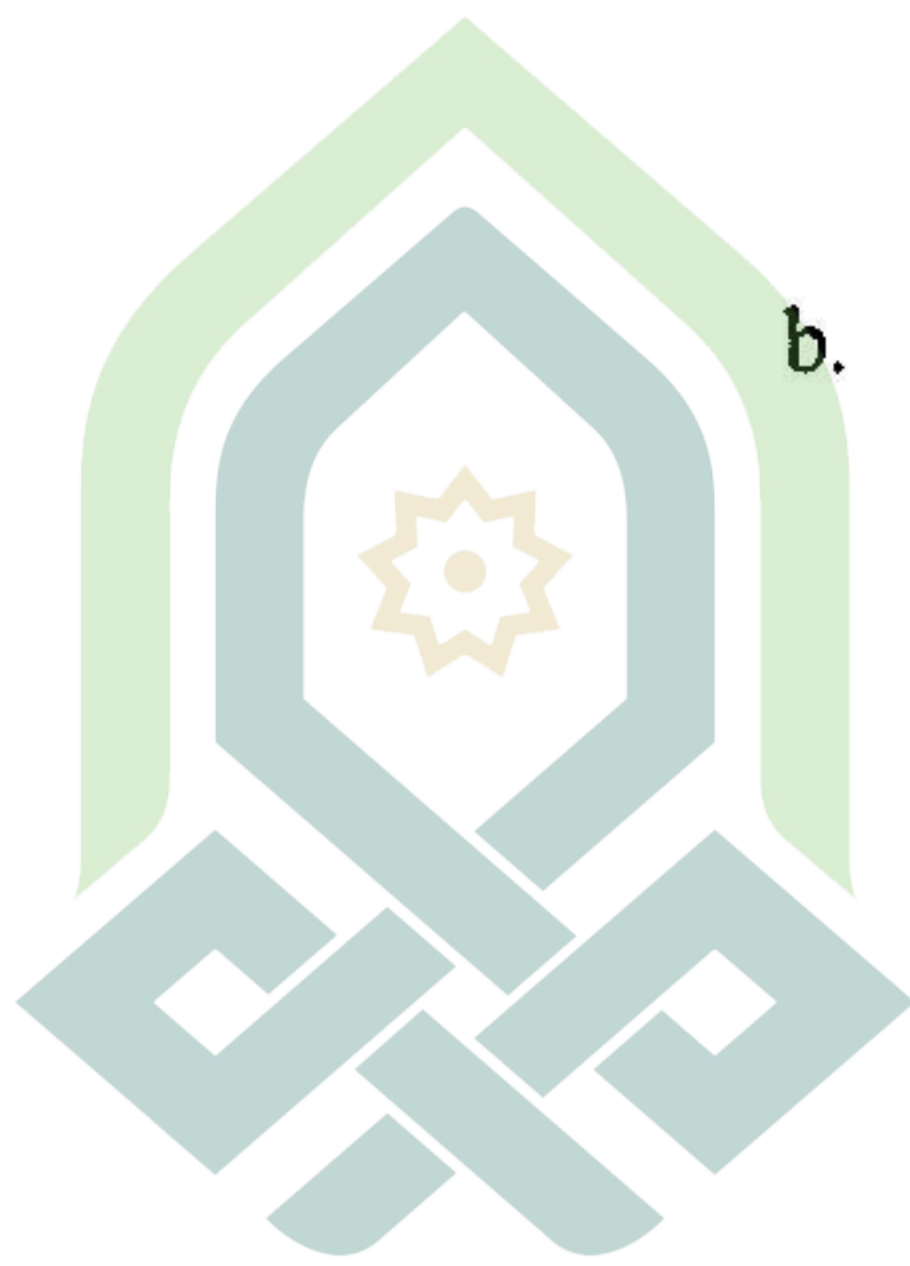
* Penambahan 1 atau 2 jam pelajaran

3. Pengembangan Diri

Program pengembangan diri di SMP Negeri 2 Kesesi meliputi :

a. Pengembangan diri spontan meliputi :

- (1) Pembudayaan 4 S yaitu senyum, salam, sapa dan sayang
- (2) Pembiasaan mengucapkan terima kasih
- (3) Pembiasaan membuang sampah pada tempatnya
- (4) Pembiasaan budaya hidup bersih dan sehat



b. Pengembangan diri rutin meliputi :

- (1) Mempelajari baca tulis Al quran (BTQ) pada jam 06.30 – 07.00.
- (2) Upacara hari Senin dan hari besar
- (3) Berdoa setiap awal dan akhir pelajaran
- (4) Tadarus al Quran (1) atau (2) surat setelah berdoa awal pelajaran dari jam 07.00 – 07.10
- (5) Jalan sehat setiap hari jumat minggu terakhir
- (6) Pembinaan siswa setiap jumat minggu pertama dan ketiga
- (7) K3 dengan sasaran masing-masing kelas dan lingkungannya, setiap Jumat minggu kedua dan setiap harinya oleh petugas piket kelas.
- (8) Pelaksanaan Sholat Dhuha
- (9) Jamaah sholat Dhuhur

c. Pengembangan diri terprogram meliputi ;

- (1) Keterampilan computer (TIK)
- (2) Olahraga prestasi (bola basket, bola voli, tenis meja)
- (3) Kesenian (seni tari, drum band, seni musik band)
- (4) *English for communication*
- (5) Pramuka
- (6) Olimpiade MIPA
- (7) Mading dan Bulletin sekolah

4. Regulasi Sekolah

a. Pengaturan beban belajar

- 1) Satu jam kegiatan pembelajaran tatap muka selama 40 menit
- 2) Jumlah jam pelajaran per minggu : 36 jam pelajaran.
- 3) Minggu efektif satu tahun pelajaran sebanyak : 38 minggu.
- 4) Tugas di luar jam tatap muka maksimal 30 % dari beban belajar.

Beban Belajar kegiatan tatap muka sebagai berikut ;


Satuan Pendidikan	Kelas	Satu jam pembelajaran Tatap muka (menit)	Jumlah jam pembelajaran Per Minggu	Minggu efektif per tahun	Waktu pembelajaran per tahun (menit)	Jumlah jam per tahun
SMP	VII s.d. IX	40	36	38	46080	768

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri

tidak terstruktur : $20 \times 32 \times 36 = 23040$ menit (384 jam).

b. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan belajar merupakan kegiatan aktif siswa untuk membangun makna atau pemahaman terhadap suatu objek atau peristiwa. Sedangkan mengajar merupakan upaya menciptakan suasana yang mendorong inisiatif, motivasi, dan tanggung jawab



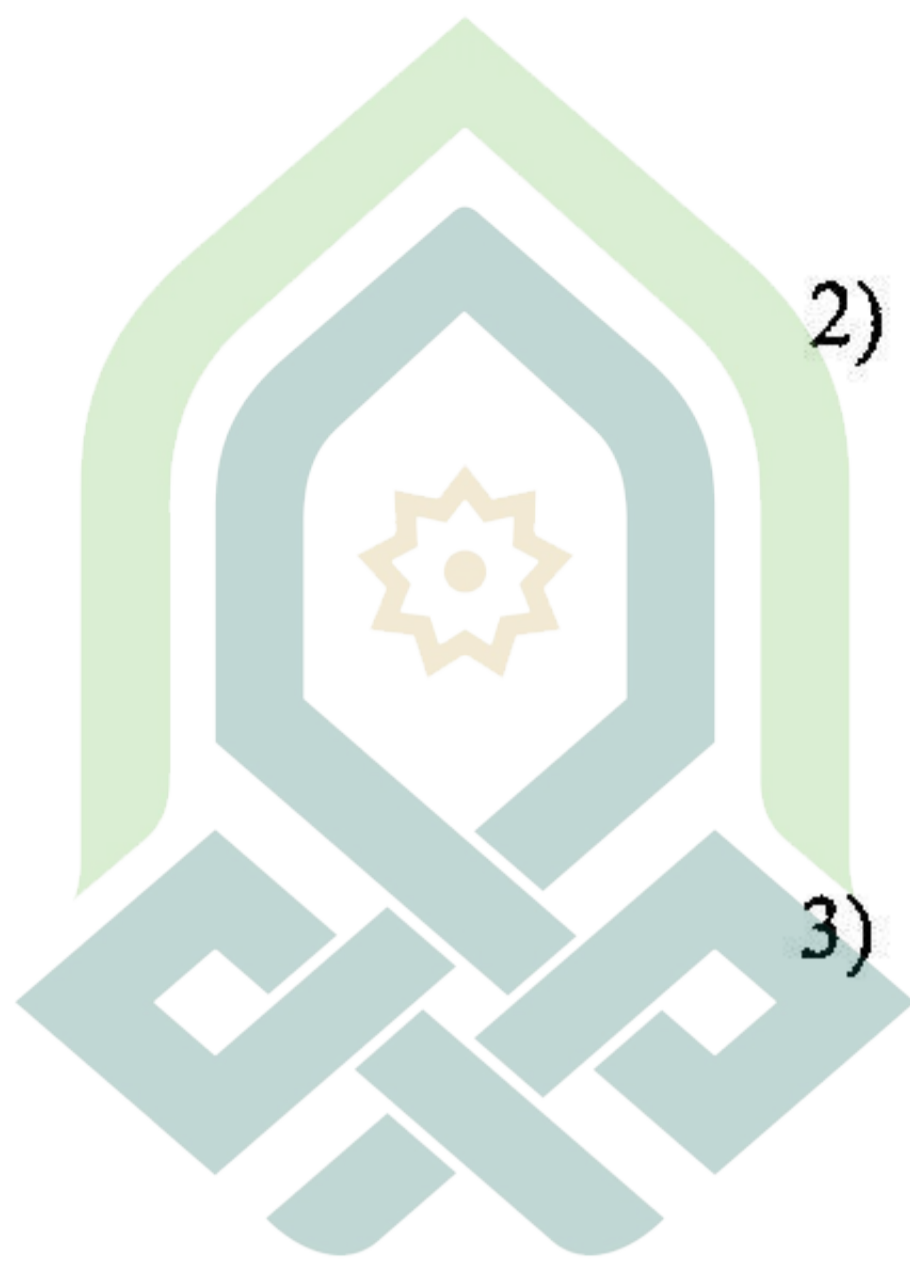
pada diri siswa agar selalu menerapkan seluruh potensi diri dalam membangun gagasan melalui kegiatan sepanjang hayat. Gagasan dan pengetahuan ini akan membentuk ketrampilan, sikap, dan perilaku sehingga siswa akan berkompeten dalam bidang yang dipelajarinya. Kegiatan belajar mengajar inilah yang disebut orang sebagai pembelajaran.

Prinsip dasar Kegiatan pembelajaran (KBM) adalah mengembangkan ketrampilan berpikir logis, kritis, kreatif, bersikap dan bertanggung jawab pada kebiasaan dan perilaku sehari-hari melalui aktivitas pembelajaran secara aktif, yaitu:

1) Berpusat pada siswa

Setiap siswa berbeda dalam minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, kecepatan dan gaya belajar, oleh karena itu kegiatan pembelajaran, organisasi kelas, materi pembelajaran, waktu belajar, alat belajar, dan cara penilaian perlu beragam sesuai karakteristik siswa.

Dengan demikian KBM hendaklah memungkinkan siswa bersosialisasi dengan menghargai perbedaan (pendapat, sikap, kemampuan, prestasi) dan berlatih untuk kerja sama melalui *learning community*, sehingga mampu mengkomunikasikan gagasan, hasil kreasi, dan temuannya kepada pihak lain. (guru atau siswa lain)



2) Mengembangkan keingintahuan dan imajinasi

Pembelajaran hendaklah mendorong dan menjadikan siswa peka, kritis, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab.

3) Memiliki semangat mandiri – bekerjasama , dan kompetisi

Siswa perlu dilatih untuk terbiasa bekerja mandiri, bekerjasama, dan berkompetisi secara sehat, dengan menyediakan tugas yang mendorong kerja mandiri, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan semangat berkompetisi secara sportif juga menjunjung solidaritas.

4) Ciptakan kondisi yang menyenangkan

Siswa akan belajar dan terus belajar jika kondisi pembelajaran dibuat menyenangkan, nyaman, dan jauh dari perilaku yang menyakitkan perasaan siswa. otak akan bekerja optimal bila suasana menyenangkan.

5) Mengembangkan beragam kemampuan dan pengalaman belajar

Siswa akan belajar optimal bila pengalaman belajar yang disajikan dapat mengembangkan berbagai kemampuan seperti kemampuan logis matematis, bahasa, musik, seni, kinestetik, dan kemampuan inter-intra personal.

5. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Komponen	Kelas		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran	65	65	65
1. Pendidikan Agama			
2. Pendidikan Kewarganegaraan	60	60	60
3. Bahasa Indonesia	60	60	60
4. Bahasa Inggris	58	58	58
5. Matematika	58	58	52
6. Ilmu Pengetahuan Alam	58	58	60
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	60	60	60
8. Seni Budaya	65	65	65
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	60	60	60
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi	60	60	60
B. Muatan lokal	60	60	60
a. Bahasa Jawa	65		
b. Ketrampilan Elektro		67	
c. Ketrampilan Jasa			60
d. Ketrampilan Boga			
C. Pengembangan Diri	B	B	B

6. Penilaian

Penilaian merupakan kegiatan pengumpulan informasi hasil belajar siswa untuk menetapkan apakah siswa telah menguasai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dari data inilah, guru memberikan keputusan terhadap prestasi siswanya.

Penilaian dilakukan lebih berfokus pada penilaian berbasis kelas (*classroom based assessment*). Maka dalam pelaksanaannya, penilaian tersebut bersifat internal artinya hanya dilakukan oleh guru yang mengasuhnya, terus-menerus, dan merupakan bagian proses pembelajaran.

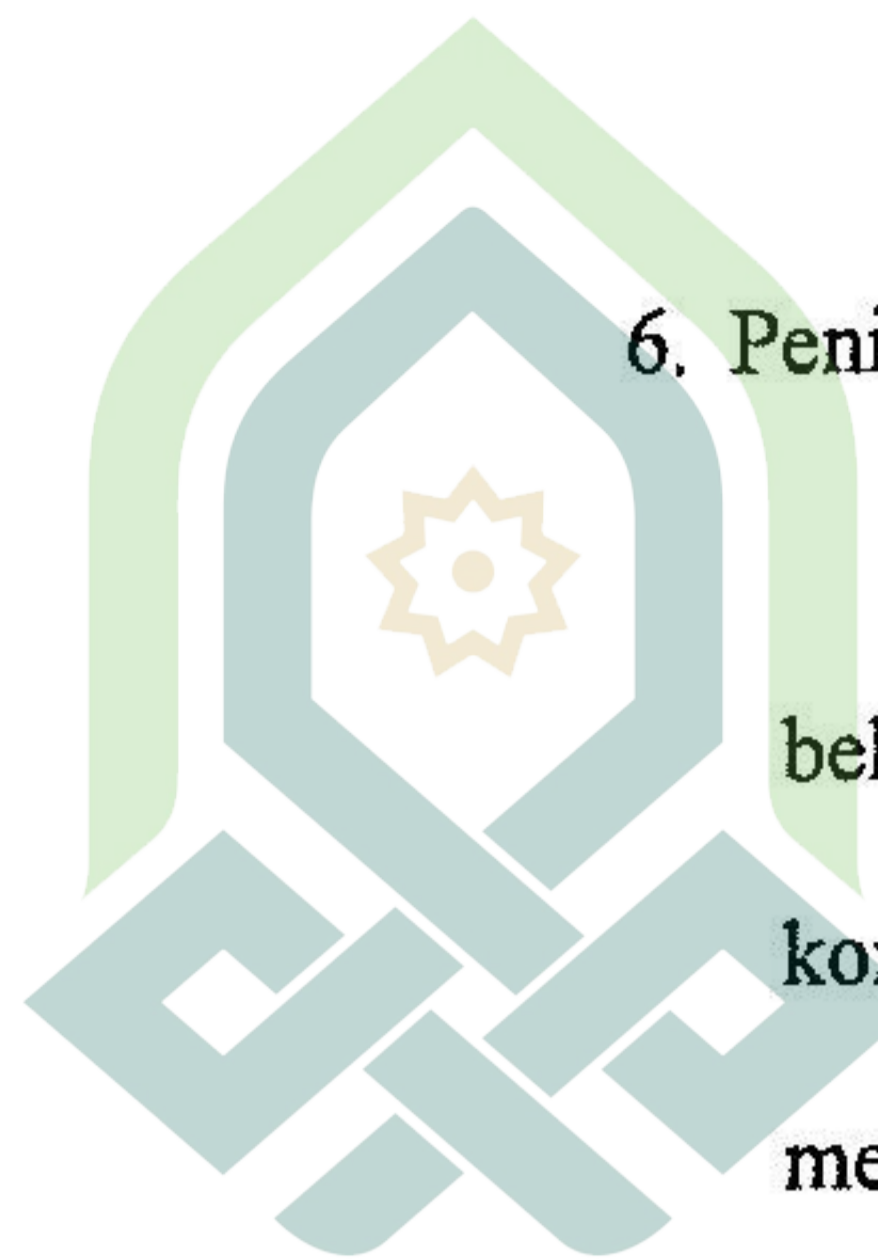
Penilaian harus berdasarkan Prinsip Penilaian sebagai berikut :

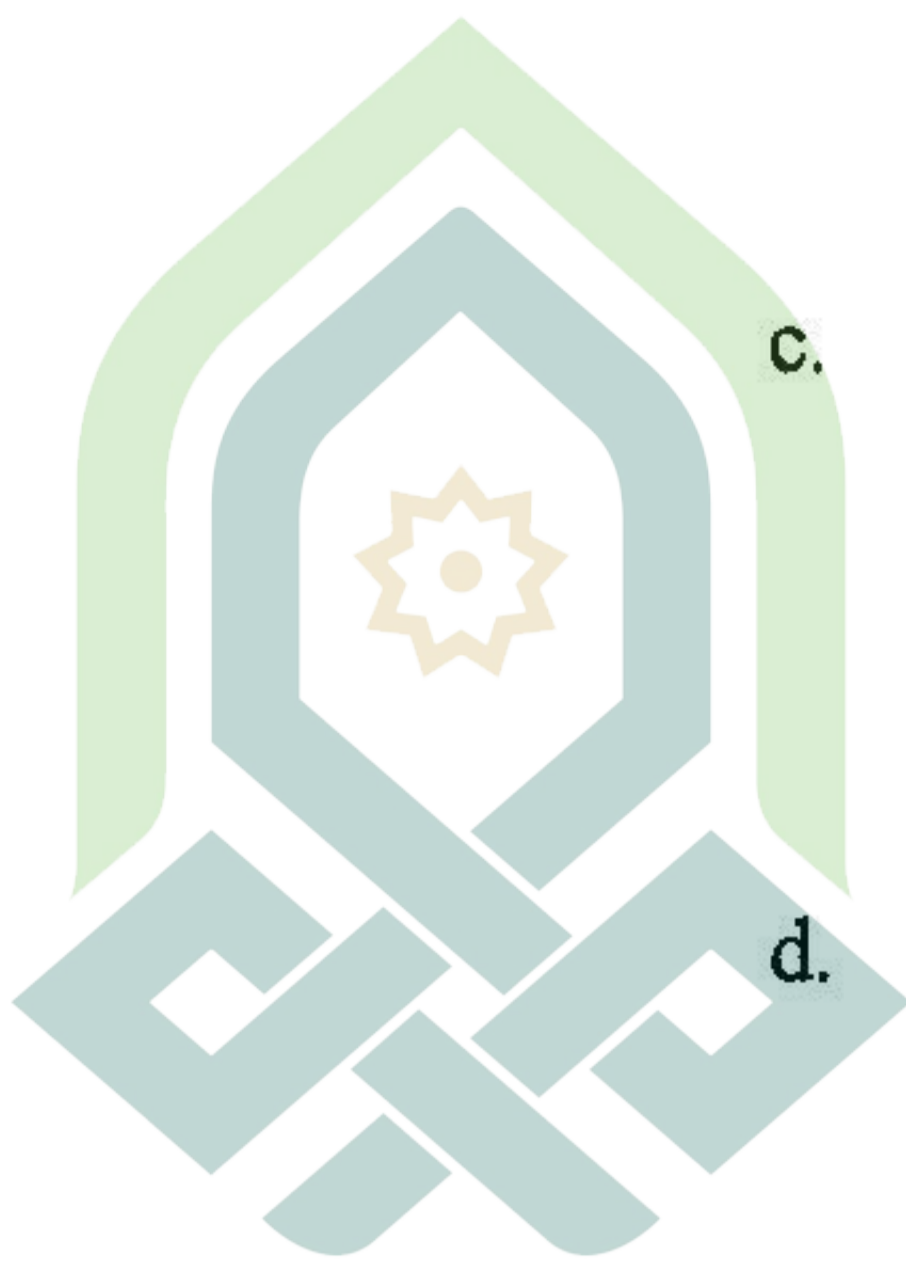
a. Berorientasi pada Kompetensi

Pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi dibandingkan dengan kemampuan sebelumnya dan kriteria Standar Kompetensi Belajar Minimal (SKBM) yang ditetapkan. Semua kompetensi harus ditumbuhkembangkan pada diri siswa dan mendapat peluang yang sama untuk dinilai

b. Valid

Penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa dan dilakukan dengan berbagai cara, dengan pendekatan yang bervariasi dan beragam.





c. Adil

Penilaian kepada semua siswa tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan jender.

d. Terbuka

Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap siswa harus jelas dan terbuka bagi semua pihak.

e. Berkesinambungan

Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus menerus untuk memperoleh gambaran perkembangan belajar sebagai hasil belajarnya.

f. Menyeluruh

Penilaian terhadap hasil belajar siswa meliputi bidang pengetahuan (*kognitif*), keterampilan (*psikomotorik*), sikap dan nilai (*afektif*) yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

g. Bermakna

Hasil penilaian hendaknya memberikan deskripsi yang mudah dipahami, mempunyai arti, berguna, dan dapat ditindak lanjuti terutama bagi siswa dan orang tua.

h. Mendidik

Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Hasil penilaian harus dapat



dirasakan sebagai penghargaan bagi siswa yang berhasil atau sebagai pemicu semangat belajar bagi yang kurang berhasil

7. Kriteria Kenaikan Kelas

- a. Kenaikan kelas didasarkan pada rata-rata nilai raport tiap mata pelajaran semester 1 dan semester 2.
- b. Nilai minimal setiap mata pelajaran 50.
- c. Setiap mata pelajaran nilai rata-rata aspeknya terpenuhi ketuntasannya..
- d. Boleh ada 3 mata pelajaran atau kurang dari 3 mata pelajaran yang nilai rata-rata semua aspek belum memenuhi ketuntasannya.
- e. memiliki nilai sikap (kelakuan, kerajinan, kebersihan dan kerapian) minimal baik (B).

Catatan :

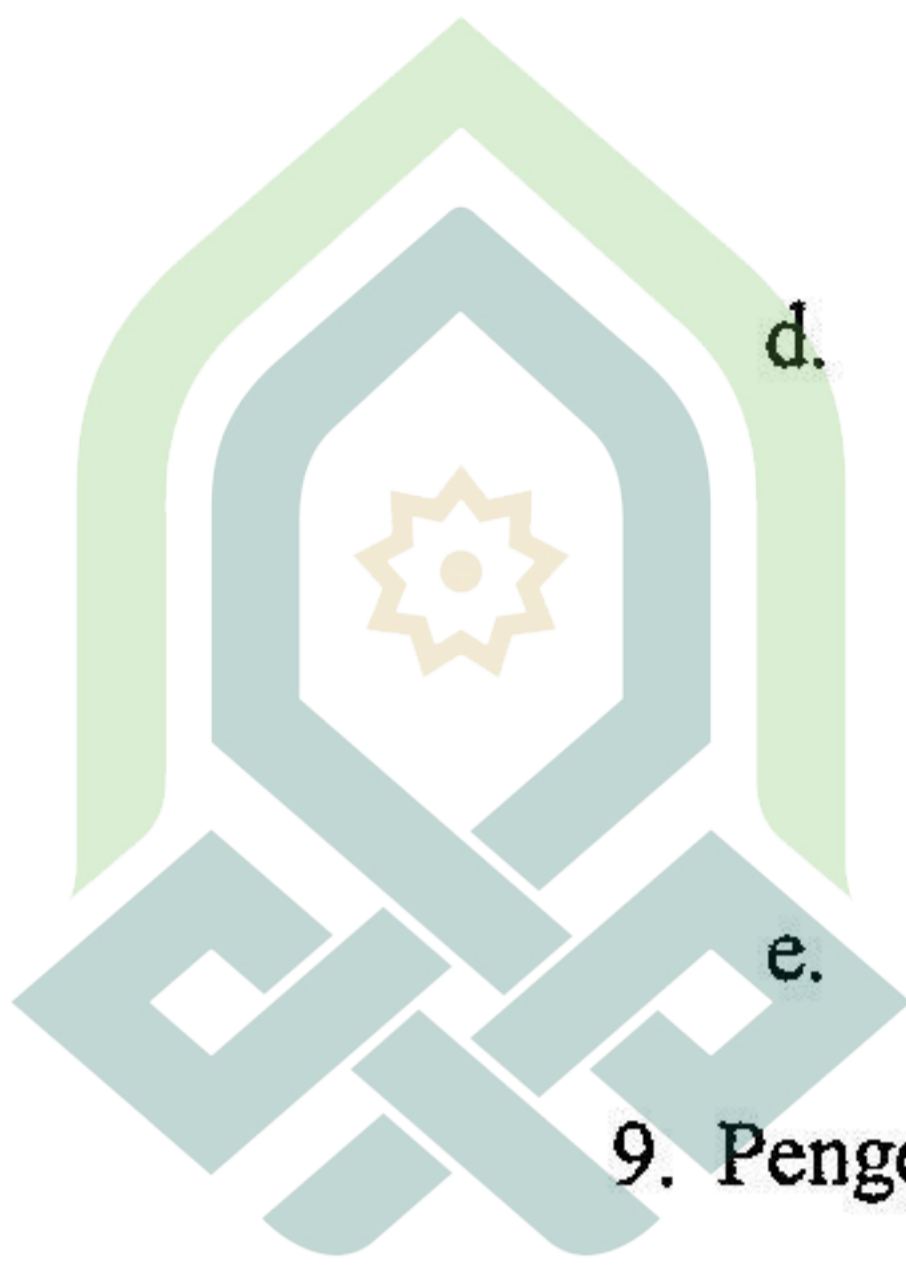
$$\text{Rumus Nilai Raport} = \frac{(3 \text{ UH} + 1 \text{ UTS} + 1 \text{ UUS})}{5}$$

Nilai UH = Ulangan KD

8. Kriteria Kelulusan

Seorang siswa dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan SMP, jika :

- a. Telah menyelesaikan semua program pendidikan sekolah
- b. Batas kelulusan ujian sekolah minimal 60 pada semua mata pelajaran yang diujikan selain mata pelajaran nasional.
- c. Nilai rata – rata seluruh mata pelajaran ujian sekolah minimal 60.



- d. Lulus ujian nasional. Siswa dinyatakan lulus ujian nasional jika nilai yang diperoleh minimal 4,25 dan nilai rata – rata keempat mata pelajaran yang diujikan nasional minimal 5,50
- e. Memiliki nilai sikap minimal baik (B).

9. Pengembangan *life Skill*

a. Kecakapan sosial

Setiap mata pelajaran melaksanakan diskusi kelompok minimal 1 kali dalam 1 semester

b. Kecakapan Personal

Masing-masing guru senantiasa memotivasi dan mengembangkan potensi anak didik dengan tanpa membedakan kemampuan social ekonomi, kecerdasan, maupun jender.

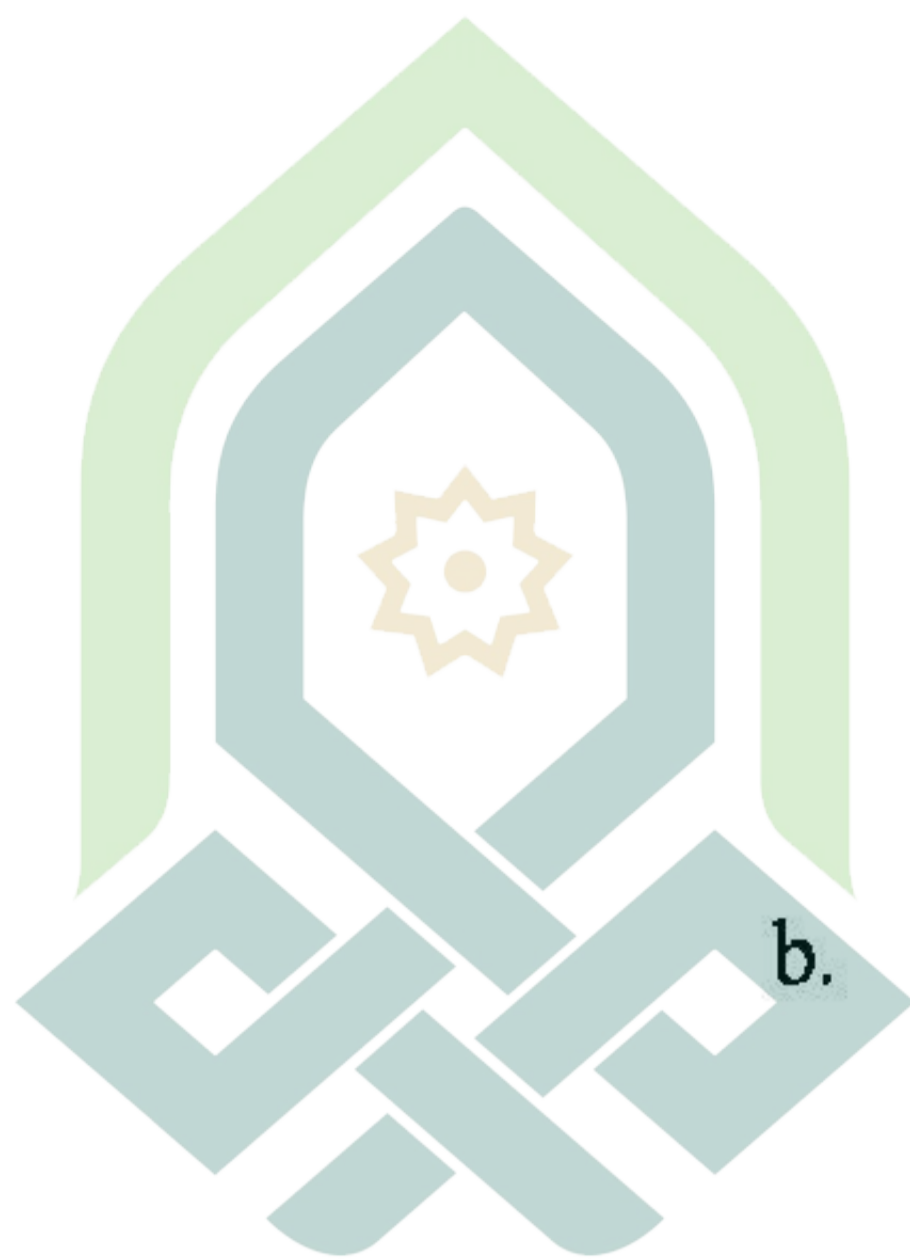
c. Kecakapan Akademis

Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melaksanakan lomba pidato minimal satu kali dalam satu semester.

10. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

a. Keunggulan lokal

Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Agama, Bahasa Inggris melaksanakan kunjungan ke perusahaan : batik, tenun tradisional, dan konveksi.



Setiap guru mata pelajaran wajib memanfaatkan dan menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber atau media pembelajaran.

b. Keunggulan global

Semua mata pelajaran memanfaatkan laboratorium bahasa dan teknologi informasi komputer/ internet dengan melakukan :

browsing, surving, downloading.

Secara normatif, Islam memang tidak menjelaskan bagaimana bentuk demokrasi yang dianut, namun ajaran Islam mengandung prinsip dan kaidah yang merupakan kata kunci dari demokrasi. Diantara kaidah demokrasi dimaksud adalah: kaidah *ta'aruf* (saling mengenal), *syura* (musyawarah), *ta'awun* (kerja sama), *maslahah* (menguntungkan), *adil*, *taghyir* (perubahan).⁶²

Dalam penelitian ini, penulis membuat angket yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda 3 option yang diajukan kepada Bapak/ Ibu guru SMP N 02 Kesesi dan juga kepada peserta didik, maka diperoleh data sebagai berikut:

⁶² Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar ruzz media, 2008), hlm.86-88

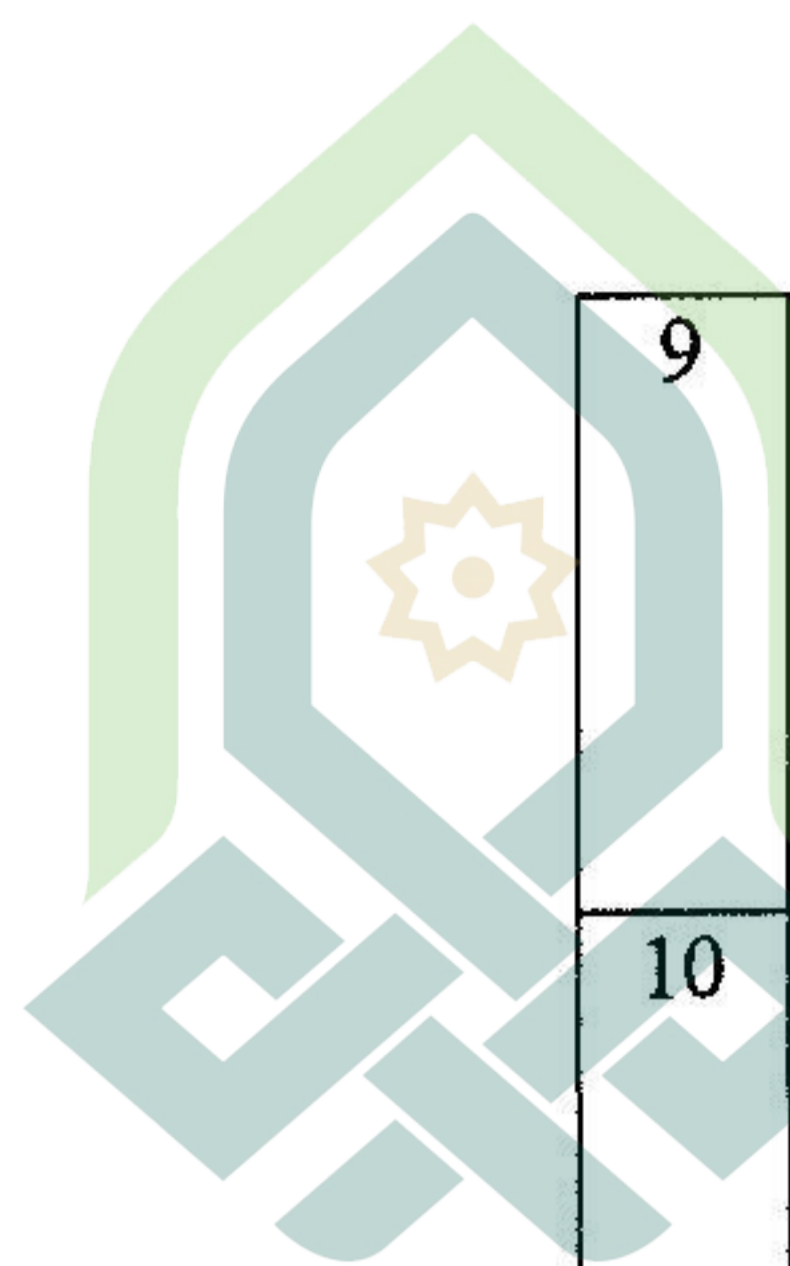
Tabel III

Pelaksanaan demokratisasi pendidikan Islam oleh guru di SMP N 2

Kesesi

No	Pertanyaan	Frekuensi			Jml
		Selalu	Kadang	Tidak	
1	Apakah Anda pernah mendatangi rumah peserta didik?	26	5	4	35
2	Apakah Anda pernah bertanya kepada peserta didik?	22	10	3	35
3	Apakah Anda mengenal semua peserta didik?	25	5	5	35
4	Apakah Anda pernah menggunakan metode diskusi kelompok dalam proses belajar mengajar?	16	10	9	35
5	Apakah Anda pernah mengajak diskusi dengan peserta didik?	18	9	8	35
6	Apakah Anda memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeluarkan pendapat setelah pelajaran selesai?	17	10	8	35
7	Apakah Anda melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar?	16	9	10	35
8	Apakah Anda pernah menggunakan metode diskusi kelompok dalam proses belajar mengajar?	25	6	4	35

9	Apakah Anda pernah meninggalkan tugas secara cuma-cuma kepada peserta didik?	10	16	9	35
10	Apakah Anda pernah menyuruh peserta didik untuk konsultasi masalah pendidikan?	17	10	8	35
11	Apakah Anda selalu mendampingi peserta didik ketika mengerjakan tugas?	19	7	9	35
12	Apakah Anda membiarkan peserta didik yang tidak berkeinginan praktek sholat?	20	8	7	35
13	Apakah perlakuan Anda terhadap peserta didik miskin dan kaya sama?	29	3	3	35
14	Apakah Anda memberi nilai sesuai dengan kemampuan peserta didik?	19	12	4	35
15	Apakah Anda selalu menaati peraturan guru di sekolah?	22	8	5	35
16	Apakah Anda selalu mewajibkan peserta didik untuk mengerjakan tugas?	18	10	7	35
17	Apakah perintah Anda selalu dilaksanakan oleh peserta didik?	24	7	4	35
18	Apakah Anda memberitahukan hasil ujian kepada peserta didik setelah ujian selesai?	27	4	4	35



19	Apakah Anda pernah mengakui kesalahan Anda?	24	9	2	35
20	Apakah Anda pernah bilang “tidak tahu” kepada peserta didik ketika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan?	19	8	8	35

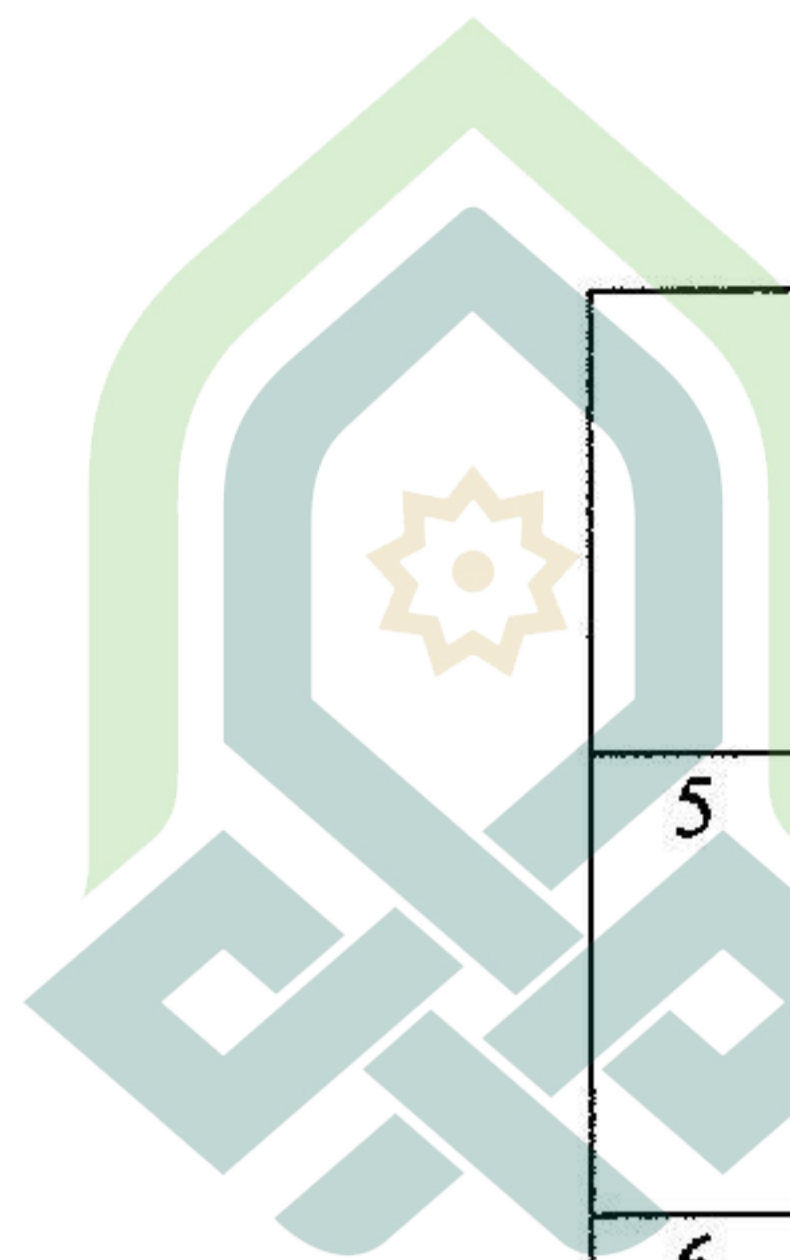
Kemudian selain angket yang disebarakan kepada guru-guru sebagai bahan informasi dan pengambilan data, penulis juga menyebarkan angket kepada peserta didik yang berjumlah 60 anak sebagai tolak ukur pelaksanaan demokratisasi pendidikan di SMP N 2 Kesesi yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV

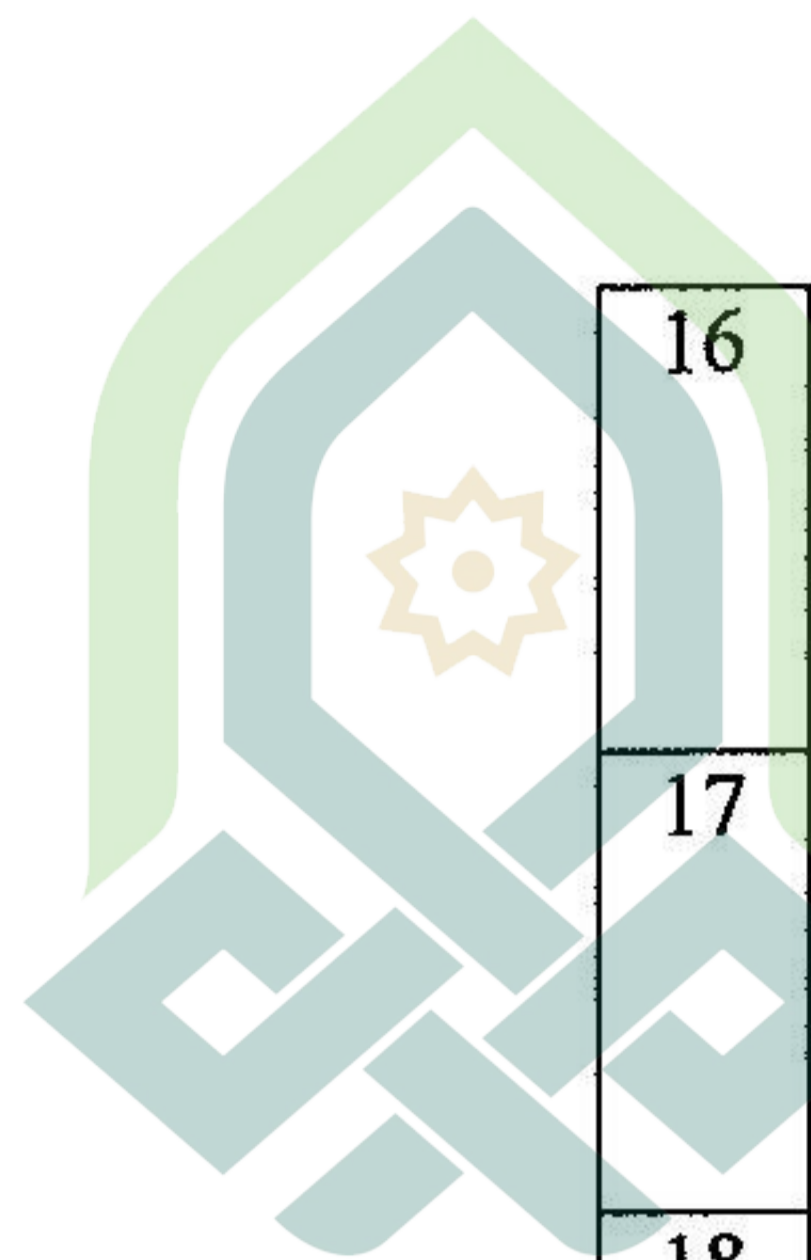
Pelaksanaan demokratisasi pendidikan Islam oleh peserta didik
di SMPN 2 Kesesi

No	Pertanyaan	Frekuensi			Jml
		Selalu	Kadang	Tidak	
1	Apakah kamu pernah mendatangi rumah Bapak/ Ibu guru?	36	16	8	60
2	Apakah kamu pernah bertanya kepada Bapak/ Ibu guru?	37	18	5	60
3	Apakah kamu mengenal semua Bapak/ Ibu guru?	41	14	5	60
4	Apakah kamu pernah	38	17	5	60

	mengeluarkan pendapat kepada Bapak/Ibu guru setelah pelajaran selesai?				
5	Apakah kamu pernah mengajak diskusi dengan Bapak/ Ibu guru?	29	16	15	60
6	Apakah kamu selalu dibebaskan untuk membuat kelompok belajar sendiri?	36	16	8	60
7	Apakah kamu selalu ikut dalam kegiatan sholat berjamaah?	49	6	5	60
8	Apakah Bapak/Ibu guru pernah memaksa kamu untuk melakukan sholat berjamaah?	26	20	14	60
9	Apakah kamu melibatkan teman dalam proses belajar mengajar?	39	15	6	60
10	Apakah kamu pernah konsultasi masalah pendidikan dengan Bapak/ Ibu guru?	38	17	5	60
11	Apakah kamu pernah dikritik/ dinasehati oleh Bapak/Ibu guru?	39	17	4	60
12	Apakah kamu pernah belajar kelompok dengan temanmu?	36	14	10	60
13	Apakah kamu selalu mengerjakan tugas dari Bapak/Ibu guru?	41	10	9	60
14	Apakah kamu pernah menolong temanmu saat kesusahan?	42	12	6	60
15	Apakah kamu menaati peraturan sekolah yang ada?	23	20	17	60



16	Apakah kamu pernah mengajak kerja sama dengan Bapak/Ibu guru untuk belajar kelompok?	30	20	10	60
17	Apakah kamu selalu menghargai pendapat temanmu?	42	10	8	60
18	Apakah kamu pernah mendapatkan penghargaan karena selalu mematuhi tata tertib?	18	27	15	60
19	Apakah kamu pernah mendatangi rumah Bapak/Ibu guru?	31	14	15	60
20	Apakah kamu Pernah minta doa kepada Bapak/Ibu guru?	37	15	8	60





BAB IV

ANALISIS DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN

ISLAM

A. Analisis Penerapan Demokratisasi Dalam Pendidikan Islam di SMP N 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan

Demokratisasi dalam pendidikan merupakan proses menjadi demokrasi dalam pendidikan yang mengandung arti, proses menuju demokrasi di bidang pendidikan. Indikator dari demokrasi adalah terbuka, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, bebas tekanan atau paksaan, mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama, dalam hal ini aturan sekolah yaitu SMP N 2 Kesesi.

Secara umum demokratisasi dalam pendidikan Islam mempunyai beberapa kaidah yang penulis terapkan, maka ada beberapa analisis yang berdasarkan metode pembelajaran yang disampaikan oleh al Quran dan Hadis meliputi:

- 1) Metode amaliah atau praktik (termasuk didalamnya adalah metode drill, resitasi dan eksperimentasi). Ajaran Islam tidak cukup diberikan dengan nasihat, melainkan memerlukan tindakan nyata sehingga esensi ajaran Islam tidak dipahami sekedar sebagai simbol, namun terbentuk dalam pribadi manusia secara totalitas. Contoh metode amaliah atau praktek ini dapat diterapkan dalam ibadah

makhdah (sholat, puasa, zakat, haji, jihad dan lain sebagainya) dan dalam ibadah *ghairu makhdah* yang mencakup perilaku kehidupan seseorang (seperti pergaulan antar sesama manusia, solidaritas sosial, kepedulian terhadap ekosistem, kesetiakawanan, kedisiplinan, sikap toleransi dan lain sebagainya).

Dalam kaidah ini ada angket yang diajukan kepada peserta didik dengan menggunakan rumus : $P = F/N \times 100\%$.

Apakah kamu selalu ikut dalam sholat berjamaah?

Tabel V

PARTISIPASI DALAM SHOLAT BERJAMAAH

ITEM	ALTERNATIF JAWABAN	F	PERSENTASE
a	Selalu	49	82%
b	Kadang-kadang	6	10%
c	Tidak Pernah	5	8%

Dari angka item tersebut yang disebarkan kepada 60 peserta didik diperoleh hasil yaitu 49 anak menjawab bahwa peserta didik selalu berpartisipasi dalam sholat berjamaah atau sebanyak 82%, 6 peserta didik menyatakan kadang ikut sholat berjamaah kadang tidak atau



sebanyak 10% dan 5 peserta didik menyatakan tidak pernah mengikuti sholat berjamaah atau 8%.

- 2) Metode amar ma'ruf nahi munkar. Kebanyakan perilaku kekerasan yang ada di berbagai negara, bukan terjadi karena substansi kekerasannya, melainkan karena fungsi manusia dalam menjalankan yang makruf dan larangan yang munkar tidak berjalan secara efektif. Implikasi metode amar ma'ruf nahi munkar dalam pendidikan bisa terwujud melalui penegakan aturan, tata tertib, kode etik, dan disiplin civitas akademika. Misalnya, guru tidak bersikap otoriter terhadap murid dan murid tidak menyalahi tata tertib sekolah.

Tabel VI

PARTISIPASI DALAM TANYA JAWAB

ITEM	ALTERNATIF JAWABAN	F	PERSENTASE
a	Selalu	37	62%
b	Kadang-kadang	18	30%
c	Tidak Pernah	5	8%

Dari angka item tersebut yang disebarkan kepada 60 peserta didik diperoleh hasil yaitu 37 anak menjawab bahwa peserta didik selalu berpartisipasi dalam tanya jawab atau sebanyak 62%, 18 peserta didik menyatakan kadang bertanya kadang tidak atau sebanyak 30% dan 5 peserta didik menyatakan tidak pernah bertanya atau 8%.



- 3) Metode Nasihat. Bahwa dapat dikatakan seluruh isi Al Quran adalah nasihat dan pelajaran. Dikisahkan pula bahwa Lukman al Hakim mendidik putranya dengan jalan memberi nasihat agar tidak menyekutukan Allah.

Apakah kamu pernah dinasehati Bapak/ Ibu guru?

Tabel VII

NASEHAT OLEH BAPAK/ IBU GURU

ITEM	ALTERNATIF JAWABAN	F	PERSENTASE
a	Selalu	39	65%
b	Kadang-kadang	17	28%
c	Tidak Pernah	4	7%

Dari angka item tersebut yang disebarkan kepada 60 peserta didik diperoleh hasil yaitu 39 anak menjawab bahwa peserta didik selalu dinasehati Bapak/ Ibu guru atau sebanyak 65%, 17 peserta didik menyatakan kadang dinasehati kadang tidak atau sebanyak 28% dan 4 peserta didik menyatakan tidak pernah dinasehati atau 7%.

- 4) Metode Kisah. Dalam kisah sering kali terdapat perumpamaan atau ibarat, dan arena itu metode ini juga bisa dinamai dengan metode amtsal atau ibarah. Al Quran memuat kisah para nabi dan umat

terdahulu, dan ini berfungsi sebagai pelajaran bagi umat selanjutnya.

Kisah-kisah terbukti dapat membekas pada diri seseorang, sebab didalamnya bisa dibangkitkan perasaan orang tersebut untuk meneladani tokoh dan pahlawan tertentu yang dikisahkan, dan mempersonifikasikannya dalam perilaku sehari-hari.

Apakah kamu pernah konsultasi masalah pendidikan dengan Bapak/ Ibu guru?

Tabel VIII

KONSULTASI MASALAH PENDIDIKAN

ITEM	ALTERNATIF JAWABAN	F	PERSENTASE
a	Selalu	38	63%
b	Kadang-kadang	17	29%
c	Tidak Pernah	5	8%

Dari angka item tersebut yang disebarkan kepada 60 peserta didik diperoleh hasil yaitu 38 anak menjawab bahwa peserta didik selalu konsultasi dengan Bapak/ Ibu guru atau sebanyak 63%, 17 peserta didik menyatakan kadang konsultasi kadang tidak atau sebanyak 29% dan 5 peserta didik menyatakan tidak pernah konsultasi atau 8%.



5) Metode Uswatun Khasanah (metode demonstrasi). Diantara faktor-faktor yang berpengaruh bagi pendidikan anak dalam kehidupan sehari-hari adalah keteladanan. Dengan keteladanan, baik dari orang tua, guru, masyarakat, tokoh, maupun jagoan fiktif yang diidolakan, dapat mendorong seseorang menjadi manusia yang shaleh atau merusak dirinya sendiri menjadi jahat. Al Quran menandakan dengan tegas pentingnya teladan dan pergaulan yang baik dalam membentuk kepribadian seseorang. Sedangkan teladan yang paling baik bagi umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW.

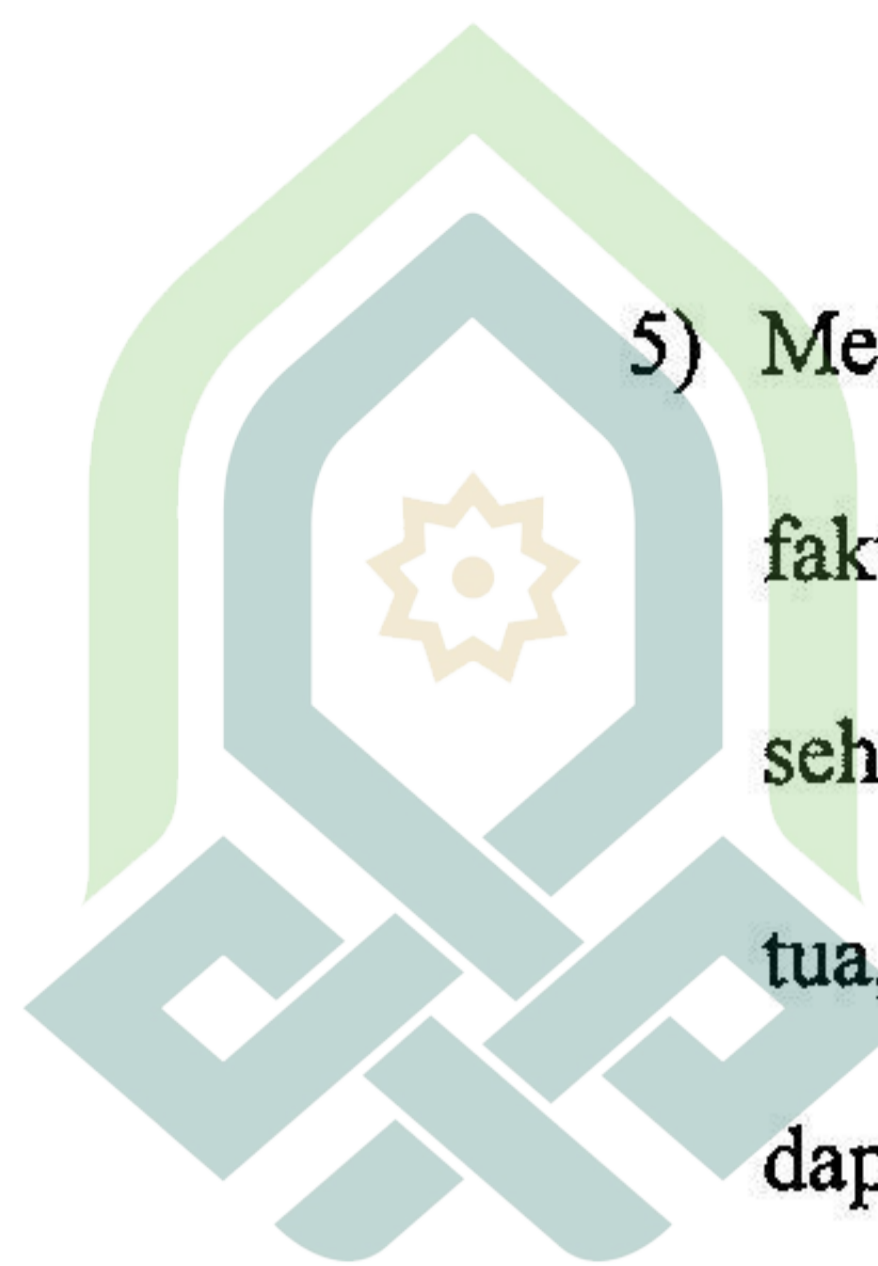
Apakah kamu selalu menghargai pendapat/ kritikan dari temanmu?

Tabel IX

MENGHARGAI TEMAN

ITEM	ALTERNATIF JAWABAN	F	PERSENTASE
a	Selalu	42	70%
b	Kadang-kadang	10	17%
c	Tidak Pernah	8	13%

Dari angka item tersebut yang disebarkan kepada 60 peserta didik diperoleh hasil yaitu 42 anak menjawab bahwa peserta didik selalu menghargai temannya atau sebanyak 70%, kemudian 10 peserta didik menyatakan kadang menghargai kadang tidak atau sebanyak



17% dan 8 peserta didik menyatakan tidak pernah konsultasi atau 13%.

- 6) Metode *hiwar* (metode tanya jawab, dialog, diskusi, debat dan sejenisnya). Metode ini menumbuhkan sifat kritis dan saling pengertian. Penumbuhan sikap saling mengerti di tengah masyarakat merupakan masalah mendasar, sebab dengan saling pengertian, meskipun beda pendapat dapat menyebabkan orang dengan budaya, bahasa, agama, ras, seks, adat dan status sosial yang berbeda, dapat duduk berdampingan satu sama lain.

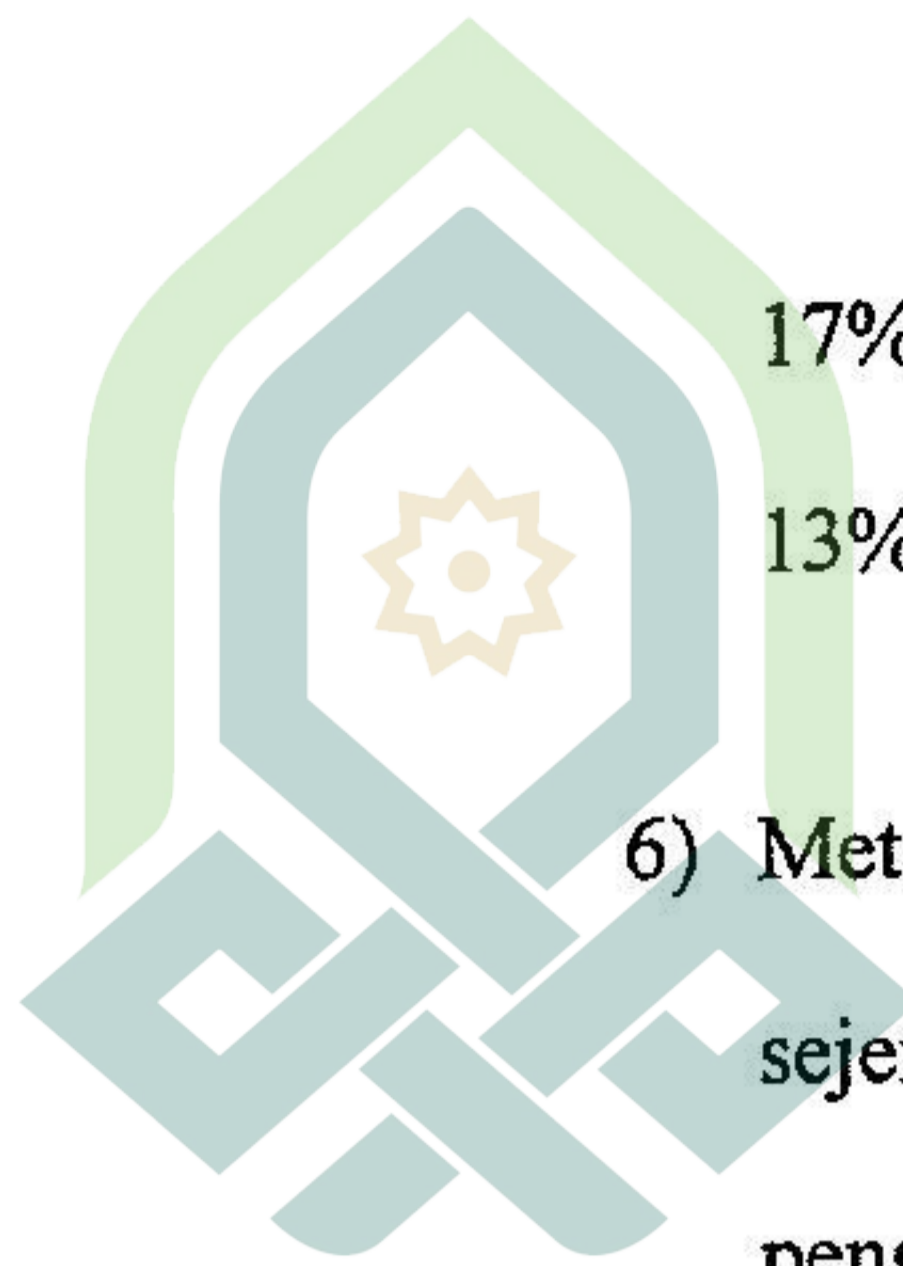
Apakah kamu pernah bertanya kepada Bapak/ Ibu guru?

Tabel X

TANYA JAWAB DENGAN BAPAK/ IBU GURU

ITEM	ALTERNATIF JAWABAN	F	PERSENTASE
a	Selalu	37	62%
b	Kadang-kadang	18	30%
c	Tidak Pernah	5	8%

Dari angka item tersebut yang disebarkan kepada 60 peserta didik diperoleh hasil yaitu 37 anak menjawab bahwa peserta didik selalu bertanya kepada Bapak/ Ibu guru atau sebanyak 62%, kemudian 18 peserta didik menyatakan kadang bertanya kadang tidak atau

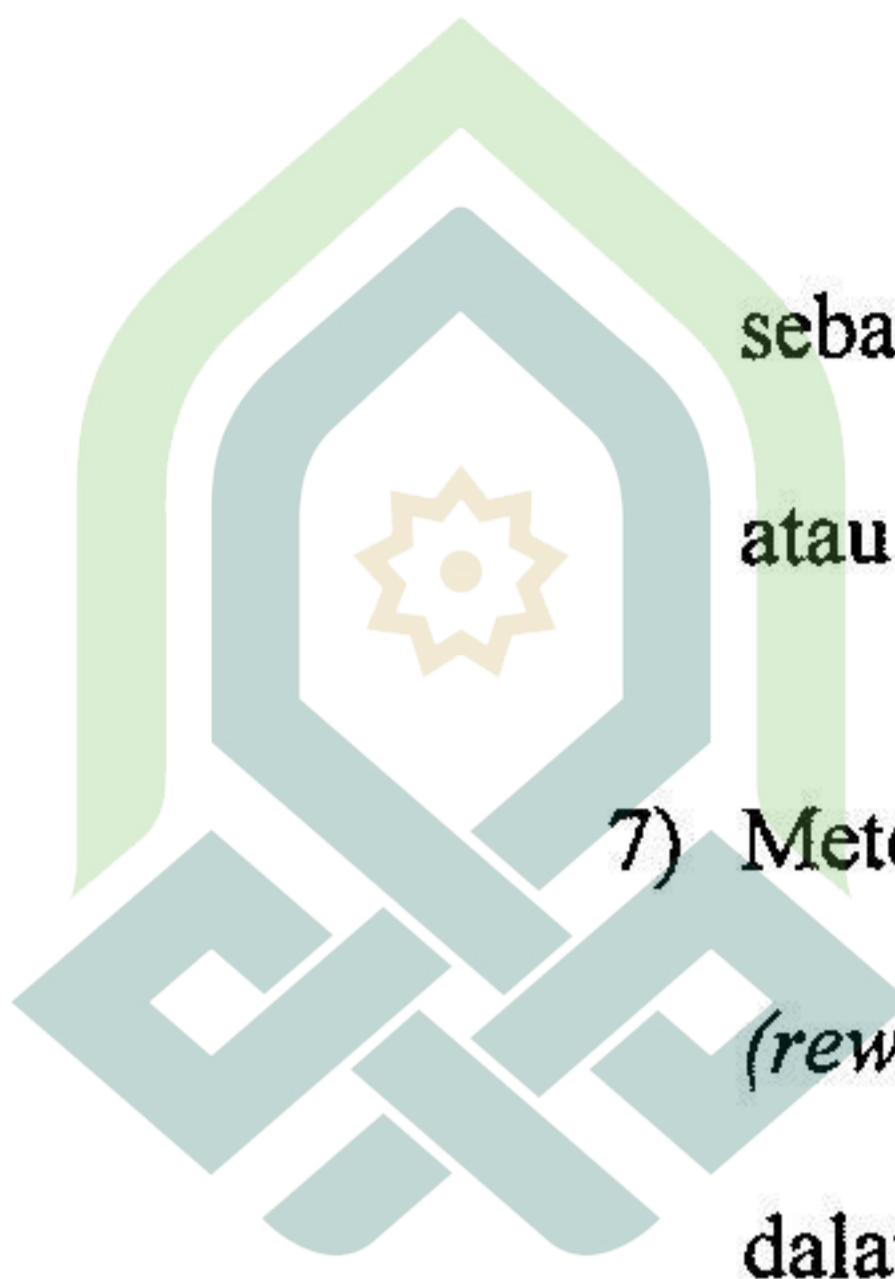


sebanyak 30% dan 5 peserta didik menyatakan tidak pernah bertanya atau 8%.

7) Metode *rihlah* ilmiah (*exploration discovery*), *tarhib wa targhib* (*reward and punishment*), dan lain sebagainya, juga dapat diterapkan dalam pendidikan Islam. Sosiolog Ibnu Khaldun misalnya, dikabarkan hidup pada tujuh generasi pemerintahan yang berbeda-beda dan ia mengadakan perjalanan ilmiah dari satu daerah ke daerah lain untuk meneliti pola interaksi dan struktur masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan.

Pada prinsipnya, semua materi dan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam di atas bersifat kondusif bagi pembentukan pribadi muslim yang berkarakter mulia, damai dan tanpa kekerasan. Bergantung pada sejauh mana guru, orangtua, tutor, murid, mahasiswa dan seluruh komponen pendidikan, mampu mengaplikasikan materi dan metode tersebut ke dalam perilaku sehari-hari. Lembaga pendidikan Islam seyogyanya menerapkan hal ini, tidak sebatas pada idealisme, melainkan diterjemahkan dalam bentuk realisasi, operasionalisasi dan bukan *imperative action*.

Apakah kamu pernah mendatangi rumah Bapak/ Ibu guru?



Tabel XI

MENDATANGI RUMAH BAPAK/ IBU GURU

ITEM	ALTERNATIF JAWABAN	F	PERSENTASE
a	Selalu	36	60%
b	Kadang-kadang	16	27%
c	Tidak Pernah	8	13%

Dari angka item tersebut yang disebarkan kepada 60 peserta didik diperoleh hasil yaitu 36 anak menjawab bahwa peserta didik selalu mendatangi rumah Bapak/ Ibu guru atau sebanyak 60%, 16 peserta didik menyatakan kadang mendatangi rumah Bapak/ Ibu guru kadang tidak atau sebanyak 27% dan 8 peserta didik menyatakan tidak pernah mendatangi rumah Bapak/ Ibu guru atau 13%.

Dari analisis awal tersebut maka penulis melakukan analisis

lanjutan sebagai berikut dengan rumus: $P = F/N \times 100\%$

P = Persentase (%)

F = Frekuensi (dengan melihat tabel IV)


N = Jumlah penyebaran angket

Tabel XII

Persentase demokratisasi pendidikan Islam oleh peserta didik
di SMPN 2 Kesesi

No	Pertanyaan	Persentase (%)			Jml
		Selalu	Kadang	Tidak	
1	Apakah kamu pernah mendatangi rumah Bapak/ Ibu guru?	60	27	13	100
2	Apakah kamu pernah bertanya kepada Bapak/ Ibu guru?	62	30	8	100
3	Apakah kamu mengenal semua Bapak/ Ibu guru?	68	23	9	100
4	Apakah kamu pernah mengeluarkan pendapat kepada Bapak/Ibu guru setelah pelajaran selesai?	63	28	9	100
5	Apakah kamu pernah mengajak diskusi dengan Bapak/ Ibu guru?	48	27	25	100
6	Apakah kamu selalu dibebaskan untuk membuat kelompok belajar sendiri?	60	27	13	100
7	Apakah kamu selalu ikut dalam kegiatan sholat berjamaah?	82	10	8	100
8	Apakah Bapak/Ibu guru pernah memaksa kamu untuk melakukan sholat berjamaah?	43	33	24	100
9	Apakah kamu melibatkan teman dalam proses belajar mengajar?	65	25	10	100

10	Apakah kamu pernah konsultasi masalah pendidikan dengan Bapak/ Ibu guru?	63	28	9	100
11	Apakah kamu pernah dikritik/ dinasehati oleh Bapak/Ibu guru?	65	28	7	100
12	Apakah kamu pernah belajar kelompok dengan temanmu?	60	23	17	100
13	Apakah kamu selalu mengerjakan tugas dari Bapak/Ibu guru?	68	17	15	100
14	Apakah kamu pernah menolong temanmu saat kesusahan?	70	20	10	100
15	Apakah kamu menaati peraturan sekolah yang ada?	38	33	29	100
16	Apakah kamu pernah mengajak kerja sama dengan Bapak/Ibu guru untuk belajar kelompok?	50	33	17	100
17	Apakah kamu selalu menghargai pendapat temanmu?	70	17	13	100
18	Apakah kamu pernah mendapatkan penghargaan karena selalu mematuhi tata tertib?	30	45	25	100
19	Apakah kamu pernah mendatangi rumah Bapak/Ibu guru?	52	23	25	100
20	Apakah kamu Pernah minta doa kepada Bapak/Ibu guru?	62	25	13	100
RATA-RATA		58.95	26.1	14.95	100



Untuk analisa data kuantitatif digunakan tabel dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam menganalisa dan menafsirkannya. Dari angket yang telah disebar ada tiga opsi jawaban, yang mana jawaban “selalu” merupakan jawaban sebuah indikator dalam menentukan penilaian terhadap SMP N 2 Kesesi ini.

Dalam skripsi ini, penafsiran menggunakan pedoman yang dikemukakan oleh Maman Rachman dalam bukunya Strategi dan langkah-langkah penelitian, yaitu :

85 % > = : Sangat baik

70 % - 84 %: Baik

55 % -69 % : Cukup baik

40 % - 54 %: Kurang baik

< = 39 % : Tidak Baik⁶³

Dalam tabel di atas tentang persentase Demokratisasi Pendidikan Islam di SMP N 2 Kesesi, dapat diuraikan bahwa rata-rata persentase yang menjawab selalu ada sebanyak 58.95 %, kemudian rata-rata persentase yang menjawab kadang-kadang adalah 26.1 % dan rata-rata persentase yang menjawab tidak adalah 14.95 % , maka menurut pedoman di atas bahwa Demokratisasi Pendidikan Islam di SMP N 2 Kesesi adalah cukup baik.

⁶³ Maman Rachman, *Strategi dan langkah-langkah penelitian*, CV.IKIP Semarang Press, Semarang, 1999.hlm.36.

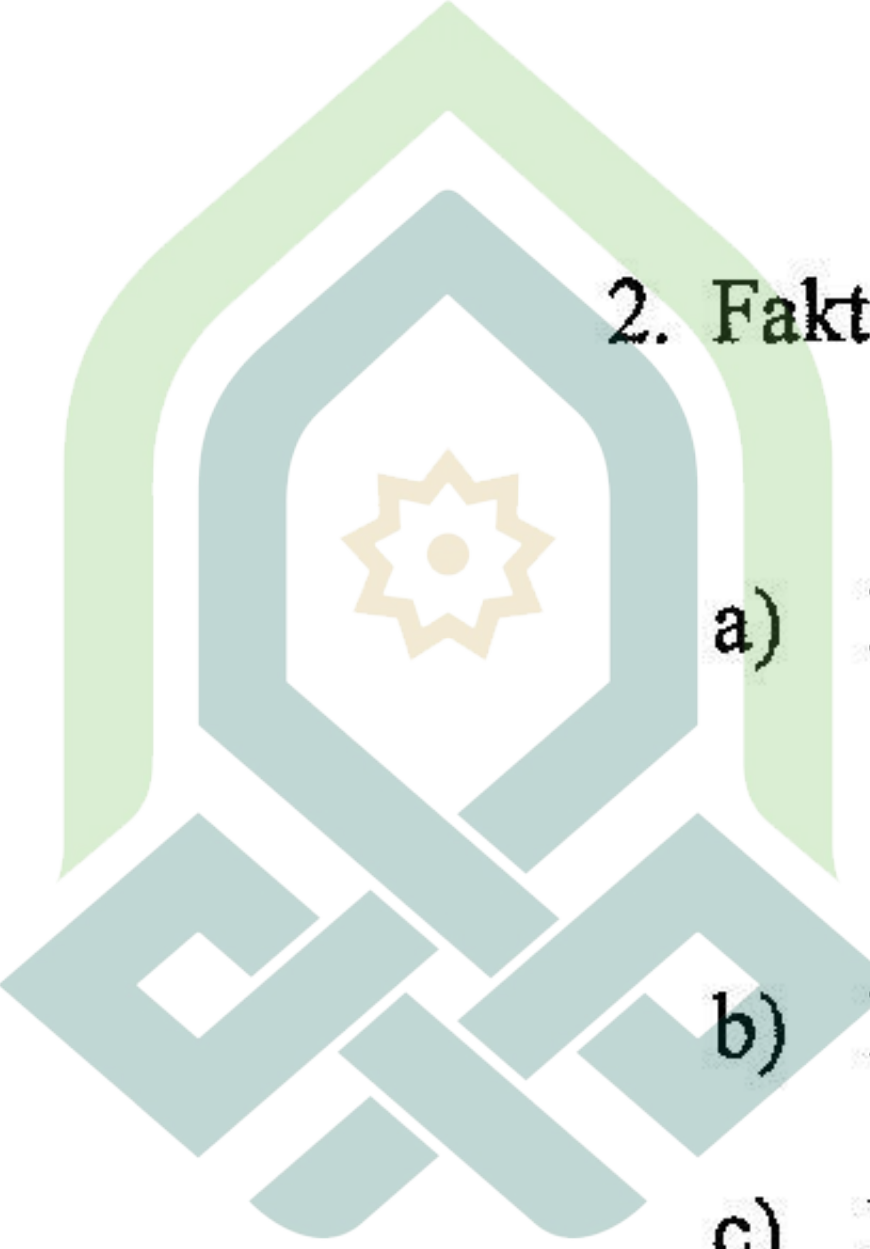
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Demokratisasi Dalam Pendidikan Islam di SMP N 2 Kesesi

Berdasarkan pengamatan dan interview terhadap beberapa stakeholder di SMP N Kesesi kabupaten Pekalongan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi demokratisasi pendidikan diantaranya:

1. Faktor pendukung

Ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi demokratisasi pendidikan di SMP N 2 Kesesi, diantaranya adalah:

- a) Adanya tata tertib atau peraturan di SMP N 2 Kesesi yang telah ditetapkan
- b) Guru yang selalu memberikan nasehat/ saran/ kritik konstruktif kepada peserta didik
- c) Adanya sarana kotak saran sebagai alat untuk menerima saran, kritik konstruktif bagi siapapun di SMP N 2 Kesesi
- d) Adanya mading (majalah dinding) sebagai sarana ekspresi meluapkan argumentasinya kepada semua stakeholder
- e) Kerjasama antara komite sekolah, kepala sekolah, guru-guru serta tata usaha (TU) yang baik
- f) Adanya kegiatan ekstra kurikuler yang berjalan dengan baik
- g) Adanya pembudayaan 4 S yaitu senyum, salam, sapa dan sayang



2. Faktor penghambat

- a) Peraturan atau tata tertib yang ada terkadang tidak dipatuhi oleh peserta didik ataupun guru
- b) Pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang baik
- c) Minimnya sumber daya manusia (SDM) pada peserta didik
- d) Kurang koordinasi antara pihak sekolah dengan Dinas terkait
- e) Teguran/ kritik/ nasihat dari Bapak/ Ibu guru yang terkadang tidak dipatuhi oleh anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang perlu penulis ungkap kembali sebagai kesimpulan yaitu :

1. Demokratisasi pendidikan mengandung arti, proses menuju demokrasi di bidang pendidikan. Indikator dari demokrasi adalah terbuka, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, bebas tekanan atau paksaan, mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama.
2. Demokratisasi dalam pendidikan Islam tercermin dalam pelaksanaan yang mempunyai beberapa kaidah :
 - a. Kaidah *ta'aruf* atau saling mengenal
 - b. Kaidah *syura* atau musyawarah
 - c. Kaidah *ta'awun* atau kerja sama
 - d. Kaidah *maslahah* atau menguntungkan masyarakat
 - e. Kaidah *'adil* atau adil
 - f. Kaidah *taqhyir* atau perubahan

Indikator dari pelaksanaan demokratisasi dalam pendidikan Islam idealnya memenuhi kaidah-kaidah tersebut yang berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadits.


3. Demokratisasi pendidikan di SMPN 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dalam bentuk :

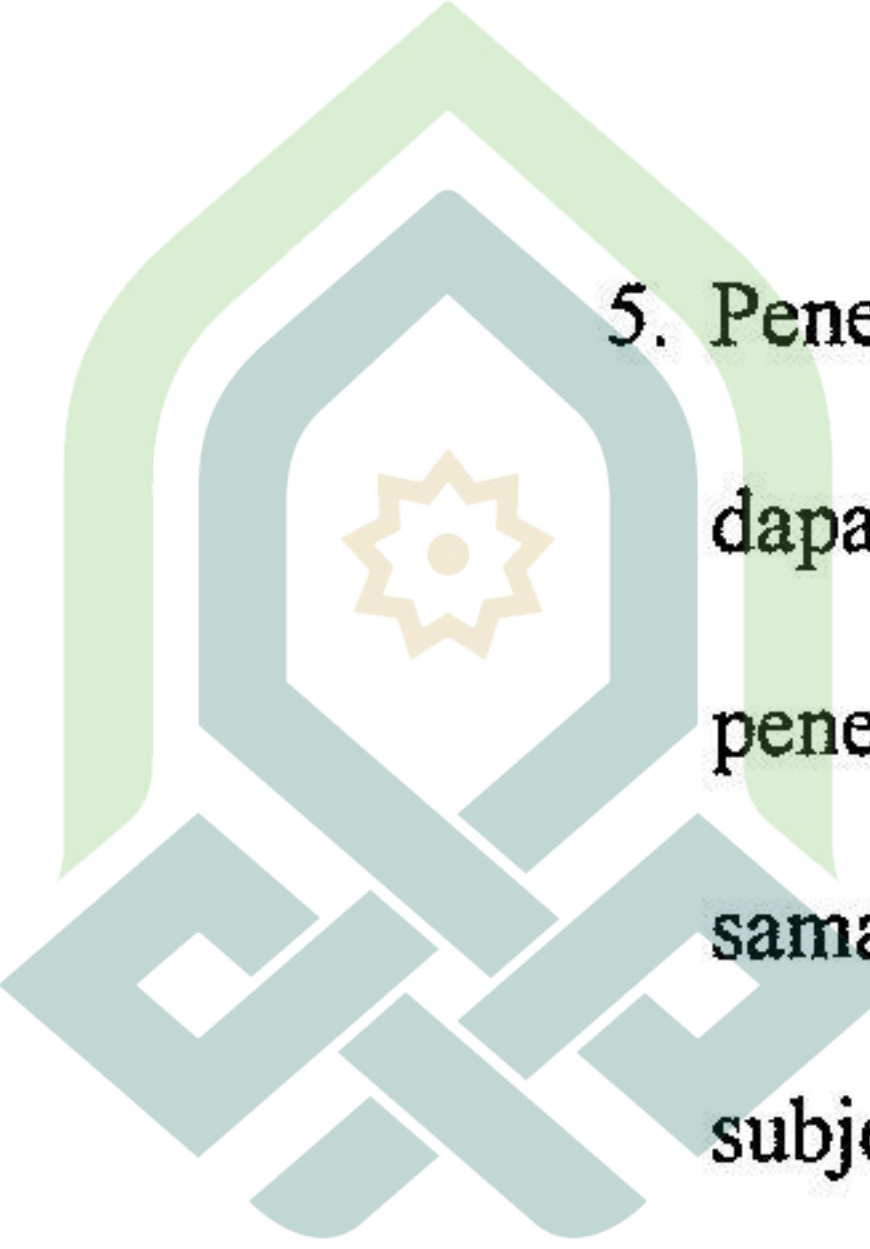
- a. Saling mengenal antara guru dan peserta didik
- b. Interaksi yang baik antara guru dengan peserta didik
- c. Keterbukaan antar guru dengan peserta didik
- d. Tanya jawab dalam proses pembelajaran
- e. Tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dilaksanakan dengan baik
- f. Adanya kerja sama antara guru dengan peserta didik

Pelaksanaan demokratisasi pendidikan di SMPN 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan cukup baik hal ini dapat dilihat dari hasil angket persentase yang menjawab selalu ada sebanyak 58,95 %, kemudian rata-rata persentase yang menjawab kadang-kadang 26,1 % dan rata-rata persentase yang menjawab tidak adalah 14,95 %.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan tentang demokratisasi dalam pendidikan Islam maka penulis mencoba untuk memberikan saran dan pemikiran yang konstruktif bagi :

- 
1. Kepala SMP Negeri 02 Kesesi diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan dalam manajemen pendidikan dan perlu ditambahkan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pendidikan, agar mutu pendidikan yang selama ini sudah cukup baik dapat dijaga dan ditingkatkan.
 2. Kepala Tata Usaha diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi tentang keadaan peserta didik dan orangtuanya. Serta jika memungkinkan dibuat bank data agar ketika mencari data akan lebih mudah.
 3. Para Guru SMP N 2 Kesesi hendaknya dalam membina akhlak peserta didik, diharapkan untuk lebih memerankan sebagai pendidik dan tidak hanya sebagai pengajar. Hal ini disebabkan mendidik lebih luas dari sekedar mengajar. Jika mengajar hanya terbatas pada *transfer of knowledge* semata, sedangkan mendidik merupakan *transfer of values* yaitu transformasi nilai dan pembinaan akhlak disamping transfer ilmu juga perilaku. Serta hendaknya dalam proses belajar mengajar, para guru menggunakan multi metode, untuk menghindari kebosanan pada peserta didik.
 4. Dinas Pendidikan, agar bisa lebih meningkatkan kepedulian dan perhatian terhadap kepala sekolah, terutama menyangkut hal-hal yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pada lembaga sekolah yang dipimpinnya.



5. Peneliti, khususnya peneliti bidang pendidikan disarankan untuk dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambah subjek penelitian seperti terhadap sekolah swasta pada kabupaten yang sama, sehingga dapat membandingkan hasil penelitian dari dua subjek yang berbeda. Atau bisa pula dengan meluaskan wilayah pada berbagai kabupaten di luar propinsi, sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Propinsi terkait untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1995.

Ali, Moh, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1992.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, jogjakarta:Rineke Cipta, 2007.

Cholisin dkk, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Yogyakarta: FISE UNY Press, 2007.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta; Bumi aksara, 1992.

Fadjar, Malik dan Effendy, Muhajir, *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan*, Malang: P3-UMM, 1991.


Faisal, Sanah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1981.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan,1997.

Naim, Ngainun dan Syauqi, Ahmad, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, Jogjakarta: Ar ruzz media, 2008.

Nata, Abudin , *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Cet.2, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.



Nugroho, Heru, *Pendidikan Demokrasi, Demokratisasi Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Makalah diskusi triwulan HMJ-PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 14 Desember 1994.

Rachman, Maman, *Strategi dan langkah-langkah penelitian*, Semarang: CV.IKIP Semarang Press, 1999.

Rosyada, Dede, *Paradigama Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.


Suhartono, Suparlan, *Wawasan pendidikan: sebuah pengantar pendidikan*, Jogjakarta: Ar ruuz media, 2008.

Ta'rifin, Ahmad - Abidin, Yasin, *Demokratisasi dan Paradigma Baru Pendidikan (kapita selekta pendidikan umum dan Islam)*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2007.

Tilaar, H.A.R, *Manajemen Pendidikan Nasional:Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung:Remaja Rosdakarya,1998.

Uhlen, Anders, *Indonesia and the "Third Wave of Democratization"the Indonesian Pro Democracy Movement in a Changing World* , Great Britain: Curzon Press,1997.

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.



Waidl, A, *Pendidikan Yang Memahami Manusia dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (ed), Transformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Nama :

Alamat :

Kelas :

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang cocok dan diisi dengan sejujur-jujurnya!

1. Apakah kamu selalu mengajukan pertanyaan kepada bapak/Ibu guru?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
2. Apakah kamu pernah bertanya kepada Bapak/Ibu guru?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
3. Apakah kamu pernah mengeluarkan pendapat kepada Bapak/Ibu guru setelah pelajaran selesai?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
4. Apakah kamu pernah berinteraksi kepada Bapak/Ibu guru?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

5. Apakah kamu dibebaskan untuk membuat kelompok belajar sendiri?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

6. Apakah kamu selalu ikut dalam kegiatan sholat berjamaah?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

7. Apakah Bapak/Ibu guru pernah memaksa kamu untuk melakukan sholat berjamaah?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

8. Apakah kamu melibatkan teman dalam proses belajar mengajar?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

9. Sejauh manakah keterlibatan teman kamu dalam berpartisipasi?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

10. Apakah kamu pernah konsultasi masalah pendidikan dengan teman kamu?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

11. Apakah kamu pernah dikritik oleh Bapak/Ibu guru?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

12. Apakah kamu pernah belajar kelompok dengan temanmu?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

13. Apakah kamu selalu mengerjakan tugas dari Bapak/Ibu guru?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

14. Apakah kamu pernah menolong temanmu saat kesusahan?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

15. Apakah kamu pernah mengajak kerja sama dengan Bapak/Ibu guru untuk belajar kelompok?

- a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

16. Apakah kamu selalu menghargai pendapat temanmu?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

17. Apakah kamu pernah memukul temanmu karena tersinggung?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

18. Apakah kamu Pernah minta doa kepada Bapak/Ibu guru??

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

19. Apakah kamu pernah mendatangi rumah Bapak/Ibu guru?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

20. Apakah kamu selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan Bapak/Ibu guru?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

Nama :

Alamat :

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang cocok dan diisi dengan sejujur-jujurnya!

1. Apakah Anda selalu mengenal semua peserta didik?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
2. Apakah Anda pernah mendatangi rumah peserta didik?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
3. Apakah Anda pernah bertanya kepada peserta didik?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
4. Apakah Anda pernah menggunakan metode diskusi kelompok dalam proses belajar mengajar?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

5. Apakah Anda pernah mengajak diskusi dengan peserta didik?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

6. Apakah Anda memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeluarkan pendapat setelah pelajaran selesai?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

7. Apakah Anda melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

8. Apakah Anda pernah menggunakan metode diskusi kelompok dalam proses belajar mengajar?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

9. Apakah Anda pernah meninggalkan tugas secara cuma-cuma kepada peserta didik?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

10. Apakah Anda pernah menyuruh peserta didik untuk konsultasi masalah pendidikan?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

11. Apakah Anda selalu mendampingi peserta didik ketika mengerjakan tugas?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

12. Apakah Anda membiarkan peserta didik yang tidak berkeinginan praktek sholat?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

13. Bagaimana perlakuan Anda terhadap peserta didik miskin dan kaya?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

14. Apakah Anda memberi nilai sesuai dengan kemampuan peserta didik?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

15. Apakah Anda pernah memukul peserta didik karena tidak mengerjakan tugas?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

16. Apakah Anda selalu mewajibkan peserta didik untuk mengerjakan tugas?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

17. Apakah perintah Anda selalu dilaksanakan oleh peserta didik?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

18. Apakah Anda memberitahukan hasil ujian kepada peserta didik setelah ujian selesai?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

19. Apakah Anda pernah mengakui kesalahan Anda?

- a. Selalu
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

20. Apakah Anda pernah bilang “tidak tahu” kepada peserta didik ketika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 02 KESESI

Alamat : Jl Raya Karyomukti Kesesi Kabupaten Pekalongan 51162 Telp. (0285) 7909725

Hal : SURAT KETERANGAN

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Tarbiyah
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan menerangkan bahwa saudara:

Nama : Abdul Adhim

NIM : 232 05 130

Jurusan : Tarbiyah / PAI

Telah mengadakan penelitian skripsi di SMP Negeri 02 Kesesi Kabupaten Pekalongan yang berjudul : **"DEMOKRATISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 02 KESESI KABUPATEN PEKALONGAN)"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Mei 2010 M

Kepala SMP N 02 Kesesi
SMP 2
KESESI
Drs. SAKHORI
NIP. 19590520 198603 1 012

TATA TERTIB SISWA SMP NEGERI 2 KESESI

I. Pendahuluan

1. Sekolah merupakan satu kelompok masyarakat pelajar (siswa) yang mempunyai tugas utama melaksanakan proses pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.
2. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia mengarah kepada pembentukan manusia seutuhnya dengan sarana utama :
 - a. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME.
 - b. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan
 - c. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air
 - d. Mampu membangun dirinya, dan mempersiapkan diri untuk secara bersama-sama mampu membangun Nusa dan Bangsa Indonesia

II. Kegiatan kurikuler :

1. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan kurikuler untuk setiap mata pelajaran, tanpa membedakan yang satu lebih penting dari pada yang lain.
2. Siswa harus sudah berada dalam lingkungan sekolah paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelajaran dimulai.
3. Bagi siswa yang mendapat giliran sebagai piket harus datang lebih awal untuk membersihkan, mengatur dan mempersiapkan ruang kelas agar siap pakai.
4. Setelah bel tanda masuk dibunyikan, para siswa serentak berbaris di depan kelas dan masuk ke dalam kelas dengan tertib dan teratur, dan kemudian menempati tempat duduk sesuai dengan posisi yang telah ditentukan oleh wali kelas.
5. Sepuluh menit awal jam pertama memulai kegiatan dengan berdo'a sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, mengucapkan salam dan membaca Al Qur'an dengan bimbingan guru dan mengulang hafalan Al Qur'an sesuai target hafalan kelas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA DIRI PENULIS

1. Nama Lengkap : Abdul Adhim
2. NIM : 232 05 130
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan 16 Agustus 1986
5. Agama : Islam
6. Alamat : Wiroditan No.46 Rt.02 Rw.01 kecamatan
Bojong kabupaten Pekalongan
7. Nama Orangtua
 - a. Ayah : Abdul Manan
 - b. Ibu : Zaetun
8. Pekerjaan Orangtua : Wiraswasta
9. Agama Orangtua : Islam
10. Alamat Orangtua : Wiroditan No.46 Rt.02 Rw.01 kecamatan
Bojong kabupaten Pekalongan
11. Contact Person : 08562682500
12. Email : adym_almanany@yahoo.co.id
13. Hoby : Baca Buku, travelling

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tingkat Dasar : SD Negeri Wiroditan I Bojong, Lulus Tahun 1999
2. Tingkat Menengah : MTS N Buaran Pekalongan , Lulus Tahun 2002
3. Tingkat Atas : MAS Simbangkulon Buaran Pekalongan,
Lulus Tahun 2005.
4. Perguruan Tinggi : STAIN Pekalongan Jurusan Tarbiyah,
Program Studi PAI

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar menjadi periksa adanya.